

ANALISA

1988 – 4

Perkembangan Perekonomian Internasional

Perkembangan Moneter Internasional

Lingkungan Ekonomi Internasional
bagi Indonesia dalam Tahun 1990-an

Prakarsa Baru
Penyatuan Eropa Menyongsong 1992

Dokumen:
Ringkasan Peristiwa ASEAN



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal bulanan untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISA adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Naskah-naskah untuk ANALISA hendaknya diketik dengan jarak dua spasi, sepanjang 20-30 halaman kuarto, termasuk referensi dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISA sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

J. Soedjati DJIWANDONO

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
A.R. SUTOPO

Redaksi Pelaksana

SOEBAGYO
Pambudi SAKSANA
S. TJOKROWARDOJO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Tata Usaha

Bagian Penerbitan CSIS. Harga Rp 1.500,00 per eksemplar;
langganan setahun (12 nomor, sudah termasuk ongkos kirim)
Rp 15.000,00.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Daftar Isi

Pengantar	184
Perkembangan Moneter Internasional	
<i>J. Soedradjad DJIWANDONO</i>	185
Lingkungan Ekonomi Internasional bagi Indonesia dalam Tahun 1990-an	
<i>Hadi SOESASTRO</i>	201
Prakarsa Baru Penyatuan Eropa Menyongsong 1992	
<i>Djisman S. SIMANDJUNTAK</i>	230
Dokumen:	
Ringkasan Peristiwa ASEAN	251

Pengantar

Dalam ANALISA nomor ini dimuat suatu rangkaian ringkasan peristiwa tentang ASEAN sejak Pertemuan Puncak III di Manila dalam bulan Desember tahun lalu. Mengingat semakin pentingnya kerjasama ASEAN, penyusunan ringkasan peristiwa ini akan diteruskan oleh team CSIS di bawah pimpinan Sudibyo dengan Yoyok Ariessusanto dan Djoko Sukokartarto sebagai anggota-anggotanya. Tetapi penerbitan ringkasan itu di dalam ANALISA akan dilakukan menurut keperluan dari waktu ke waktu, tidak terbatas pada nomor-nomor tertentu. Meskipun demikian, cara penerbitan itu tidak akan menghilangkan kesinambungan rangkaiannya.

Penerbitan rangkaian ringkasan peristiwa tentang ASEAN ini diharapkan akan berguna sebagai dokumentasi yang dapat membantu karya penelitian dan pemahaman lebih baik tentang kerjasama ASEAN. Penerbitan dokumen-dokumen lain yang mungkin juga bermanfaat untuk kepentingan serupa bagi para pembaca ANALISA masih akan dipertimbangkan.

Perkembangan Moneter Internasional

J. Soedradjad DJIWANDONO

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan internasional ditandai oleh banyaknya perubahan yang terjadi, baik yang menyangkut kelembagaannya maupun cara-cara operasi serta instrumen yang dipergunakan dalam kegiatan intermediasi keuangan. Perkembangan tersebut terjadi seringkali secara drastis sehingga menimbulkan kegoncangan, paling sedikit dalam jangka pendek, sampai terjadi penyesuaian dan keseimbangan baru lagi.

Tulisan ini akan membahas berbagai perkembangan yang dapat diamati dari moneter internasional sebagai latar-belakang perbankan internasional, demikian pula implikasi yang timbul dari perkembangan tersebut pada dunia perbankan nasional maupun pendekatan moneter perbankan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pembahasan ini akan bersifat sangat tentative bahkan spekulatif, karena hanya berdasarkan pengamatan sepintas dan tidak mendalam. Di samping itu perkembangannya sendiri mungkin sedang berjalan dan proses penyesuaiannya belum terjadi, sehingga keseimbangan baru sebagai hasilnya belum tercipta.

Pembahasan ini akan dimulai dengan mengamati gejala yang telah beberapa lama berlangsung, yaitu terpisahnya perkembangan sektor moneter perbankan dari kegiatan produksi dan perdagangan, kemudian menelaah perkembangan yang terjadi dalam hubungan ekonomi-moneter-perdagangan dunia dewasa ini. Setelah itu akan dibahas timbulnya *phenomenon global finance*

Makalah pada seminar "Tantangan dan Prospek Industri Perbankan di Indonesia di Akhir Dekade 80'an," yang diselenggarakan oleh PERBANAS di Jakarta, 12 Agustus 1987.

dan akhirnya implikasi dari perkembangan-perkembangan tersebut bagi perkembangan perbankan.

GEJALA DIKOTOMI EKONOMI MONETER DAN PRODUKSI

Beberapa waktu yang lalu Peter Drucker menunjukkan terjadinya perubahan mendasar dari perekonomian dunia yang meliputi tiga kelompok permasalahan, yaitu terpisahnya ekonomi bahan mentah dari ekonomi industri, lepasnya kaitan ekonomi industri dari kesempatan kerja, dan gejala lepasnya ekonomi moneter dari ekonomi produksi.¹ Beberapa waktu yang lalu di dalam masyarakat kita terjadi banyak pembahasan di berbagai fora mengenai pendapat Drucker ini, sehingga di sini tidak akan dibahas lebih lanjut. Akan tetapi kiranya tidak sukar untuk melihat perkembangan di dalam dunia moneter-perbankan seperti yang dilukiskan ahli tersebut. Di manapun juga tampaknya terjadi fenomena yang sama, yaitu bahwa terutama akhir-akhir ini, pada waktu pertumbuhan kegiatan produksi dan perdagangan tampak tersendat-sendat, tidak demikian halnya dengan perkembangan perkreditan. Sampai beberapa waktu yang lalu perkembangan lalu lintas moneter justru luar biasa pesatnya sehingga terdapat kesan terpisahnya perkembangan moneter dari produksi. Terdapat kecenderungan bahwa perekonomian dunia lebih ditentukan oleh pergerakan modal, aliran kredit serta nilai tukar mata uang, atau oleh besaran-besaran moneter, dan bukan oleh kegiatan produksi atau investasi dan perdagangan.

Memang besarnya aliran uang dan modal antar bangsa-bangsa di dunia tidak pernah dapat kita ketahui secara pasti, karena statistik yang ada tidak pernah mencatat secara akurat. Berbagai laporan yang ada sering menyajikan perkiraan yang berbeda karena adanya perbedaan cara perhitungan, apakah secara kotor (*gross*) atau bersih (*netto*), luas sempitnya lingkup perhitungan, dan sebagainya. Akan tetapi dari statistik yang ada telah tampak adanya kesenjangan antara besarnya lalu lintas uang dan modal dengan besarnya kebutuhan dana pembiayaan yang secara tradisional dianggap menentukan besar kecilnya aliran moneter tersebut.

Salah satu perkiraan yang disitir Peter Drucker menyebutkan bahwa volume pinjaman antar bank di London akhir-akhir ini meliputi jumlah sekitar US\$75 trilyun dalam satu tahun, sedangkan nilai perdagangan barang-barang dan jasa-jasa di dunia dalam satu tahun kurang lebih berjumlah US\$3

¹Peter F. Drucker, "The Changed World Economy," *Foreign Affairs* (Spring 1986): hal. 768-791.

trilyun. Selain itu transaksi valuta di pusat-pusat keuangan dunia secara keseluruhan meliputi US\$35 trilyun satu tahun. Jadi untuk setiap hari kerja pinjaman antar bank di London meliputi US\$300 milyar, sedangkan aliran valuta sekitar US\$150 milyar. Angka-angka di atas memberi petunjuk bahwa volume kredit antar bank adalah sekitar dua puluh lima kali lebih besar dan volume perdagangan valuta dua belas kali lebih besar dari volume perdagangan barang dan jasa. Perkiraan lain menunjukkan bahwa dari permulaan dasawarsa tujuh puluhan sampai pertengahan dasawarsa delapan puluhan transaksi valuta asing telah meningkat dengan tiga puluh kali sedangkan perdagangan komoditi hanya dengan lima setengah kali saja.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang sangat menyolok antara aliran valuta dan kredit dengan aliran barang dan jasa dalam perdagangan. Hal ini memberi petunjuk bahwa pasar uang tidak dipengaruhi oleh permintaan akan dana pembiayaan untuk perdagangan. Angka mengenai investasi tidak dapat dikemukakan, tetapi dari berbagai laporan tampak bahwa kegiatan ini selama beberapa tahun terakhir tampak mengendor di kebanyakan negara. Jadi pembiayaan investasi juga tidak menerangkan tingginya permintaan akan dana. Dengan lain perkataan terdapat gejala adanya pemisahan antara perkembangan ekonomi moneter dan ekonomi produksi. Dan karena fungibilitas dari uang, akhirnya kekuatan atau motivasi moneter tersebutlah yang menentukan perkembangan pasar uang dan modal, sedangkan produksi dan perdagangan harus menyesuaikan.

Volume aliran dana yang US\$150 milyar besarnya setiap hari merupakan fenomena baru dalam moneter dunia. Dalam pendekatan yang tradisional, permintaan likuiditas biasanya dikaitkan dengan kebutuhan dana untuk membiayai transaksi perdagangan dan investasi. Lebih lanjut yang terakhir berarti penanaman modal dalam arti fisik, seperti mendirikan pabrik, membeli mesin, dan sebagainya. Akan tetapi pertumbuhan dalam perdagangan dan investasi fisik saja kiranya tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi aliran dana sebesar US\$150 milyar setiap harinya.

Dewasa ini sebagian besar dari aliran dana tersebut dipergunakan untuk membiayai investasi dalam bentuk yang non-fisik, yaitu aset finansial. Selain itu sebagian besar yang lain dipergunakan untuk membiayai pinjaman lama, apakah itu berupa *restructuring*, mengubah pinjaman menjadi saham, atau cara-cara lain lagi. Jumlah pinjaman dunia meningkat luar biasa, terutama setelah pertengahan dasawarsa tujuh puluhan, dan karena itu pembiayaan pinjaman atau pengembalian suku bunga dan pokok pinjaman juga terus meningkat.

Berbagai gejolak dalam hubungan ekonomi, moneter dan perdagangan dunia sejak permulaan dasawarsa tujuh puluhan telah menyebabkan kurangnya kepastian usaha. Yang terakhir ini telah mendorong perubahan hubungan ekonomi dunia, di mana kegiatan produksi dan perdagangan kurang memberikan daya tarik bagi kegiatan usaha. Sektor produksi dan perdagangan barang tertinggal, bahkan cenderung terpisah dari sektor finansial yang didominasi oleh perdagangan surat berharga dan valuta. Jadi permintaan dana untuk membiayai investasi dalam aset finansial dan membiayai pinjaman telah mendominasi pasar uang dan modal dan sekaligus mendorong terpisahnya ekonomi moneter dari ekonomi produksi. Seolah-olah terjadi dikotomi ekonomi klasik.

Implikasi dari terjadinya gejala baru dalam hubungan ekonomi moneter dunia ini tentunya menyangkut ketepatan analisa dan dengan demikian pengamatan terhadap perkembangan yang terjadi. Analisa yang mendasarkan diri atas paradigma lama perlu disesuaikan, misalnya, menerangkan latar belakang tingginya suku bunga pinjaman dalam arti riilnya. Tingginya suku bunga pinjaman bukan hanya monopoli perekonomian Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia. Bahkan akhir-akhir ini, pada waktu telah terjadi penurunan suku bunga pinjaman di kebanyakan negara, dalam arti riilnya suku bunga yang berlaku masih jauh lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang terjadi di masa silam. Analisa tentang pembentukan harga perkreditan (suku bunga) yang hanya melihat permintaan akan dana dalam arti tradisional seperti diemukakan di atas tentunya tidak akan dapat menerangkan mengapa keseimbangan pasar uang dan modal terjadi pada tingkat suku bunga yang demikian tinggi. Akan tetapi dengan memasukkan kedua unsur baru sebagai motivasi permintaan akan kredit, yaitu pembiayaan investasi finansial (termasuk spekulasi tentunya) dan pembiayaan pinjaman (lama), analisa kita akan lebih akurat. Dengan demikian tentunya tidak perlu mengherankan bahwa suku bunga pinjaman berada pada tingkat yang tinggi di kebanyakan negara sejak akhir dasawarsa tujuh puluhan yang lalu. Dengan lain perkataan, kalau seluruh permintaan akan dana tadi diperhitungkan ternyata jumlahnya lebih besar dari penawaran yang ada, sehingga suku bunga menjadi tinggi.

Hal yang serupa akan kita jumpai kalau kita menganalisa keseimbangan nilai tukar dalam pasar valuta. Kenyataan bahwa permintaan akan valuta tidak hanya dilatar belakangi oleh kebutuhan dana pembiayaan impor barang dan jasa serta kebutuhan dana pembiayaan investasi fisik membawa implikasi tidak memadainya analisa mengenai penentuan nilai tukar mata uang suatu negara yang hanya memusatkan perhatian pada perkembangan neraca perdagangan atau transaksi berjalan saja. Dalam sistem moneter dunia yang menda-

sarkan diri atas pengembangan nilai tukar dengan perkembangan perekonomian yang kurang memberikan kepastian usaha nilai tukar mata uang dapat bergerak secara terlepas dari perkembangan neraca perdagangan dan pembayaran negara yang bersangkutan. Dalam keadaan ini nilai tukar mata uang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat *ad hoc* sehingga sukar diperkirakan arahnya, tidak berbeda dengan penentuan nilai saham perusahaan dalam bursa saham. Karena itu nilai tukar mata uang dapat bergerak dalam sekejap hanya karena perkembangan sosial politik yang terjadi, pernyataan seseorang yang berpengaruh, atau kejadian lain yang tampaknya tidak terkait secara langsung dengan pasar valuta itu sendiri.

Jadi perkembangan di atas menunjukkan gejala terpisahnya ekonomi moneter dari ekonomi riil, yang digambarkan oleh kegiatan produksi, investasi dan perdagangan. Dalam keadaan ini pasar uang dan modal menjadi tidak menentu, sukar diperkirakan arahnya, karena didominasi oleh permintaan akan dana guna pembiayaan investasi finansial yang banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tidak menentu, termasuk spekulasi, serta guna penyelesaian pinjaman lama yang juga tidak menentu.

Permintaan dalam pasar uang dan modal bukan merupakan satu-satunya unsur penentu dalam perkembangan yang terjadi. Ternyata perkembangan baru juga terjadi dari segi penawarannya. Praktek perbankan lepas pantai yang didukung oleh cara-cara baru perbankan komersial yang lebih agresif, tersedianya dana dalam jumlah yang besar dimulai pada waktu terjadi bonanza minyak bagi sekelompok negara dan kemajuan teknologi yang mempermudah pelaksanaan kegiatan perbankan, telah mengimbangi perkembangan pada sisi permintaan yang akhirnya menimbulkan perkembangan sebagaimana kita amati. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian yang mengupas masalah *global finance*.

KETIDAKPASTIAN USAHA DAN MENINGKATNYA INTERDEPENDENSI

Perkembangan perekonomian dunia menunjukkan kecenderungan yang seolah-olah berlawanan. Di satu pihak, seperti disinggung di atas, terjadi suatu perkembangan yang menunjukkan terpisahnya (*uncoupling*) berbagai hubungan dalam proses ekonomi seperti dikemukakan oleh Peter Drucker.²

²Seperti dikemukakan di atas pembahasan mengenai hal ini telah banyak, penulis sendiri pernah mengemukakan dalam tulisan "Perkembangan Moneter dalam Ekonomi Dunia yang Berubah," *Kompas*, 7-8 Januari 1987.

Akan tetapi di lain pihak terjadi kecenderungan makin tergantungnya perkembangan suatu perekonomian pada perekonomian yang lain. Dengan lain perkataan terdapat kecenderungan makin meningkatnya hubungan interdependensi dalam ekonomi, moneter dan perdagangan antar bangsa-bangsa di dunia.

Jadi terdapat kecenderungan dalam proses kegiatan produksi yang tampaknya memisahkan satu jenis kegiatan dari yang lain. Akan tetapi bersamaan dengan itu perekonomian yang satu makin tergantung pada yang lain dalam kelangsungan hidupnya. Kalau kita teliti lebih lanjut tampaknya gejala pemisahan berbagai jenis kegiatan ekonomi tadi ada pada sisi produksi atau penawaran, sedangkan ketergantungan kelangsungan hidup satu perekonomian pada yang lain atau hubungan interdependensi terletak pada sisi permintaannya. Pada akhirnya karena keduanya harus bertemu, memang tidak bisa lain kecuali timbulnya gejala ketergantungan yang makin menguat. Pengamatan memang menunjukkan bahwa hubungan ekonomi, perdagangan dan moneter dunia sejak dasawarsa tujuh puluhan telah menonjolkan dua gejala yang berkaitan, yaitu meningkatnya hubungan interdependensi dan ketidakpastian usaha.

Ketidakpastian usaha pada dasarnya disebabkan oleh berbagai gejolak yang timbul sejak permulaan dasawarsa tujuh puluhan sampai akhir-akhir ini. Untuk menyebutkan yang pokok-pokok saja, kita mencatat ditinggalkannya sistem *Bretton Woods* dalam moneter dunia (1971), membubungnya (1972) dan kemudian anjloknya (1977) harga-harga komoditi primer, membubungnya (1973-1974 dan 1979-1980), turun (1982) dan anjloknya (1986) harga minyak bumi, melangitnya suku bunga perkreditan (sejak 1979), tidak menentunya imbalan nilai tukar mata uang negara-negara besar, masalah penyelesaian pinjaman negara-negara berkembang, dan sebagainya.

Perkembangan-perkembangan tersebut telah menyebabkan dilaksanakannya berbagai tindakan penyesuaian, baik oleh para penguasa negara dalam bentuk kebijaksanaan fiskal, moneter dan perdagangan, termasuk penentuan nilai tukar, maupun oleh dunia usaha dalam sektor-sektor yang tersangkut. Semua ini pada akhirnya menghasilkan ketidakpastian hubungan ekonomi, moneter dan perdagangan, dan pada gilirannya menimbulkan gejolak pada perekonomian nasional negara-negara di dunia.

Ditinggalkannya sistem nilai tukar tetap pada tahun 1971 telah menyebabkan diterapkannya sistem nilai tukar mengambang sejak tahun 1973. Meskipun teori perdagangan internasional telah memberikan prediksi tentang tim-

bulnya keseimbangan perdagangan dan moneter internasional kalau negara-negara menganut sistem nilai tukar yang bebas mengambang, ternyata pengalaman selama ini menunjukkan perkembangan yang berbeda. Bagaimanapun juga praktek perdagangan menunjukkan bahwa penerapan sistem kurs mengambang telah menimbulkan ketidakpastian usaha yang dapat menghalangi pertumbuhan perdagangan.³

Kejutan harga-harga komoditi primer, dan lebih-lebih minyak, telah mempertajam ketidakseimbangan struktural perekonomian negara-negara, baik maju maupun berkembang, yang akhirnya menjadi awal terjadinya resesi terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh negara-negara maju dalam bentuk kebijaksanaan moneter dan fiskal serta langkah-langkah yang diambil dunia perbankan menghadapi ketidakpastian hubungan ekonomi, perdagangan, dan moneter telah menimbulkan gejolak tingginya suku bunga pinjaman dan tidak menentunya nilai tukar mata uang negara-negara besar. Keduanya akhirnya menyebabkan timbulnya masalah pengembalian pinjaman negara-negara berkembang.

Selain timbulnya ketidakpastian usaha, hubungan ekonomi, perdagangan dan moneter dunia juga ditandai oleh makin menguatnya interdependensi antar negara dan antar kelompok negara. Suatu perkembangan yang menunjukkan hal ini tampak dari makin meningkatnya peranan perdagangan dunia dalam produksi dunia selama dua dasawarsa terakhir dari 12% menjadi 22%. Negara-negara yang semula tidak terlalu tergantung pada sektor luar negerinya, seperti Amerika Serikat, juga makin menjadi lebih terbuka. Demikian pula kenyataan makin meningkatnya upaya bersama negara-negara besar dalam menangani permasalahan moneter dan perdagangan seperti adanya *Plaza Accord* dan *Paris Accord*, serta kesepakatan para pemimpin negara kaya dalam berbagai KTT terakhir mengenai perlunya koordinasi kebijaksanaan ekonomi makro, menunjukkan makin menguatnya interdependensi tersebut.

TIMBULNYA GLOBAL FINANCE

Interdependensi yang menguat antara suatu perekonomian dengan yang lain dalam bidang moneter-perbankan tampak jelas pada timbulnya dan

³Mengenai perkembangan perdagangan dunia dengan sistem nilai tukar bebas mengambang dapat ditelaah dari studi Dana Moneter Internasional, *The Exchange Rate System: Lessons of The Past and Options of The Future* (Washington, D.C.: The International Monetary Fund, July 1984). Dapat dibaca pula tulisan saya, "Tiga Belas Tahun Nilai Tukar Mengambang," *Kompas*, 27 Februari 1986.

makin berperannya lembaga keuangan perbankan yang operasinya lebih bersifat internasional. Proses internasionalisasi lembaga keuangan yang sering dinamakan *global finance* ini telah berjalan beberapa lama. Menurut Presiden Bank of Tokyo, Yusuke Kashiwagi, *global finance* meliputi tiga macam perkembangan, yaitu internasionalisasi keuangan atau proses meluasnya operasi lembaga keuangan sehingga meliputi seluruh dunia, sekuritisasi atau proses membaurnya operasi bank-bank komersial dengan lembaga-lembaga keuangan sekuriti, dan inovasi baru berupa perluasan jasa pasar uang sehingga mencakup berbagai kegiatan di luar yang secara tradisional dikerjakan pasar uang.⁴

Ketiga proses yang berjalan bersamaan pada lembaga keuangan, yaitu internasionalisasi, sekuritisasi dan inovasi mempunyai sifat integrasi dan menciptakan *global finance*. Proses internasionalisasi lembaga keuangan telah mengintegrasikan operasi pasar uang yang bekerja duapuluh empat jam tiap harinya. Sekuritisasi merupakan praktek baru yang banyak dilaksanakan badan usaha, di mana perusahaan lebih menekankan penggunaan instrumen saham dan surat berharga daripada pinjaman bank dalam pembiayaan usahanya. Dalam teori perbankan proses ini merupakan disintermediasi. Akan tetapi perbankan telah menyesuaikan operasinya dengan penyediaan jasa pengelolaan emisi surat berharga perusahaan atau melakukan usaha bersama dengan lembaga keuangan yang secara tradisional mengelola hal ini, yaitu lembaga keuangan pembiayaan investasi (*investment finance companies*). Kedua perkembangan operasi perbankan tersebut pada dasarnya memberikan dampak yang sama yaitu menyatunya operasi pasar uang dan modal ke dalam *global finance*.

Inovasi baru dalam operasi lembaga keuangan, seperti penciptaan instrumen *floating rate notes* (FNR), berbagai bentuk fasilitas *swap*, *option* dalam suku bunga dan mata uang, serta *financial futures*, juga makin mempermudah integrasi moneter, baik dalam arti menyatunya berbagai jenis lembaga keuangan yang berbeda fungsinya maupun meluasnya lingkup kegiatan sehingga menjadi internasional. Berbagai instrumen moneter dan praktek baru tersebut pada dasarnya merupakan upaya dunia usaha untuk menghindarkan diri atau mengurangi berbagai macam resiko yang melekat pada lingkungan usaha yang serba tidak pasti sebagai digambarkan sebelumnya. *Option* atau *future* digunakan oleh dunia usaha untuk menjaga diri terhadap resiko

⁴Yusuke Kashiwagi, "The Emergence of Global Finance," ceramah pada 1986 Per Jacobsson Lecture, Washington, D.C., 28 September 1986 (mimeo). Baca pula Augustine H.H. Tan dan Basant Kapur, eds., *Pacific Growth and Financial Interdependence*, part III (Sydney: Allen and Unwin, 1986).

keuangan yang timbul karena perubahan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dari suku bunga maupun nilai tukar mata uang. Sekaligus instrumen dan teknik baru ini telah menyatukan berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pasar yang berbeda. Adanya *swap* dalam suku bunga, misalnya, telah mempertemukan perbedaan suku bunga antar berbagai pasar yang timbul karena perbedaan peraturan moneter, pengenaan pajak, dan sebagainya.⁵

Dengan demikian perkembangan hubungan ekonomi, perdagangan dan moneter yang penuh dengan ketidakpastian dan interdependensi telah menimbulkan *global finance*. Internasionalisasi, sekuritisasi dan inovasi dalam lembaga keuangan merupakan upaya penyesuaian yang dilakukan dunia usaha menghadapi fluktuasi yang besar dalam suku bunga perkreditan serta nilai tukar mata uang. Selain itu, meluasnya kebijaksanaan deregulasi di banyak negara dalam perbankan dan lembaga keuangan lain, pengawasan devisa, penentuan suku bunga, perpajakan dan operasi lembaga-lembaga keuangan asing, telah menunjang proses timbulnya *global finance*.⁶ Demikian pula halnya dengan kemajuan teknologi dalam komunikasi dan komputer yang memperlancar pemrosesan transaksi yang kompleks dari aliran dana yang maha besar dengan biaya yang makin menurun.

PERKEMBANGAN BERBAGAI INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Meskipun seolah-olah terjadi dikotomi ekonomi moneter dengan ekonomi produksi, pertumbuhan produksi dan perdagangan serta perkembangan kebijaksanaan negara-negara, terutama yang besar, sangat mempengaruhi perbankan internasional dewasa ini dan masa depan. Tentu saja aliran dana dan modal termasuk pinjaman yang tampak dari neraca perdagangan dan pembayaran negara-negara juga mempengaruhi perkembangan operasi perbankan. Karena itu, meskipun secara sepintas, kita perlu membahas perkembangan-perkembangan tersebut.

⁵Perkembangan dan analisa mengenai hal ini dapat dibaca dalam Maxwell Watson, et al., *International Capital Markets: Development and Prospects* (Washington, D.C.: International Monetary Fund Occasional Paper no. 43, Februari 1986). Dapat dibaca pula Gerald Krefetz, *How to Read and Profit from Financial News* (New York: Ticknor & Fields, 1984).

⁶Deregulasi pengaturan lembaga keuangan yang masih berlangsung dan banyak mendapat sorotan adalah yang dilakukan di Jepang (lihat laporan Haruo Maekawa Ketua 'Special Committee on Economic Restructuring,' 1 Desember 1986 dan 14 Mei 1987). Di Amerika Serikat deregulasi dilaksanakan sejak tahun 1980. Baca, misalnya Thomas F. Cargill dan Gillian G. Garcia, *Financial Reform in the 1980s* (Stanford University: Hoover Institution Press, 1985) dan Kerry Cooper & Donald R. Fraser, *Banking Deregulation and the New Competition in Financial Services* (Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Company, 1984).

Perkiraan Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi dunia tahun 1987 tidak banyak berbeda dari tahun 1986, masing-masing 2,8% dan 2,9%, kemudian terjadi peningkatan yang lebih tinggi tahun 1988 menjadi 3,2%. Laju pertumbuhan produksi negara-negara industri untuk tahun-tahun tersebut diperkirakan 2,5%, 2,4% dan 2,8%, sedangkan negara-negara berkembang 3%, 3,5% dan 4%.⁷ Bank Dunia dalam laporan tahunannya membuat dua perkiraan; pertama, kasus tinggi, yaitu kalau negara-negara industri dan berkembang berhasil melakukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan; kedua, kasus rendah, kalau keadaan sekarang ini berlangsung terus. Dalam kasus tinggi, pertumbuhan negara-negara industri dalam satu dasawarsa yang akan datang (1985-1995) berkisar sekitar 4%, dan negara-negara berkembang sekitar 6%. Sedangkan dalam kasus rendah, negara-negara industri diperkirakan tumbuh dengan sekitar 2,5% dan negara-negara berkembang 4%.⁸

Mengenai perdagangan internasional, volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat dengan 3,5% pada tahun 1987 dan 4,8% tahun 1988. Ekspor negara-negara industri diperkirakan tumbuh dengan 3,4% dan 5%, sedangkan negara-negara berkembang dengan 3,8% dan 5,4% untuk tahun-tahun yang sama. Defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran dari negara-negara industri diperkirakan meningkat dari US\$14,4 milyar menjadi US\$26 milyar untuk tahun 1987 dan 1988, sedang Amerika Serikat mengalami US\$133,6 milyar dan US\$138,5 milyar defisit untuk kedua tahun tersebut. Sementara itu transaksi berjalan pada neraca pembayaran negara-negara berkembang untuk tahun-tahun tersebut mengalami defisit masing-masing sebesar US\$34,5 milyar dan US\$23,7 milyar. Defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan ditambah perubahan cadangan devisa merupakan indikator dari kebutuhan negara-negara akan aliran dana.

Selain itu besarnya pinjaman yang ada dan teknik pembiayaan pinjaman tersebut juga mempengaruhi perkembangan perbankan internasional. Sebagaimana diketahui, pinjaman negara-negara berkembang terus-menerus meningkat sejak pertengahan dasawarsa tujuh puluhan. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 1985, seluruh pinjaman negara-negara berkembang, baik yang berjangka pendek maupun panjang, telah meliputi jumlah US\$970 milyar, sedangkan dewasa ini telah melebihi US\$1 trilyun.⁹

⁷International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Prospect and Issues* (Washington, D.C.: International Monetary Fund, April 1987).

⁸World Bank, *World Development Report 1987* (New York: Oxford University Press, 1987).

⁹World Bank, *Coping with External Debt in the 1980s* (Washington, D.C.: The World Bank, March 1985).

Dari angka-angka perkiraan di atas tampak bahwa pemulihan kembali perekonomian dunia yang telah mulai beberapa tahun terakhir masih akan berjalan lambat. Pertumbuhan produksi, bahkan dalam perkiraan kasus tinggi tidak akan mencapai laju yang pernah dicapai di masa silam, seperti satu dasawarsa dari pertengahan enam puluhan sampai pertengahan tujuh puluhan. Apalagi kalau penyesuaian yang diharapkan terjadi di negara-negara maju dan berkembang tidak terwujud; pertumbuhan tersebut akan sangat rendah seperti akhir-akhir ini. Kalau pertumbuhan produksi tidak terjadi seperti diperkirakan tentunya hal yang sama akan berlaku bagi perdagangan barang dan jasa, karena semua ini erat kaitannya. Perdagangan justru masih dapat lebih lambat lagi kalau proteksionisme semakin menguat.

Permasalahan yang harus dihadapi perekonomian dunia masih ditandai oleh adanya ketimpangan struktural yang merupakan akibat perkembangan yang terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Pada dasarnya, permasalahan yang dihadapi negara-negara industri masih tetap, yaitu melemahnya daya saing Amerika Serikat yang menghadapi dua defisit kembar, anggaran pemerintah dan transaksi berjalan pada neraca pembayarannya. Negara-negara Eropa menghadapi masalah kakunya struktur industri dan besarnya pengangguran angkatan kerjanya, sedangkan Jepang masih dalam proses mengurangi ketergantungannya yang terlalu besar pada ekspor sebagai pendorong pertumbuhan ekonominya.¹⁰ Sementara itu negara-negara industri baru mulai mengadakan berbagai langkah penyesuaian untuk mengurangi ketimpangan neraca perdagangannya dengan Amerika Serikat. Negara-negara berkembang harus menghadapi masalah menurunnya peranan ekonomi barang primer, menguatnya proteksionisme negara industri dan pengembalian pinjaman yang menekan upaya pembangunan ekonomi. Dalam suasana im-bangan serta hubungan ekonomi, perdagangan dan moneter dunia yang masih belum menentu dengan kecenderungan menguatnya interdependensi yang masih berlangsung, perkembangan perbankan internasional masih akan ditandai oleh berlangsungnya proses penciptaan *global finance* dengan segala sifat dan operasinya sebagaimana digambarkan di atas.

Suatu perkembangan yang harus diamati dalam hubungan dengan perkembangan perbankan internasional adalah mengenai penyelesaian masalah pinjaman negara-negara berkembang. Sebagaimana disebutkan di atas, pinjaman negara-negara berkembang ini telah meliputi jumlah yang sangat besar. Bagaimana bentuk aliran dana yang berkaitan dengan pinjaman ini, demikian pula bagaimana cara dan bentuk pengembaliannya tentunya akan mempengaruhi

¹⁰Laporan Maekawa, 14 Mei 1987.

operasi perbankan internasional sebagai salah satu pelaku utama dalam hubungan ini.

Permasalahan pinjaman negara-negara berkembang menjadi perhatian semua orang sejak tahun 1982, pada waktu beberapa negara peminjam, terutama Mexico, mengalami masalah tidak mampunya membayar angsuran pinjamannya. Setelah itu negara demi negara, terutama di Amerika Latin, mengalami masalah yang serupa. Dan kemudian berbagai langkah yang ditempuh oleh negara-negara peminjam serta usulan penyelesaian masalah tersebut dalam berbagai fora internasional bermunculan. Dan akhirnya berbagai bank internasional mengambil tindakan, seperti yang diprakarsai Citi-corp dengan meningkatkan cadangannya untuk menghadapi tidak diangsurnya pinjaman negara-negara berkembang tersebut.

Yang jelas sejak permulaan dasawarsa ini berbagai indikator menunjukkan makin besarnya masalah pinjaman negara-negara berkembang. Selain jumlah yang makin besar, tampak bahwa pinjaman sebagai persentasi terhadap produksi nasional terus meningkat, dari sekitar 20% pada tahun 1980 menjadi 35% tahun 1986. Rasio pinjaman terhadap ekspor meningkat dalam waktu yang sama dari 90% menjadi 145%, sedangkan rasio antara besarnya angsuran dan suku bunga terhadap ekspor, atau apa yang dikenal sebagai *Debt Service Ratio* (DSR), meningkat dari 16% menjadi lebih dari 22%.¹¹ Usulan penyelesaian masalah pinjaman ini yang terkenal adalah inisiatif Menteri Keuangan AS, James Baker, dikemukakan pada sidang tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Seoul akhir tahun 1985 yang lalu. Tetapi, usul ini tidak banyak artinya bagi negara-negara peminjam, dan tidak tampak dilaksanakan.¹²

Akhir-akhir ini banyak diberitakan berbagai cara baru dalam penyelesaian masalah pinjaman dunia, seperti misalnya apa yang dikenal sebagai *debt-equity swap* atau seperti disebutkan dalam Laporan Bank Dunia istilah yang lebih tepat adalah *debt conversion*. Pada dasarnya yang dilaksanakan di sini adalah bahwa negara peminjam mengeluarkan surat promes kepada pemberi pinjaman (bank) yang kemudian dijual dengan discount kepada mereka yang ingin melakukan investasi di negara peminjam. Jadi konversi yang terjadi adalah dari instrumen pinjaman internasional menjadi kewajiban domestik, baik untuk pembiayaan investasi maupun untuk maksud pembiayaan yang

¹¹Bank Dunia, *World Development Report 1987*, hal. 18.

¹²Saya pernah membahas permasalahan ini dalam "Rencana Baker dan Kita," dimuat dalam *Kompas*, 25 Desember 1985.

lain. Akan tetapi baru beberapa negara seperti Chili dan Filipina yang melakukan hal ini, sehingga dewasa ini baru meliputi nilai sekitar US\$1 milyar atau sekitar 1% dari nilai keseluruhan pinjaman negara-negara berkembang.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman negara-negara berkembang. Pada permulaan timbulnya krisis pinjaman tahun 1982 yang lalu, usulan penyelesaian yang populer menyangkut restrukturisasi secara mendasar, biasanya termasuk persyaratan pinjaman yang lebih lunak serta pengalihan pinjaman dari perbankan komersial kepada lembaga keuangan resmi (pemerintah) dengan suatu discount. Kemudian, pada waktu meningkatnya suku bunga perbankan AS (dollar), berbagai usulan timbul untuk membatasi kewajiban peminjam yang timbul sebagai akibat meningkatnya suku bunga (*interest rate cap*), kemudian berbagai usulan yang menyangkut perbaikan persyaratan pinjaman, seperti perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, serta penurunan berbagai biaya.

Suatu studi yang dilakukan oleh Fred Bergsten *et al.* menunjukkan 24 cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan pinjaman kepada negara-negara berkembang, yang dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu yang merupakan inovasi baru dan perluasan cara lama, mengurangi gelombang pembayaran dan kapitalisasi suku bunga, menghubungkan pembayaran dengan kapasitas, serta yang bersifat penghapusan pinjaman (*debt relief*).¹³ Termasuk dalam kategori inovasi baru adalah penurunan *spread*, penjadwalan kembali multi tahun, konversi mata uang, *cofinancing*, dan beberapa cara lagi. Dalam kategori kedua termasuk berbagai cara untuk membatasi kewajiban peminjam seperti *interest rate cap* atau *indexed loans*. Yang termasuk dalam kategori ketiga adalah pembatasan pembayaran kembali pinjaman kepada besarnya hasil ekspor, pembayaran dengan mata uang peminjam, dan *debt equity swap*. Penghapusan pinjaman meliputi pembebasan pembayaran suku bunga dan/atau pembayaran pinjaman.

Dari berbagai perkiraan yang ada tampak bahwa aliran modal dunia, bahkan seandainya negara-negara berkembang mampu menarik pinjaman resmi maupun swasta, tidak akan terjadi pada jumlah yang memadai. Aliran bersih dana akhir-akhir ini justru terjadi dari negara-negara berkembang ke negara-negara industri, dan bukan yang sebaliknya.

¹³C. Fred Bergsten, William R. Cline dan John Williamson, *Bank Lending to Developing Countries: The Policy Alternatives* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, April 1985).

Langkah-langkah yang nyata perlu diusahakan, baik untuk meningkatkan aliran modal dalam jangka pendek untuk mendorong pemulihan kembali kegiatan produksi dewasa ini, maupun untuk memperbaiki persyaratan perkreditan sehingga memungkinkan pemindahan sebagian beban resiko yang akhir-akhir ini terlalu banyak ditimpakan pada negara-negara peminjam kepada para kreditor. Dengan prospek yang lebih baik bagi kreditor dalam bentuk hasil investasi yang memadai di masa depan tentunya cara-cara ini akan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berbagai jalan yang dapat ditempuh, termasuk instrumen yang mempunyai potensi untuk diperkembangkan, dalam hubungan penyelesaian permasalahan pinjaman negara-negara berkembang ini telah dikemukakan oleh Lessard dan Williamson dalam salah satu studi mereka. Karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan operasi perbankan internasional di masa depan, kiranya perlu disebutkan di sini. Menurut kedua ahli ini berbagai instrumen finansial yang dapat diperkembangkan dalam usaha untuk memperbaiki struktur aliran dana internasional meliputi: investasi oleh lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, asuransi dan *mutual funds*, dalam saham-saham yang diperdagangkan pada pasar modal; investasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam proyek-proyek dengan cara yang bersifat *quasi-equity*, seperti perjanjian bagi hasil atau bagi keuntungan; pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lain untuk proyek yang berorientasi ekspor; penggunaan pasar option untuk membatasi beban suku bunga dalam pinjaman yang suku bunganya diambangkan; berbagai bentuk surat pinjaman jangka panjang (*bonds*) yang nilainya dikaitkan kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman, dan sebagainya.¹⁴

Dalam pada itu, *restructuring* pinjaman lewat cara yang sampai sekarang dikenal terus berjalan, baik untuk jenis pinjaman resmi maupun perbankan komersial. *Restructuring* pinjaman biasanya dilaksanakan lewat apa yang dikenal sebagai *Paris Club* untuk yang resmi dan *London Club* untuk yang berasal dari bank komersial. Pengaturan *restructuring* pinjaman lewat *Paris Club* dimulai pertengahan dasawarsa lima puluhan, biasanya untuk mengembalikkan pembiayaan proyek dan perdagangan agar menjadi normal, dengan melakukan penjadwalan kembali angsuran pinjaman maupun suku bunga. Sebagai persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa negara yang bersangkutan mengikuti program penyesuaian yang diusulkan IMF. *Restructuring* pinjaman lewat *London Club* dilakukan biasanya dengan pengaturan

¹⁴Donald R. Lessard dan John Williamson, *Financial Intermediation Beyond The Debt Crisis* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, September 1985).

mengenai restrukturisasi pembayaran kembali pinjaman termasuk perpanjangan jangka waktu pengembalian, serta penyediaan fasilitas kredit jangka pendek.¹⁵

CATATAN PENUTUP

Sebagai dikemukakan pada pendahuluan tulisan ini, pembahasan ini bersifat tentative karena mengamati perkembangan yang sedang berjalan dan dengan demikian belum selalu jelas tampak arahnya. Pada dasarnya perkembangan yang terjadi dalam hubungan ekonomi, perdagangan dan moneter antar bangsa-bangsa di dunia menunjukkan terjadinya berbagai gejolak yang telah berlangsung sejak permulaan dasawarsa tujuh puluhan. Gejolak tersebut di satu pihak menimbulkan gejala tidak pastinya kegiatan usaha, dan di lain pihak makin menguatnya hubungan interdependensi dalam ekonomi, perdagangan dan moneter internasional. Pada waktu yang sama dalam arti proses kegiatan ekonomi sendiri terjadi perkembangan di mana seolah-olah ekonomi moneter telah mempunyai perkembangan tersendiri, lepas dari ekonomi produksi.

Perkembangan-perkembangan tersebut dengan kecenderungan dari berbagai indikator makro yang tampak dewasa ini dan di masa depan, serta berbagai langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi produksi, perdagangan dan moneter (pemerintah dan swasta), jelas akan mempengaruhi perkembangan kegiatan perbankan, baik yang ruang lingkup usahanya nasional maupun internasional. Demikian pula semua ini akan mempengaruhi pendekatan atau teori ekonomi, perdagangan dan moneter, terutama yang berkaitan dengan aplikasinya, baik sebagai pegangan dalam membuat penilaian keadaan yang bersifat diskriptif analitis, maupun terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan.

Prospek ekonomi, perdagangan dan moneter dunia yang masih ditandai oleh lemahnya kegiatan dan ketidakpastian usaha mempengaruhi kegiatan perbankan, baik nasional maupun internasional. Dalam hal ini berbagai instrumen maupun teknik baru dalam perbankan sebagai upaya penyesuaian pada perubahan-perubahan yang terjadi telah dan sedang berkembang. Dalam hubungan ini berbagai instrumen baru yang sedang maupun mempunyai potensi untuk berkembang dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pinjaman negara-negara berkembang, seperti *debt-equity swap*, *cofinancing* ser-

¹⁵Bank Dunia, *World Development Report 1985*, hal. 27.

ta operasi perbankan yang mencakup berbagai kegiatan lembaga keuangan bukan bank tampak makin meningkat peranannya.

Semua ini menuntut pengamatan dan analisa yang lebih jeli mengenai perkembangan-perkembangan tersebut agar dunia perbankan nasional dapat menyesuaikan kegiatannya sehingga dapat menghindarkan dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang timbul. Suatu hal yang sangat jelas dalam kaitan ini adalah bahwa dinamisme permasalahan moneter-perbankan dunia sangat tinggi. Untuk itu dituntut penyesuaian yang tepat dan cepat dari dunia perbankan. Selain diperlukan peningkatan kemampuan analisis, teknis dan permodalan dari dunia perbankan, diperlukan pula sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk terlaksananya penyesuaian tersebut, termasuk kebijaksanaan moneter-perbankan yang lebih bersifat mendorong dan menunjang daripada mengatur, membatasi atau melarang.

Lingkungan Ekonomi Internasional bagi Indonesia dalam Tahun 1990-an

Hadi SOESASTRO

Indonesia kini sudah memasuki era orientasi ekspor dalam pembangunan ekonomi dan industrinya. Usaha-usaha yang dilakukan sejak tahun 1982 untuk mengalih dari orientasi ke pasar dalam negeri kepada orientasi ekspor tampaknya mulai memperlihatkan hasil. Dalam tahun anggaran 1987/1988, ekspor non-migas telah mencapai US\$9,4 milyar, atau 51,4% dari seluruh nilai ekspor.

Dengan pengalihan ini Indonesia perlu mengikuti secara seksama dan terus-menerus perkembangan ekonomi internasional yang akan mempunyai pengaruh yang semakin besar atas perkembangan ekonominya. Prospek perkembangan ekonomi di beberapa negara/kawasan yang merupakan pasar ekspor Indonesia, seperti Jepang, Amerika Serikat, Asia Timur dan ASEAN serta Eropa Barat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia secara keseluruhan. Ini disebabkan karena daerah pemasaran itu umumnya merupakan ekonomi-ekonomi yang sangat terbuka. Namun begitu perkembangan ekonomi dunia, sesedikitnya selama lima tahun mendatang, sebenarnya juga sangat dipengaruhi terutama oleh perkembangan dan kebijaksanaan ekonomi di Amerika Serikat. Yang terakhir ini masih sangat tidak menentu, sehingga ekonomi dunia juga penuh dengan ketidakpastian.

Walaupun faktor Amerika Serikat ini besar pengaruhnya, masih terdapat berbagai faktor pengaruh lain yang tidak kecil artinya dan yang semakin membuat rumit usaha memperkirakan perkembangan ekonomi dunia. Faktor-faktor internasional ini sebenarnya saling kait-mengait. Perkembangan nilai mata uang dollar, misalnya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan neraca perdagangan Amerika Serikat dan harmonisasi kebijaksanaan moneter antara

beberapa negara penting (kelompok G-5). Neraca perdagangan Amerika Serikat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintahnya maupun oleh peningkatan produktivitas dalam industrinya dan oleh kebijaksanaan beberapa negara mitra perdagangannya yang utama, seperti Jepang dan Eropa Barat. Selain itu, perkembangan harga minyak dan pemecahan masalah hutang luar negeri negara-negara berkembang, maupun keberhasilan menegakkan kembali sistem perdagangan internasional (GATT), merupakan faktor-faktor yang penting.

Pengaruh faktor-faktor ini akan tampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan masing-masing negara. Pada akhirnya tingkat pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikator utama aktivitas ekonomi di negara bersangkutan, yang pada gilirannya menentukan kebutuhan ekonomi tersebut akan berbagai faktor produksi.

Tabel 1

NERACA TRANSAKSI BERJALAN DI SEJUMLAH NEGARA 1981, 1986 DAN 1988
(Dalam Milyar US\$)

Negara	1981	1986	1988 ^p
Indonesia	-0,5	-4,1	-0,7
Malaysia	-2,5	-0,3	+2,0
Filipina	-2,1	+1,0	...
Singapura	-1,4	+0,5	...
Muangthai	-2,6	+0,2	-0,7
Korea Selatan	-4,6	+4,6	+6,0
Taiwan	+0,6	+16,2	+20,6
Cina	+5,8	-7,0	...
Jepang	+4,8	+85,8	+72,0
Amerika Serikat	+6,9	-141,5	-140,0
Jerman Barat	-5,0	+37,7	+47,0
Perancis	-4,8	+3,4	-0,8
Italia	-9,5	+4,8	-1,3

Catatan: - berarti defisit
p = perkiraan

Sumber: IMF, *International Financial Statistics*; OECD, *Economic Outlook*; dan perkiraan resmi beberapa negara.

Salah satu titik tolak dalam meninjau prospek perkembangan ekonomi di beberapa negara adalah posisi neraca pembayarannya, khususnya neraca transaksi berjalan (*current account*). Tabel 1 menunjukkan perkembangan neraca transaksi berjalan di sejumlah negara, selama periode 1981-1986 dan prospek untuk 1988.

Gambaran perkembangan umum selama 1981-1986 di atas segera menunjukkan masalah yang dihadapi ekonomi dunia dewasa ini, yaitu ketidakseimbangan eksternal yang sangat besar, yang melibatkan Amerika Serikat di satu pihak dan Jepang serta Jerman Barat (dan kini juga Taiwan) di pihak lain. Perkembangan nilai tukar berbagai mata uang (*currency re-alignment*) belakangan ini merupakan pencerminan dari keadaan ketidakseimbangan itu. Masalahnya kini adalah bahwa walaupun perubahan nilai tukar tersebut cukup drastis, efeknya dalam mengkoreksi ketidakseimbangan eksternal itu masih jauh dari cukup dan bahkan dianggap terlalu lambat. Di sinilah letak sumber utama ketidakpastian bagi ekonomi dunia.

Di antara negara-negara ASEAN terlihat suatu pola yang sama, yaitu perbaikan posisi neraca transaksi berjalan. Kebijakan ini diharapkan membantu terciptanya stabilitas moneter tetapi dibayar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun (Tabel 2). Walaupun demikian sejak tahun 1987 mulai terlihat tanda-tanda kebangkitan ekonomi.

Negara-negara Asia Timur, seperti Korea Selatan dan Taiwan, umumnya berhasil memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan mereka sementara tingkat pertumbuhan ekonomi mereka tetap tinggi. Dalam tahun 1988 ini bahkan diambil kebijakan untuk menurunkan tingkat pertumbuhan supaya inflasi dapat tetap terkendali.

Cina mengalami perburukan neraca transaksi berjalan sehingga juga mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat pertumbuhannya, dari sekitar 9-10% per tahun sejak tahun 1980 menjadi sekitar 7-7,5% pada tahun 1988 ini. Jepang, dengan surplus neraca transaksi berjalan yang sangat besar itu, walaupun terpukul oleh apresiasi mata uangnya, diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun 1988 ini. Perlu dicatat bahwa kini ekonomi Jepang sedang mengalami perubahan struktural yang sangat besar dan yang mempunyai implikasi yang luas.

Tingkat pertumbuhan di Amerika Serikat pada tahun 1988 ini juga diperkirakan cukup tinggi. Tetapi ini mungkin merupakan gejala tahun pemilu (*election year phenomenon*), dan diperkirakan akan menurun, mungkin malahan mengalami resesi, pada tahun 1989.

Tabel 2

PERTUMBUHAN EKONOMI DI SEJUMLAH NEGARA-NEGARA^a
1980-1985, 1986-1988
(Dalam % Per Tahun)

Negara	1980-1985 rata-rata	1986	1987	1988 ^p
Indonesia	4,5	3,2	3,7	3,5-4,0
Malaysia	5,5	1,0	4,7	2-4
Filipina	-0,5	0,1	5,1	5,5-6,5
Singapura	6,5	1,9	8,8	5-7
Muangthai	5,1	4,2	6,6	6,8-7
Korea Selatan	7,9	12,3	12,2	8,0
Taiwan	7,0	11,6	11,2	7,5
Cina	9,8	9,1	9,4	7-7,5
Jepang	3,8	2,8	4,2	4,25
Amerika Serikat	2,5	2,9	2,9	2,75
Jerman Barat	1,3	2,4 ^b	1,7 ^b	2,25 ^b
Perancis	1,1	2,0	1,3	2,0
Italia	0,8	2,7	3,0	2,5

Catatan: a = atas dasar PDB (produk domestik bruto)

b = atas dasar PNB (produk nasional bruto)

Sumber: World Bank, *World Development Report 1987*; OECD, *Economic Outlook*, dan perkiraan resmi beberapa negara.

Negara-negara Eropa Barat, khususnya Jerman Barat, Perancis dan Italia, tidak diperkirakan mengalami gejolak dalam ekonominya yang akan tetap berada pada jalur pertumbuhan rendah, sekitar 2% per tahun, selama sisa dari dasawarsa 1980-an ini. Jerman Barat tetap masih akan mengalami surplus besar dalam neraca transaksi berjalannya tetapi tetap menjalankan kebijaksanaan fiskal yang tidak ekspansif. Sementara itu, Perancis dan Italia diperkirakan akan kembali mengalami defisit dalam neraca transaksi berjalan mereka.

Pembahasan di atas tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar proyeksi perkembangan ekonomi untuk jangka yang lebih panjang. Bahkan studi ekonometrik yang dilakukan untuk membuat proyeksi perlu dinilai secara kritis.

Selain karena faktor-faktor ketidakpastian di atas, beberapa negara penting sedang berada dalam proses perubahan struktural yang berarti.

Tabel 3 merangkumkan suatu proyeksi jangka panjang yang dapat memberi *indikasi* mengenai prospek perkembangan ekonomi dunia dan di sejumlah negara, tergantung pada berbagai asumsi mengenai, antara lain, harga minyak, harmonisasi kebijaksanaan moneter di antara negara-negara terpenting; kebijaksanaan fiskal di Amerika Serikat, Jepang dan Jerman Barat, ekspansi (dan proteksionisme) perdagangan internasional; hutang-hutang luar negeri dan arus modal baru ke negara-negara berkembang.

Tabel 3

PROYEKSI PERKEMBANGAN EKONOMI DI SEJUMLAH NEGARA,
1990-2000 -- MENURUT MODEL ONISHI
(Dalam % Pertumbuhan Per Tahun Rata-rata)

Negara	Baseline	Optimis	Pesimis
Indonesia	4,5	5,5	3,9
Malaysia	5,3	6,2	4,2
Filipina	5,1	6,4	4,5
Singapura	5,1	6,3	4,4
Muangthai	6,3	7,9	5,9
Korea Selatan	6,4	7,4	5,1
Taiwan	6,9	7,3	5,6
Cina	5,7	6,2	5,5
Jepang	3,8	4,9	1,0
Amerika Serikat	2,6	2,7	0,7
Jerman Barat	2,0	2,3	1,7
Perancis	2,9	3,6	2,8
Italia	3,1	3,2	2,9

Sumber: Institute of Applied Economic Research, Soka University, Tokyo (tidak dipublikasi).

Skenario yang disebut *baseline* mengandaikan tidak ada perubahan drastis, dan berbagai usaha yang sudah dimulai dewasa ini, khususnya mengatasi ketidakseimbangan eksternal, terus dilanjutkan. Dua skenario yang lain, yang pesimistis dan yang optimistis, menunjukkan besarnya perbedaan yang perlu diperhitungkan.

Perbedaan dua skenario terakhir ini sangat menyolok bagi Jepang dan Amerika Serikat, tetapi tidak sedemikian besarnya bagi negara-negara lainnya. Kesimpulan ini mungkin dapat dipersoalkan. Untuk Eropa Barat, hal ini mungkin benar karena dengan dihapusannya samasekali semua halangan lalu lintas kegiatan ekonomi mulai tahun 1992 antar anggota MEE, Eropa Barat mungkin akan semakin proteksionis serta menutup diri dari pengaruh di luar MEE, dan mengandalkan diri pada MEE saja. Namun untuk ASEAN dan Asia Timur pengaruh memburuknya ekonomi Jepang dan Amerika Serikat pasti akan lebih terasa.

Sebagai kesimpulan umum dapat dikatakan bahwa jika *baseline* skenario lebih mendekati kenyataan, prospek perkembangan ekonomi di sejumlah negara yang dibahas di atas tidaklah terlalu mengecewakan. Di bawah ini akan dibahas secara lebih rinci perkembangan di masing-masing negara, termasuk proyeksi ekonomi hingga tahun 1995, dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi arah perkembangan tersebut.

AMERIKA SERIKAT

Seperti telah dinyatakan di atas, arah perkembangan ekonomi Amerika Serikat sangat menentukan arah perkembangan ekonomi dunia, walaupun ekonomi Amerika Serikat itu sendiri dipengaruhi oleh ekonomi dunia. Selain karena ekonomi Amerika Serikat masih tetap merupakan ekonomi terbesar di dunia, besarnya pengaruh di atas juga disebabkan peningkatan kesalingtergantungan (interdependensi) ekonomi di dunia umumnya. Amerika Serikat juga telah menjadi ekonomi yang semakin terbuka: pada tahun 1960 impor Amerika Serikat baru merupakan 6% dari PNB (produk nasional bruto), tetapi pada tahun 1986 telah meningkat mencapai di atas 14% dari PNB-nya.

Peningkatan impor oleh Amerika Serikat yang lebih cepat dari peningkatan eksportnya menyebabkan membesarnya defisit perdagangannya, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, defisit perdagangan Amerika Serikat yang mencapai sekitar US\$140 milyar pada tahun 1986 hanya merupakan 4% dari PNB-nya. Namun demikian dampak internasionalnya begitu besar dan bahkan telah menyebabkan instabilitas dunia keuangan, yang antara lain mengakibatkan *crash of October 1987* itu.

Ketidakseimbangan internasional itu membawa dampak luas bagi ekonomi Amerika Serikat sendiri dan bagi ekonomi dunia, baik di sektor riil (produksi barang) maupun di sektor finansial. Di sektor riil, ketidakseimbangan yang

membengkak itu berarti penggunaan sumber-sumber ekonomi yang jauh dari optimal, dan karenanya sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Bagi sektor finansial, peningkatan ketidakseimbangan itu berarti beban yang terus meningkat bagi pasar uang dan modal internasional, dan juga menimbulkan masalah kemampuan pembiayaan yang terus-menerus. Perkembangan ini jelas menimbulkan tekanan atas nilai tukar internasional dollar.

Merosotnya nilai tukar (depresiasi) dollar, sebesar lebih dari 50% terhadap Yen dan beberapa mata uang lain sejak September 1985 (*Plaza Accord*) hingga kini, diharapkan akan mengoreksi ketidakseimbangan itu. Masalahnya adalah berapa cepat koreksi itu bisa terjadi. Sebenarnya *crash of October* itu terjadi karena pasar merasa bahwa koreksi yang diharapkan ternyata berjalan sangat -- dan terlampau -- lambat.

Berbagai kalangan berpendapat bahwa koreksi yang diharapkan tidak dapat diharapkan terjadi hanya melalui depresiasi dollar sebab sumber dari ketidakseimbangan itu bersifat struktural, yaitu seperti yang dicerminkan oleh meningkatnya kesenjangan antara tabungan dan investasi -- yang dikenal sebagai *savings - investment gap (S-I gap)* itu. Tabungan nasional merupakan dana yang secara potensial tersedia bagi negara bersangkutan untuk membiayai investasi domestik dan investasi luar negeri (*netto*). Tabel 4 menunjukkan bahwa tabungan nasional Amerika Serikat, sebagai persentase dari PNB, terus-menerus merosot sejak akhir dasawarsa 1970-an. Penyebab utama adalah memburuknya tabungan pemerintah, yang bahkan mencapai -3,5% PNB, seperti tercermin dalam defisit anggaran Pemerintah Amerika Serikat.

Tabel 4

POSISI TABUNGAN DAN INVESTASI DI AMERIKA SERIKAT
(Sebagai % dari PNB)

Tahun	Tabungan Nasional		Total Tabungan = Total Investasi	Investasi Nasional	
	Swasta	Pemerintah		Dalam Negeri	Luar Negeri (<i>netto</i>)
1979	17,8	0,5	18,3	18,1	0,1
1986	16,1	-3,5	12,6	15,8	-3,3

Sumber: US Department of Commerce.

Defisit ganda (*twin deficit*), yaitu defisit perdagangan dan defisit anggaran pemerintah, merupakan persoalan utama ekonomi Amerika Serikat pada dasawarsa 1980-an ini. Prospek ekonomi Amerika Serikat selama dasawarsa 1990-an akan tergantung pada cara mengatasi dan menyelesaikan defisit ganda tersebut.

Defisit anggaran yang melonjak dan berlangsung secara terus-menerus berakibat meningkatnya suku bunga, yang pada gilirannya memperkuat nilai dollar karena meningkatnya pemasukan modal ke Amerika Serikat (yaitu investasi dalam *dollar-denominated assets*). Meningkatnya nilai dollar berakibat merosotnya ekspor dan menaikinya impor sehingga terjadi kesenjangan perdagangan. Lambat-laun daya tarik investasi dalam *dollar-denominated assets* itu mulai menurun dengan akibat melemahnya nilai dollar. Ini terjadi pada permulaan tahun 1985 dan diharapkan mulai dapat membalikkan proses ke arah perbaikan neraca perdagangan. Ternyata proses ini dianggap berjalan terlampau lambat, dan menurunnya kepercayaan pasar telah mengakibatkan *crash* pada bulan Oktober 1987 yang lalu.

Di pihak lain, defisit anggaran pemerintah ternyata juga sulit dikoreksi sehingga Kongres Amerika telah mengesahkan Undang-undang Gramm-Rudman-Hollings (GRH) untuk memaksakan pemotongan defisit itu. Defisit maksimal yang ditetapkan adalah US\$108 milyar untuk tahun anggaran 1988 dan menurun menjadi US\$36 milyar pada tahun 1990. Dalam budget 1988 ini, Pemerintah Amerika memperkirakan defisit masih mencapai US\$123 milyar pada tahun 1988 dan US\$80 milyar pada tahun 1990. IMF (dana moneter internasional) memperkirakan defisit anggaran itu akan lebih tinggi, yaitu US\$173 milyar pada tahun 1988 dan bahkan meningkat menjadi US\$179 milyar pada tahun 1990.¹ Umumnya dilihat (oleh pasar keuangan internasional) bahwa UU-GRH ini tidak akan memadai. Oleh karena itu ada anggapan kuat bahwa nilai dollar masih terus akan (harus) merosot.

Masalahnya adalah seberapa cepat dan seberapa jauh nilai dollar itu akan menurun. Berbagai proyeksi perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi dunia didasarkan atas skenario berbeda mengenai proses lebih lanjut menurunnya nilai dollar tersebut. Seperti telah disebutkan di bagian terdahulu, keberhasilan harmonisasi kebijaksanaan di antara ekonomi-ekonomi utama sangat mempengaruhi proses tersebut.

Ada kemungkinan nilai dollar harus mengalami penurunan sebesar 20% lagi agar tercapai keseimbangan neraca perdagangan. Tetapi jika penurunan

¹Lihat IMF, *World Economic Outlook* (Oktober 1987).

itu terjadi secara terlalu tiba-tiba atau terlalu cepat, negara-negara lain akan mengalami penurunan cepat dalam ekspor mereka sehingga mengakibatkan resesi ekonomi yang pada gilirannya akan menurunkan kemampuan mereka untuk membeli ekspor Amerika walaupun harganya menurun di negara-negara tersebut. Oleh karenanya sangat penting bahwa proses menurunnya nilai dollar secara teratur dan tetap itu didampingi oleh kebijaksanaan fiskal dan moneter untuk menstimulasi ekonomi negara-negara mitra perdagangan utama Amerika Serikat.

1988-1990

Dengan menggunakan *Michigan Quarterly Econometric Model of the U.S. Economy*, dan mengandaikan skenario di atas, yaitu jika nilai dollar merosot sebesar sekitar 11% selama tahun 1988, 5,5% selama tahun 1989, dan 3% selama tahun 1990, maka ekonomi Amerika Serikat dalam tiga tahun mendatang ini rata-rata dapat tumbuh sebesar 2,7% per tahun.² Di bidang perdagangan diperkirakan bahwa defisit Amerika Serikat pada akhir tahun 1990 sudah dapat menurun menjadi sekitar 50% dari yang dialami pada permulaan tahun 1988. Selain itu, dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi dalam negerinya, tabungan nasional pada tahun 1990 akan meningkat menjadi 13,6% dari PNB, terdiri dari tabungan swasta sebesar 14,8% dan tabungan pemerintah sebesar 1,2% dari PNB (bandingkan dengan Tabel 4). Di sisi investasi, investasi dalam negeri akan berkisar pada 15,4% dari PNB pada tahun 1990, sedangkan investasi luar negeri (netto) akan berkisar pada -1,8% PNB, dibandingkan dengan -3,3% PNB pada tahun 1986 (Tabel 4). Skenario ini menunjukkan bagaimana dapat diciptakan dasar-dasar bagi perbaikan ekonomi ke arah tercapainya keseimbangan (tanpa resesi), tetapi bahwa kemajuan itu terjadi secara lambat.

Implikasi dari perkembangan di atas terhadap ekonomi-ekonomi lainnya perlu disoroti tersendiri. Penyesuaian ekonomi Amerika Serikat yang digambarkan di atas dilakukan melalui peningkatan ekspor dan bukan melalui penurunan impor. Penyesuaian ini hanya bisa berlangsung jika pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup (sekitar 3%) dapat dipertahankan. Secara lebih khusus, skenario ini akan tergantung pada stimulasi ekonomi di Jepang dan di Jerman Barat.

Skenario alternatif yang dapat dibayangkan adalah di mana depresiasi dollar terjadi jauh lebih cepat daripada dalam skenario sebelumnya. Dalam

²Lihat Saul H. Hymans dan Lawrence B. Krause, "The Outlook for the U.S. Economy, 1988-1990," suatu makalah workshop di Tokyo, Januari 1988.

skenario ini tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menjadi rata-rata 3% per tahun selama periode 1988-1990, dan neraca perdagangannya akan semakin membaik dengan perkiraan defisit sekitar US\$50 milyar pada tahun 1990. Tetapi skenario ini berarti tekanan penyesuaian yang lebih besar bagi negara-negara lain karena daya saing Amerika Serikat yang sangat meningkat. Negara-negara yang mengalami surplus perdagangan, seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, tidak dapat lagi menoleh kepada pasar Amerika Serikat untuk merangsang ekonomi mereka, tetapi harus mendasarkannya pada peningkatan permintaan (pasar) dalam negeri.

1990-1995

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan segera dapat mengakhiri defisit ganda yang akan merupakan masalah utama ekonomi Amerika Serikat selama dasawarsa 1980-an. Selama neraca perdagangan dan transaksi berjalan (*current account*) Amerika Serikat masih berada dalam defisit, selama itu pula defisit itu perlu dibiayai dengan pinjaman modal dari luar. Kebutuhan pembiayaan yang terus-menerus ini dan efek kumulatifnya di masa depan mengharuskan Amerika Serikat berusaha menyelesaikan masalah ini pada paruh pertama dasawarsa 1990-an, atau paling lambat pada tahun 1995.

Posisi hutang luar negeri (*netto*) Amerika Serikat pada akhir tahun 1987 telah mencapai US\$425 milyar, dan diperkirakan meningkat menjadi US\$540 milyar pada akhir tahun 1988, dan membuat Amerika Serikat sebagai negara penghutang (*debtor*) yang terbesar di dunia. Di pihak lain, Jepang telah menjadi negara pemberi hutang (*creditor*) terbesar di dunia dengan posisi asset luar negeri (*netto*) yang akan mencapai US\$400 milyar pada akhir tahun 1988. Kedudukan ini disusul oleh negara surplus lainnya, yaitu Jerman Barat dan sejak beberapa tahun terakhir ini Taiwan, dan belakangan juga Korea Selatan.

Walaupun hingga saat ini Amerika Serikat tidak mengalami kesulitan besar untuk membiayai defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayarannya, proses ini dianggap tidak dapat berlanjut di masa mendatang. Selain karena beban begitu besar yang mungkin tidak dapat ditangani oleh pasar finansial internasional, tekanan politis di dalam negeri Amerika Serikat sendiri tidak akan mentolerir posisi hutang yang terlalu tinggi. Tabel 5 memperlihatkan beberapa skenario dan posisi hutang luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1995, yang dapat berkisar dari US\$900 milyar sampai US\$2,5 trilyun,

suatu jumlah yang sangat besar -- yaitu kira-kira 35% dari PNB Amerika Serikat saat itu.

Jika hutang luar negeri Amerika Serikat tidak dibatasi, artinya defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran tetap tinggi, pada akhir tahun 1995 posisi hutang luar negeri akan melampaui US\$2,5 trilyun. Besarnya defisit transaksi berjalan pada tahun 1995 akan mencapai US\$435 milyar atau 6% dari PNB; ini berarti bahwa keseimbangan eksternalnya semakin memburuk dibandingkan dengan keadaan dewasa ini di mana defisit transaksi berjalan berkisar pada 4% dari PNB. Sementara itu, bunga hutang yang harus dibayar mencapai US\$290 milyar atau 60% dari defisit transaksi berjalan tersebut. Skenario 1 ini hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi karena ekonomi Amerika Serikat tidak akan dibiarkan berkembang ke arah ini.

Tabel 5

POSISI HUTANG LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TAHUN 1995

	Posisi hutang netto akhir 1995		Posisi neraca transaksi berjalan 1995	Pembayaran bunga hutang luar negeri 1995	Tingkat pertumbuhan PNB riil sp 1995 rata-rata % per tahun	
	US\$ milyar	% dari PNB	US\$ milyar	US\$ milyar	AS	Jepang + Eropa
<i>Skenario dollar tetap</i>						
1. Tanpa pembatasan hutang	2.510	35	-435	290	2,4	2,7
2. Hutang tidak bertambah setelah 1995	1.020	21	0	80	0,7	2,7
<i>Skenario dollar menu-run</i>						
3. Rasio hutang-PNB distabilkan	1.215	16	- 75	105	2,4	3,2
4. Defisit transaksi berjalan hilang pada 1995	900	13	0	65	2,0	3,3

Sumber: Morgan Guaranty, *World Financial Markets* (November/Desember 1987).

Skenario 2 menggambarkan implikasi dari usaha menciptakan keseimbangan transaksi berjalan dalam neraca pembayaran pada tahun 1995 sementara nilai dollar dibiarkan *overvalued* dan tidak disesuaikan. Suasana resesi di Amerika Serikat ini jelas tidak menguntungkan dunia.

Skenario 3 yang lebih optimis ini tidak memaksakan eliminasi defisit tersebut pada tahun 1995, tetapi bertujuan menstabilkan rasio hutang-PNB pada sekitar 15% pada paruh pertama dasawarsa 1990-an, dari kira-kira 10% sekarang ini. Ini berarti bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengejar tingkat pertumbuhan di atas 2,5%, yang juga berarti peningkatan permintaan dalam negeri sebesar 1,8% rata-rata per tahun atau tingkat hidup (*living standard*) yang tidak berubah. Hingga tahun 1990 nilai dollar harus mengalami depresiasi sekitar 22%, tetapi tetap terbuka kemungkinan depresiasi lebih lanjut setelah tahun 1990. Pada akhir tahun 1995, posisi hutang Amerika Serikat akan mencapai sedikit di atas US\$1,2 trilyun.

Ada kemungkinan posisi hutang netto di atas US\$1 trilyun membawa pengaruh psikologis yang kurang menguntungkan. Skenario 4 menunjukkan implikasi dari kendala yang lebih besar bagi pembiayaan defisit, sehingga pada akhir tahun 1995 posisi hutang luar negeri Amerika Serikat tidak melampaui US\$1 trilyun. Pada tahun 1995 transaksi berjalan dalam neraca pembayaran diperkirakan sudah mencapai keseimbangan, tetapi berbeda dengan skenario 2, di sini diandaikan bahwa Jepang dan negara-negara Eropa berhasil meningkatkan pertumbuhannya, terutama melalui peningkatan permintaan dalam negeri mereka. Di pihak Amerika Serikat sendiri akan dialami pertumbuhan yang lebih rendah, bahkan permintaan dalam negeri hanya tumbuh dengan 1,5% per tahun.

Pembahasan di atas menunjukkan dua faktor utama dalam memperkirakan perkembangan ekonomi Amerika Serikat sampai sekitar tahun 1995. Pertama, dari berbagai segi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sendiri tampaknya tingkat pertumbuhan sebesar sekitar 2,5% rata-rata per tahun adalah optimal. Proyeksi jangka panjang (1990-2000) menurut model Onishi dari Soka University, Tokyo, yang dirangkumkan terdahulu (lihat Tabel 3), juga memberikan tingkat pertumbuhan sebesar 2,6% sebagai *baseline*.³ Kedua, bahwa dengan pertumbuhan sebesar 2,5-2,7% itu posisi eksternal Amerika Serikat dapat diperbaiki *hanya* jika pertumbuhan di negara-negara OECD (industri maju) lainnya, terutama Jepang dan Jerman Barat, dapat meningkat

³Proyeksi berdasarkan model Onishi menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tumbuh dengan rata-rata 2,5% per tahun dalam periode 1990-1995 dan meningkat menjadi rata-rata 2,7% per tahun dalam periode 1995-2000.

mencapai di atas 3% rata-rata per tahun, terutama melalui peningkatan permintaan dalam negeri mereka, dan bukan melalui ekspor.

Oleh karenanya, sebelum dibahas perkembangan di masing-masing negara OECD lainnya itu, khususnya yang disoroti dalam tinjauan ini, perlu diteliti dua faktor yang sangat mempengaruhi pola hubungan ekonomi antara ekonomi-ekonomi utama tersebut. Faktor pertama adalah kebijaksanaan makro-ekonomi, dan faktor kedua adalah perubahan struktur ekonomi di masing-masing negara tersebut.

KEBIJAKSANAAN MAKRO-EKONOMI

Harmonisasi kebijaksanaan makro-ekonomi antara negara-negara kelompok G-5 dianggap sebagai faktor yang ikut menentukan perkembangan ekonomi dunia dalam jangka pendek dan menengah. Seperti telah dibahas di atas, usaha-usaha Amerika Serikat untuk mengatasi defisit ganda dalam ekonominya perlu dilakukan bersamaan dengan usaha mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagangannya yang utama. Ini memerlukan konsultasi dan harmonisasi kebijaksanaan makro-ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang diusahakan bersama itu sekaligus melibatkan pengalihan motor pertumbuhan: di Amerika Serikat dari permintaan dalam negeri ke ekspor, dan di berbagai negara lain, seperti Jepang dan Jerman Barat, dari orientasi ekspor ke permintaan dalam negeri. Tabel 6 menunjukkan perkembangan motor pertumbuhan tersebut di sejumlah negara maju selama periode 1984-1988 dan proyeksinya untuk periode 1988-1995.

Seperti terlihat pada Tabel 6 pengalihan motor pertumbuhan itu sudah mulai terjadi, terutama sejak tahun 1986 dan 1987. Tantangan Amerika Serikat adalah menurunkan pertumbuhan permintaan dalam negeri sebesar kira-kira 50%, dari sekitar 3,5% PNB pada tahun 1985-1986 menjadi sekitar 1,8% selama paruh pertama dasawarsa 1990-an. Jepang diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan permintaan dalam negerinya sebesar 4% sampai 5% per tahun sampai tahun 1995. Jerman Barat juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan dalam negerinya sebesar sesedikitnya 3,5% per tahun. Dalam hubungan ini masih dihadapi kesulitan yang besar untuk menerapkan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang lebih longgar.

Tabel 6

PERTUMBUHAN EKONOMI, ORIENTASI EKSPOR DAN PERMINTAAN DALAM NEGERI
(% Perubahan dari Tahun Sebelumnya)

	1984	1985	1986	1987	1988 ^p	1988-1995 ^{pr}
1. Amerika Serikat						
- Permintaan D.N.	8,3	3,4	3,5	2,2	2,1	1,8
- Ekspor (netto)	-1,9	-0,7	-1,1	0,4	0,8	0,8
- PNB	6,4	2,7	2,5	2,6	2,9	2,6
2. Jepang						
- Permintaan D.N.	3,8	3,8	4,0	5,0	5,1	} OECD lainnya:
- Ekspor (netto)	1,3	1,0	-1,4	-0,8	-0,9	
- PNB	5,1	4,7	2,5	4,2	4,2	
3. Jerman Barat						
- Permintaan D.N.	1,9	1,5	3,7	2,1	2,5	
- Ekspor (netto)	1,1	1,0	-1,1	-0,6	-0,2	
- PNB	3,0	2,5	2,4	1,5	2,2	
4. Perancis						
- Permintaan D.N.	0,7	2,1	3,8	2,4	2,2	
- Ekspor (netto)	0,9	-0,7	-1,8	-1,0	-0,4	
- PNB	1,5	1,4	2,0	1,4	1,8	
5. Italia						
- Permintaan D.N.	3,3	2,4	3,2	4,1	2,6	- Permintaan D.N. : 3
- Ekspor (netto)	-0,3	0,1	-0,4	-1,6	-0,3	- Ekspor (netto) : -
- PNB	2,8	2,3	2,7	2,5	2,3	- PNB : 3

p = perkiraan; pr = proyeksi
Sumber: OECD, *Economic Outlook* (berbagai penerbitan).

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Faktor kedua dalam perkembangan ekonomi negara-negara tersebut di atas yang juga akan berpengaruh atas hubungan antara ekonomi-ekonomi tersebut adalah perubahan struktur ekonomi mereka masing-masing. Perubahan struktur ekonomi ini juga akan mempengaruhi pola penggunaan sumber-sumber alam.

Tabel 7 menunjukkan perubahan struktur ekonomi, seperti dinyatakan dalam sumbangan masing-masing sektor produksi dalam PDB (produk domestik bruto), di kelima negara industri maju tersebut dalam periode 1965-1985. Walaupun tidak tersedia proyeksi mengenai perkembangan struktur ekonomi sampai tahun 1995, arah perkembangannya dapat diperkirakan.

Tabel 7

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DI SEJUMLAH NEGARA INDUSTRI, 1965-1985
(Sebagai % dari PDB)

	Pertanian		Industri		(Manufaktur)		Jasa-jasa	
	1965	1985	1965	1985	1965	1985	1965	1985
Amerika Serikat	3	2	38	31	29	20	59	67
Jepang	9	3	43	41	32	30	48	56
Jerman Barat	4	2	53	40	40	31	43	58
Perancis	8	4	39	34	29	25	52	62
Italia	11	5	41	39	48	56

Sumber: World Bank, *World Development Report 1987*.

Selama periode 1965-1985 yang lalu telah terjadi perubahan yang secara umum dialami di semua negara industri maju, yaitu menurunnya peranan industri -- dan menurunnya lebih lanjut peranan sektor pertanian -- serta meningkatnya sektor jasa-jasa. Perkembangan ini dianggap mencerminkan proses perkembangan masyarakat, dari masyarakat industri ke masyarakat pasca-industri (*post-industrial society*) atau masyarakat jasa-jasa.

Pada tahun 1985, sektor jasa-jasa di Amerika Serikat telah mencapai sekitar dua pertiga PDB-nya, sedangkan saham sektor manufakturnya telah merosot menjadi hanya 20% dari PDB. Timbul kekhawatiran terjadinya *de-industrialisasi* yang terlampau cepat yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Tampaknya proses ini tidak akan berlanjut terus. Dewasa ini, sebagai akibat depresiasi dollar, sektor manufaktur di Amerika Serikat mulai bangkit kembali.

Saham sektor jasa-jasa di Jepang juga telah menjadi sekitar 56% pada tahun 1985, meningkat dari 48% dua puluh tahun sebelumnya. Sangat mungkin proses ini akan berlanjut bahkan menjadi lebih cepat sejalan dengan perubahan di sektor manufaktur belakangan ini yang terjadi sebagai akibat apresiasi (meningkatnya nilai mata uang) Yen. Dewasa ini perubahan struktur ekonomi Jepang, terutama struktur industri, terjadi dengan cepat, sehingga timbul kekhawatiran mengenai apa yang dinamakan *hollowing-out* dari industri Jepang. Ini berhubungan dengan proses relokasi industri ke luar Jepang dalam bentuk penanaman modal asing, yang didorong oleh surplus perdagangannya dan terutama melonjaknya nilai Yen sejak akhir tahun 1985.

Perubahan struktur ekonomi di berbagai negara Eropa seperti Jerman Barat, Perancis, dan Italia, akan dipengaruhi oleh penghapusan total hambatan internal oleh MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) pada tahun 1992 nanti. Pengaruh ini akan berbeda-beda, tetapi umumnya dapat diperkirakan bahwa sumbangan sektor jasa-jasa di masing-masing negara akan berkisar pada 60 sampai 65%; sektor manufaktur pada sekitar 25%, sedangkan sumbangan sektor pertanian -- terutama di Perancis dan Italia -- akan menurun menjadi 2 sampai 3%.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa sangat mungkin pada tahun 1995 struktur ekonomi di negara-negara industri maju tersebut (OECD umumnya) akan menjadi seragam (*uniform*), yaitu sebagai berikut: saham sektor pertanian kira-kira 3%; sektor industri 35%, di mana saham sektor manufakturnya adalah 25%, sedangkan saham sektor jasa-jasa kira-kira 62%. Selain uniformitas struktur ini dapat diperkirakan bahwa perdagangan di antara negara-negara maju di bidang manufaktur *dan* terutama di bidang jasa-jasa akan semakin intensif.

JEPANG

Perubahan nilai tukar sejumlah mata uang internasional (*currency re-alignment*), yang terjadi secara drastis sejak akhir 1985, bisa dilihat sebagai suatu *shock* bagi ekonomi Jepang. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 1986 seketika merosot menjadi 2,8% dari 4,4% pada tahun 1985 dan 4% rata-rata per tahun dalam periode 1980-1985. Namun pada tahun 1987 ekonomi Jepang telah dapat mulai pulih kembali.

Perkembangan di atas ini harus dilihat sebagai bagian (atau implikasi) dari usaha-usaha untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan internasional,

seperti yang telah dibahas terdahulu. Tidak hanya Amerika Serikat yang perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk memperkecil defisit perdagangannya, tetapi Jepang juga perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk memperkecil surplus perdagangannya.

Dampak apresiasi Yen dapat dibedakan dalam dampak jangka pendek, yaitu atas permintaan akan ekspor Jepang di luar negeri dan permintaan akan impor di Jepang, dan dampak jangka panjang, yaitu atas struktur ekonomi dan perdagangannya. Pengaruh jangka pendek memang tidak menguntungkan bagi Jepang karena berbagai dislokasi ekonomi yang ditimbulkan, seperti pengangguran. Walaupun demikian, apresiasi Yen itu membawa dampak yang positif pula melalui perbaikan *terms of trade*, yaitu lebih banyak barang impor dapat dibeli dengan jumlah ekspor yang sama. Efek *terms of trade* ini adalah turunnya tingkat inflasi yang cukup terasa, terutama karena diperkuat oleh turunnya harga-harga bahan-bahan mentah, termasuk minyak. Oleh karena itu terjadi peningkatan dalam pendapatan riil sektor rumah tangga. Salah satu faktor yang mendorong pemulihan ekonomi Jepang sejak tahun 1987 adalah peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan terutama investasi untuk perumahan, yang meningkat sebesar 15%.

Peningkatan pengeluaran rumah tangga ini memperbaiki iklim usaha bagi perusahaan-perusahaan yang mulai meningkatkan investasi, tidak hanya ke luar negeri (PMA) tetapi juga di dalam negeri Jepang sendiri. Yang terakhir disebut melibatkan peningkatan penanaman modal di sektor non-manufaktur. Meningkatnya investasi ini juga dimungkinkan oleh kebijaksanaan fiskal dan moneter pemerintah yang lebih stimulatif, yang telah menurunkan tingkat suku bunga.

Meningkatnya permintaan dalam negeri itu telah mendorong peningkatan impor, khususnya impor barang-barang manufaktur. Seperti terlihat pada Tabel 8, pada tahun 1975 barang-barang manufaktur hanya merupakan 20% dari seluruh impor Jepang. Persentase ini meningkat menjadi 30% pada tahun 1984 dan melampaui 40% sejak tahun 1986.

Perkembangan di atas diharapkan mempunyai pengaruh jangka panjang dan merupakan langkah awal terjadinya perubahan struktur ekonomi dan perdagangan Jepang. Ditinjau dari tuntutan dalam negerinya (lapangan kerja), sesedikitnya sampai pertengahan dasawarsa 1990-an Jepang harus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 4% *per tahun*. Sementara itu surplus perdagangannya juga harus dapat dikurangi terus-menerus, sehingga menjelang tahun 1995 dapat menurun menjadi 1,5% dari PNB-nya dari surplus

sebesar 4,3% dari PNB pada tahun 1986. Target ini jelas menunjukkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya ekonomi Jepang harus mengalih dari pertumbuhan yang berorientasi ekspor kepada pertumbuhan yang berorientasi dalam negeri.

Tabel 8

RASIO IMPOR BARANG MANUFAKTUR TERHADAP SELURUH IMPOR
(Dalam %)

Tahun ^a	Barang Manufaktur Sebagai % Seluruh Impor
1975	20,4
1976	21,6
1977	22,3
1978	27,9
1979	24,4
1980	23,1
1981	24,6
1982	24,7
1983	28,2
1984	30,4
1985	31,5
1986	44,1
1987 (Januari-Juli)	45,2

^aTahun anggaran

Sumber: Bank of Japan.

Perubahan struktur ekonomi Jepang akan tercermin dalam beberapa perkembangan. Pertama, dalam peningkatan dari apa yang disebut *income elasticity of import*. Salah satu sebab rendahnya elastisitas impor ini adalah rendahnya bagian dari impor barang manufaktur dalam keseluruhan impor (lihat Tabel 8), yang berkisar antara 20% sampai 30% hingga tahun 1985. Di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat rasio itu adalah 60%. Pembahasan di atas menunjukkan bahwa perubahan itu telah mulai terjadi di Jepang sebagai akibat apresiasi Yen. Yang diharapkan adalah bahwa pada permulaan dasawarsa 1990-an rasio itu telah meningkat menjadi 60%, yang berarti bahwa struktur impor Jepang tidak lagi akan berbeda dari struktur impor negara-negara industri maju lainnya.

Rendahnya rasio impor manufaktur itu disebabkan oleh struktur industri (manufaktur) Jepang yang lengkap, yaitu meliputi segala sektor produksi yang menghasilkan segala apa yang diperlukan. Itulah sebabnya struktur industri Jepang disebut sebagai *full-set structure*. Apresiasi Yen juga telah mulai mengubah keadaan ini karena produksi berbagai jenis barang tidak lagi menjadi ekonomis. Sejak tahun 1986 mulai terlihat gelombang baru relokasi industri ke luar Jepang, dalam bentuk penanaman modal luar negeri (PMA), khususnya ke negara-negara industri baru Asia (NICs seperti Korea dan Taiwan) dan negara-negara ASEAN selain ke Amerika Serikat. Nilai PMA Jepang dalam periode 1971-1980 adalah rata-rata US\$3,3 milyar per tahun, meningkat dalam periode 1981-1985 menjadi rata-rata US\$9,4 milyar per tahun, dan melonjak menjadi US\$22,3 milyar pada tahun 1986. Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran terjadinya *hollowing-out* industri Jepang. Namun perkembangan itu tidak dapat dihindarkan dan struktur industri Jepang akan dipaksa untuk berkembang lebih sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Sisi lain dari perubahan struktur ekonomi Jepang yang diperlukan untuk memperkecil surplus perdagangannya akan tercermin dalam perubahan keseimbangan antara tabungan dan investasi (*savings-investment balance*). Berbeda dengan keadaan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami kesenjangan antara tabungan dan investasi (*S-I gap*) karena tingkat tabungan dalam negeri yang rendah, ekonomi Jepang mengalami kelebihan tabungan (*excess savings*) karena tingkat tabungan nasionalnya yang sangat tinggi.

Selama periode 1980-1985, misalnya, tingkat tabungan nasional Jepang rata-rata adalah 30,7% dari PDB per tahun, dibandingkan dengan sekitar 14% dari PDB di Amerika Serikat. Tingkat tabungan nasional Jepang hingga tahun 1987 belum memperlihatkan penurunan, bahkan selama tahun 1986 dan 1987 mencapai rata-rata 32,5% dari PDB. Dengan menurunnya investasi, dari lebih dari 30% PDB sampai akhir dasawarsa 1970-an menjadi rata-rata sekitar 28% PDB dalam tahun 1980 ini, kelebihan tabungan bahkan semakin meningkat mencapai sekitar 4% PDB, yaitu sebesar surplus perdagangannya.

Tingginya tabungan nasional di Jepang disebabkan oleh tingginya tabungan sektor rumah tangga. Walaupun pengeluaran rumah tangga telah mengalami peningkatan sebesar 4% pada tahun 1987, berbagai tindakan dan kebijaksanaan diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga.

Pembahasan di atas juga menunjukkan bahwa surplus perdagangan dan

surplus transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Jepang tidak segera dapat diturunkan. Pertanyaan mendasar bagi proyeksi perkembangan ekonomi jangka menengah adalah sejauh mana akan tetap diperlukan perubahan nilai tukar untuk mengurangi surplus Jepang dan memperkecil defisit Amerika Serikat.

Implisit dalam beberapa proyeksi yang digambarkan di atas adalah apresiasi Yen (dan depresiasi dollar) secara teratur dan bertahap, mencapai sekitar *113 Yen per dollar pada akhir tahun 1990* dan *90-95 Yen per dollar pada akhir tahun 1995*. Pengaruh dari perkembangan ini atas kepercayaan dari pasar finansial internasional tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tetapi karena itulah koordinasi kebijaksanaan antara pemerintah negara-negara industri utama merupakan faktor penting bagi perkembangan ekonomi dunia.

JERMAN BARAT, PERANCIS DAN ITALIA

Seperti halnya dengan Jepang, Jerman Barat juga merupakan negara surplus dan secara terus-menerus telah mengalami surplus dalam transaksi berjalan dalam neraca pembayarannya. Pada tahun 1987, misalnya, Jerman Barat mengalami surplus sebesar US\$44 milyar, sehingga secara kumulatif (sejak 1970) surplus tersebut mencapai US\$126 milyar pada akhir tahun 1987. Besarnya surplus Jerman Barat pada tahun 1986 juga mencapai sekitar 4% PNB-nya.

Efek *terms of trade* dari apresiasi mata uang dan merosotnya harga energi (dan bahan mentah lainnya) sebenarnya secara lebih penuh diteruskan kepada konsumen di Eropa daripada di Jepang. Walaupun demikian pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di Eropa lebih kecil daripada di Jepang. Pertumbuhan ekonomi di Italia pada tahun 1987 tetap kuat (sekitar 2,5%), tetapi merosot di Jerman Barat dan Perancis (di bawah 2%).

Melemahnya kegiatan ekonomi di Jerman Barat mempunyai dampak yang cukup besar atas berbagai negara Eropa lainnya, khususnya Perancis dan Italia. Hal ini disebabkan karena melemahnya permintaan dalam negeri pada tahun 1987, yang menurun dari 3,7% pada tahun 1986 menjadi hanya 2,1%, telah menekan permintaan akan impor. Pada gilirannya hal ini mempengaruhi posisi neraca pembayaran Perancis dan Italia yang memang tidak cukup kuat. Surplus transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Perancis dan Italia pada tahun 1987, misalnya, hanya mencapai 0,3% dan 0,4% dari PDB masing-masing.

Walaupun melemahnya kegiatan ekonomi di Jerman Barat itu dianggap bersifat temporer, dan perkiraan terakhir memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 1988 akan mencapai di atas 2% (yaitu 2,25%, meningkat dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,5%), pada tahun 1989 diperkirakan akan menurun kembali menjadi 1,75%.⁴ Hal ini berarti bahwa Jerman Barat belum akan memberikan sumbangan berarti pada usaha-usaha penyesuaian internasional, sesedikitnya sampai tahun 1990.

Pembahasan terdahulu menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut penyesuaian internasional, ekonomi Jerman Barat harus dapat tumbuh sesedikitnya dengan 3% *per tahun* sampai pertengahan dasawarsa 1990-an. Dengan tingkat pertumbuhan ini, yang bisa dicapai jika *permintaan dalam negeri* dapat tumbuh sebesar 4% *per tahun*, diperkirakan surplus transaksi berjalan dalam neraca pembayarannya dapat diperkecil menjadi sekitar US\$15 milyar pada permulaan dasawarsa 1990-an.⁵ Untuk tahun 1988 ini surplus itu bahkan diperkirakan masih meningkat menjadi US\$47 milyar.⁶ Karena itu mata uang D-Mark juga harus diperkenankan untuk mengalami apresiasi lebih lanjut. Implisit dalam berbagai proyeksi yang dibahas terdahulu, pada tahun 1995 diperkirakan nilai tukar D-Mark akan mencapai antara 1,20-1,28 D-Mark *per dollar*, dari sekitar 1,68 D-Mark per dollar pada pertengahan tahun 1988.

Proyeksi jangka panjang untuk dasawarsa 1990-an menurut model Onishi (lihat Tabel 3) memberikan gambaran yang kurang optimis untuk Jerman Barat dinilai dari tingkat pertumbuhan yang perlu dicapai. Skenario *baseline* menunjukkan pertumbuhan sebesar 2% saja, sedangkan dalam skenario optimistis pertumbuhan ekonomi Jerman Barat paling tinggi mencapai 2,3% rata-rata per tahun selama dasawarsa 1990-an (2,5% untuk periode 1990-1995).

Dapat tidaknya Jerman Barat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melalui stimulasi permintaan dalam negerinya sangat tergantung pada penerapan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang lebih longgar. Sebenarnya pada tahun 1987 yang lalu otoritas moneter telah membiarkan suplai uang meningkat sebesar hampir 8%, yang melampaui target sebesar 3-6%. Tetapi sebagian dari peningkatan itu diserap oleh para investor internasional yang mengantisipasi bahwa apresiasi D-Mark akan berlanjut.

⁴Perkiraan OECD bulan Mei 1988, akan dipublikasikan dalam OECD, *Economic Outlook*, No. 43 (Juni 1988).

⁵Lihat Morgan Guaranty, *World Financial Markets* (September/Oktobre 1987).

⁶Lihat OECD, *Economic Outlook*.

Di bidang fiskal, anggaran pemerintah tahun 1987 mengalami defisit sekitar 2% dari PNB-nya, sementara pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 2%. Untuk tahun 1988 ini diperkirakan pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 3% sesuai pembatasan dalam strategi fiskalnya. Defisit anggaran diperkirakan tetap berkisar 2% PNB. Pada tahun 1988 ini diterapkan tahap kedua pemotongan pajak sebesar sekitar 14 milyar D-Mark, atau 0,7% PNB. Tahap ketiga akan dilakukan tahun 1990, melibatkan pemotongan sebesar 20 milyar D-Mark atau sekitar 1% PNB. Jika tahap ketiga pemotongan pajak ini dapat diterapkan lebih dini, tindakan ini mungkin akan dapat memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk meningkatkan permintaan dalam negeri.

Prospek jangka menengah bagi Perancis juga belum tampak menggembirakan. Ada kemungkinan pada tahun 1988 pertumbuhan ekonominya dapat mencapai 2%, lebih baik daripada yang diperkirakan. Di antara negara-negara Eropa Barat, dan di antara semua negara-negara industri maju, tingkat pengangguran di Perancis adalah yang tertinggi, dan diperkirakan sebesar 12% pada tahun 1988 ini (8,3% di Jerman Barat; 6,5% di Amerika Serikat, dan 3% di Jepang).

Posisi neraca pembayaran Perancis tahun 1988 ini diperkirakan bahkan memburuk dengan transaksi berjalan yang berubah menjadi defisit dari surplus pada tahun 1987. Perubahan ini terutama disebabkan oleh neraca perdagangan yang memburuk karena stagnasi ekspor. Hal ini berkaitan dengan melemahnya kegiatan ekonomi di Jerman Barat.

Pengelolaan ekonomi dalam negerinya juga menghadapi dilema sejauh yang menyangkut anggaran pemerintah, yaitu menurunkan pajak di satu pihak dan mengurangi defisit anggaran di pihak lain. Pengeluaran oleh dunia usaha (investasi) lebih mudah dapat dirangsang melalui kebijaksanaan fiskal ini. Sebaliknya pengeluaran oleh rumah tangga tidak akan meningkat secara berarti selama pendapatan riil rumah tangga mengalami stagnasi sebagai akibat gaji yang tidak meningkat (karena tingkat pengangguran yang tinggi), sementara inflasi meningkat. Bagi Perancis, prospek ekonomi jangka menengahnya, yaitu untuk dapat tumbuh dengan sekitar 3% per tahun, akan tergantung pada kemampuan untuk menciptakan suatu keseimbangan yang lebih baik antara permintaan dalam negeri dan permintaan luar negeri (ekspor).

Sejak tahun 1986 tingkat pertumbuhan ekonomi di Italia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Eropa. Walaupun perkembangan tahun 1987 dan 1988 masih cukup baik, terutama didorong oleh permintaan dalam negeri

sebagai akibat meningkatnya gaji, akibatnya terhadap inflasi dan peningkatan impor akan memperburuk posisi neraca pembayarannya. Sementara itu defisit anggaran pemerintah, yang mencapai 4% dari PDB-nya pada tahun 1986, mungkin akan cenderung membengkak.

Proyeksi jangka panjang bagi Italia (lihat Tabel 3) memperkirakan tingkat pertumbuhan sebesar sekitar 3% per tahun. Realisasinya akan tergantung pada perkembangan sektor ekspornya. Kiranya penghapusan total hambatan internal perdagangan MEE tahun 1992 akan sangat membantu sektor ekspor Italia.

KOREA SELATAN DAN TAIWAN

Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong (serta Singapura) kini umumnya dikelompokkan sebagai negara industri baru (NICs atau *newly industrializing countries*). Ketiga negara itu juga semakin banyak disoroti dari segi upaya penyesuaian internasional karena surplus neraca pembayaran mereka (transaksi berjalan) yang terus-menerus dan malahan meningkat secara drastis pada tahun 1987. Pada tahun 1987 itu surplus transaksi berjalan ketiga negara itu mencapai di atas US\$40 milyar, kira-kira sama besar dengan surplus Jerman Barat.

Jika surplus bilateral Jerman Barat dengan Amerika Serikat merupakan kira-kira 40% dari surplus totalnya itu, surplus bilateral ketiga NICs Asia tersebut dengan Amerika Serikat mencapai kira-kira 75% dari surplus totalnya. Perkembangan ini antara lain disebabkan karena penurunan ekspor dari Jepang ke Amerika Serikat sebagai akibat apresiasi Yen diisi oleh ekspor dari NICs Asia tersebut. Itulah sebabnya negara-negara itu kini mengalami tekanan yang besar untuk mengapresiasi mata uang mereka. Apresiasi Won dan NT dollar, seperti telah terjadi dan masih akan berlanjut, akan mempengaruhi prospek jangka menengah dan jangka panjang kedua negara tersebut. Dewasa ini diperkirakan bahwa prospek ekonomi NICs Asia tersebut dalam dasawarsa 1990-an tidak sebaik yang diperkirakan beberapa waktu lalu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi mereka masih akan cukup tinggi.

Tingkat pertumbuhan PNB Korea Selatan, misalnya, yang mencapai rata-rata 12,2% selama tahun 1986 dan tahun 1987, diperkirakan menurun menjadi 8% pada tahun 1988 dan rata-rata 7% per tahun dalam periode 1989-1991 mendatang. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat pertumbuhan ekspor dari sekitar 30% per tahun selama tahun 1986 dan tahun

1987 menjadi hanya 10% pada tahun 1988 dan semakin menurun menjadi 6,5% per tahun selama periode 1989-1991. Sejauh ini, permintaan dalam negeri diperkirakan tidak akan meningkat lebih cepat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat dengan 6% per tahun sampai tahun 1991, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 7% pada pertengahan dasawarsa 1980-an ini. Jika permintaan dalam negeri dapat ditingkatkan, ada kemungkinan Korea Selatan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Prospek jangka panjang ekonomi Korea Selatan seperti diproyeksikan melalui model Onishi (Tabel 3) memperkirakan pertumbuhan sebesar rata-rata 6,4% sampai 7% per tahun.

Kebijaksanaan jangka menengah Korea Selatan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Lima Tahun yang ke-6 (1987-1991), pada intinya menetapkan tiga tujuan pokok. Pertama, melaksanakan transformasi ekonomi menjadi negara maju pada tahun 2000. Dalam hubungan ini akan diusahakan lebih lanjut usaha deregulasi, liberalisasi perdagangan, desentralisasi dan peningkatan program kesejahteraan (*welfare programs*) serta perbaikan prasarana sosial. Kedua, meningkatkan tingkat teknologi dalam industri Korea Selatan dan menggalakkan skala usaha industri menengah dan kecil yang mempunyai peran penting dalam pengembangan industri mesin, komponen, dan produksi material. Ketiga, memperkecil kesenjangan antara sektor usaha besar dan sektor usaha menengah dan kecil, antara sektor ekspor dan sektor domestik, antara ekonomi pedesaan dan sektor perkotaan.

Rencana ke-6 ini bertujuan mempertahankan surplus dalam neraca pembayaran (transaksi berjalan) sebesar US\$5 milyar per tahun, atau sekitar 2% dari PDB, yang dimaksudkan untuk membayar kembali hutang luar negerinya. Tetapi pengelolaan sektor eksternalnya ini tidak akan terlampau mudah mengingat perkembangan lingkungan internasional yang kurang menguntungkan bagi Korea Selatan. Tekanan untuk mengapresiasi mata uangnya merupakan salah satu contoh. Selain itu Korea Selatan semakin dibatasi peluangnya untuk memperoleh perlakuan khusus dan berbagai preferensi perdagangan, seperti GSP.

Masalah penyesuaian dan pengelolaan sektor eksternal Taiwan lebih sulit daripada Korea. Pertama, karena surplus Taiwan jauh lebih besar daripada Korea, secara relatif (terhadap PDB-nya) dan secara absolut. Secara kumulatif, surplus transaksi berjalan (sejak 1970) sampai akhir tahun 1987 mencapai hampir sebesar US\$80 milyar. Cadangan internasional Taiwan dewasa ini juga mencapai US\$80 milyar. Kedua, dibandingkan dengan Korea, pasar dalam negeri Taiwan sangat kecil dan karenanya Taiwan tidak mem-

punyai pilihan untuk mengalihkan ekonominya dari orientasi ekspor ke permintaan dalam negeri. Sementara ini mata uangnya, NT dollar, telah mengalami apresiasi yang lebih pesat daripada Won. Namun diperkirakan bahwa surplus transaksi berjalan dalam tahun 1988 ini masih akan mencapai lebih dari US\$20 milyar.

Tidak jelas apakah usaha penyeimbangan sektor eksternalnya itu dapat digantungkan pada penyesuaian nilai tukar. Surplus perdagangan Taiwan yang demikian besar itu bersifat struktural. Kelebihan tabungan (S-I) yang mencapai 20% dari PDB, dan tingkat tabungan nasional yang mencapai 37% dari PDB pada tahun 1987, memang bukan perkembangan yang lazim. Tetapi secara tradisional, tingkat tabungan nasional di Taiwan berkisar pada 33% dari PDB-nya, bahkan lebih tinggi daripada di Jepang. Salah satu langkah utama yang diambil Taiwan dewasa ini adalah meningkatkan penanaman modal asingnya, yang sebagian memang bersifat relokasi kegiatan ekonomi sebagai akibat dari apresiasi mata uangnya. Pada umumnya ekonomi Taiwan dianggap cukup kuat dan akan bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7% sampai 7,5% per tahun selama dasawarsa 1990-an yang akan datang.

CINA

Sejak Cina melakukan perombakan ekonominya pada akhir dasawarsa 1970-an, ekonomi Cina telah mengalami berbagai kemajuan. Restrukturisasi ekonomi ke arah ekonomi yang terbuka dan pengelolaan secara campuran (perencanaan terpusat dan alokasi melalui pasar) telah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi, meningkatkan produksi nasional dan taraf hidup, meningkatkan impor dan ekspor serta penanaman modal asing di dalam negeri Cina.

Data perkembangan Cina antara tahun 1980-1985 menunjukkan PDB yang tumbuh sebesar rata-rata 9,8% per tahun, sekitar 50% lebih tinggi daripada pertumbuhan sebesar 6,4% per tahun selama periode 1965-1980.⁷ Selain tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi ini, periode setelah reformasi ekonomi itu melihat perkembangan yang lebih stabil daripada dalam periode sebelumnya yang penuh gejolak.

Evaluasi mengenai hasil dari perombakan ekonomi itu telah banyak dilakukan, dan mengenai prospek jangka menengah dan panjang ekonomi Cina terdapat dua pandangan yang berbeda, yang sangat optimis dan yang lebih

⁷World Bank, *World Development Report 1987*.

pesimis. Pandangan optimis beranggapan bahwa perkembangan seperti selama 1980-1985 itu akan berlanjut dalam dasawarsa 1990-an. Tetapi sangat mungkin momentum permulaan itu memang tidak mudah untuk dipertahankan. Sektor pertanian tumbuh sebesar 9% per tahun selama periode 1980-1985 itu, tetapi ini merupakan akibat dari penerapan sistem baru (*contract system*) di pedesaan, menggantikan pola komune. Pertumbuhan sektor industri di atas 10% didorong oleh sektor manufaktur yang tumbuh sebesar sekitar 12,5% per tahun. Dalam sektor industri telah terjadi pergeseran dari industri berat/dasar ke industri manufaktur ringan yang berorientasi ekspor. Tidak jelas apakah pola pengembangan industri ini dapat berlanjut.

Selama periode 1980-1985 itu posisi neraca pembayaran Cina telah memburuk karena impor meningkat jauh lebih pesat daripada ekspor. Rencana pembangunan lima tahun ke-7 (1987-1990) yang ditetapkan April 1986 menonjolkan perlunya dipertahankan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dan membatasi investasi (yang sangat padat impor). Sebagai akibatnya, posisi neraca pembayaran pada tahun 1986 mulai membaik, walaupun defisit transaksi berjalannya masih berkisar pada US\$7 milyar, kira-kira 2% dari PDB-nya. Selain karena kendala eksternal ini, di dalam negeri Cina sendiri mulai dihadapi berbagai hambatan (*bottlenecks*), terutama dalam penyediaan bahan-bahan alam, transportasi, dan energi.

Rencana jangka panjang Cina yang ditetapkan dalam Kongres Partai ke-12 pada tahun 1982 bertujuan meningkatkan produksi nasional sebesar sekitar 7,2% per tahun, sehingga PDB-nya menjadi empat kali lipat pada tahun 2000. Proyeksi jangka panjang menurut model Onishi (Tabel 3) memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Cina selama dasawarsa 1990-an berkisar pada 5,7-6,2% per tahun. Walaupun pertumbuhan ekonomi Cina tidak mencapai tingkat yang diinginkan, dengan pertumbuhan sebesar 6% per tahun, dampaknya atas ekonomi-ekonomi di kawasan Pasifik akan sangat terasa.

ASEAN

Negara-negara ASEAN merupakan ekonomi-ekonomi yang terbuka dan karenanya sangat dipengaruhi oleh perkembangan internasional. Tabel 9 menunjukkan besarnya nilai perdagangan (impor dan ekspor) terhadap PDB pada tahun 1985. Perkembangan internasional menjadi semakin besar artinya bagi semua negara-negara ASEAN karena mereka telah mengambil orientasi ekspor dalam strategi pembangunan ekonomi dan industrinya.

Tabel 9

PERKEMBANGAN EKONOMI DI ASEAN

	Pertumbuhan Ekonomi %		Nilai Perdagangan Sebagai % PDB	Pertumbuhan Ekspor Manufaktur antara 1971-1981 dan 1984-1986 (%, rata-rata per tahun)
	1985	1987	1985	
Indonesia	1,9	3,7	35	35,5
Malaysia	-1,0	4,7	88	15,5
Filipina	-3,8	5,1	31	5,0
Singapura	-1,8	8,6	281	8,0
Muangthai	4,0	6,6	43	14,0

Sumber: World Bank, *World Development Report 1987*; GATT, *International Trade 1986/87*; dan, statistik nasional untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1987.

Ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi internasional sangat berpengaruh atas negara-negara ASEAN, seperti telah ditunjukkan selama beberapa tahun terakhir ini. Merosotnya harga bahan-bahan (komoditi) primer, sebagai akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia (yang bersifat siklikal) dan menurunnya intensitas penggunaan bahan-bahan alam (yang bersifat struktural) telah mempengaruhi perkembangan di negara penghasil barang-barang primer tersebut, yaitu Malaysia, Indonesia dan Muangthai. Menurunnya kegiatan ekonomi di negara-negara ini secara langsung mempengaruhi ekonomi Singapura.

Sejak tahun 1981 negara-negara ASEAN umumnya mengalami perburukan posisi neraca pembayarannya, tetapi semua negara melakukan tindakan-tindakan penyesuaian yang sangat berarti, baik dalam bidang fiskal maupun dalam bidang moneter. Kebijakan deflasi ini sangat menolong pengelolaan neraca pembayaran tetapi berakibat rendahnya pertumbuhan ekonomi. Seperti terlihat pada Tabel 9, pada tahun 1985 Malaysia, Filipina dan Singapura mengalami pertumbuhan yang negatif. Namun demikian pada tahun 1987 (Tabel 9), ekonomi-ekonomi ASEAN telah mulai bangkit kembali. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4% dan 9%, dan pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor, khususnya ekspor barang-barang manufaktur (lihat Tabel 9). Kesulitan yang dihadapi negara-negara ASEAN

selama paruh pertama dasawarsa 1980-an telah mendorong negara-negara tersebut mengambil kebijaksanaan dan tindakan penyesuaian serta restrukturisasi ekonomi, melalui deregulasi, liberalisasi dan privatisasi, yang dianggap menciptakan landasan yang lebih kuat untuk memasuki dasawarsa 1990-an.

Momentum yang menggembirakan ini didukung pula oleh perkembangan eksternal, khususnya di kawasan Pasifik, di mana sedang terjadi perubahan yang berarti dalam "pembagian kerja (produksi) internasional" (*international division of labor*) yang baru, antara lain sebagai akibat *currency realignment* yang dibahas sebelumnya. Pola pembagian kerja di Pasifik yang menjadi semakin dinamis, dan sering dijuluki sebagai "*flying geese*" *pattern of development* itu, menggambarkan negara-negara yang secara berturut-turut maju dan melangkah ke tahapan pembangunan selanjutnya secara estafet. Apresiasi Yen, dan kemudian disusul oleh apresiasi Won dan mata uang NICs Asia lainnya telah mempercepat proses relokasi industri tersebut. Salah satu instrumen yang mempercepat proses perubahan pembagian kerja internasional ini adalah penanaman modal asing (PMA), yang dalam dua tahun terakhir ini telah meningkat ke semua negara ASEAN.

Perkembangan di atas itu telah mempengaruhi proyeksi jangka menengah dan panjang mengenai negara-negara ASEAN, yang kini dianggap jauh lebih baik daripada beberapa waktu lalu. Proyeksi jangka panjang menurut model Onishi (Tabel 3) melihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi semua negara-negara ASEAN selama dasawarsa 1990-an akan berkisar antara 5% dan 7% rata-rata per tahun. Pernilaian dewasa ini adalah bahwa prospek tersebut cenderung menjadi lebih baik.

Selain tingkat pertumbuhan yang meningkat, dalam dasawarsa 1990-an negara-negara ASEAN akan melihat perubahan struktur yang berarti, sejalan dengan perubahan pembagian kerja internasional, khususnya di kawasan Pasifik. Tabel 10 menunjukkan perubahan struktur yang terjadi selama periode 1965-1985 di sejumlah negara-negara Pasifik Barat (NICs Asia, Cina dan ASEAN).

Pertengahan dasawarsa 1990-an akan melihat struktur ekonomi yang berbeda di kawasan Pasifik Barat. Peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDB di ASEAN (kecuali Singapura) dan di Cina serta Korea Selatan akan terus menurun, mencapai sekitar 15% sampai 20% di ASEAN, sekitar 25% di Cina dan di bawah 10% di Korea Selatan. Yang terakhir akan terjadi jika Korea Selatan menghapuskan proteksi berlebihan bagi sektor pertaniannya. Sektor jasa-jasa rata-rata akan meningkat menjadi 50% di semua negara

Tabel 10

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DI PASIFIK BARAT, 1965-1985
(Dalam % dari PDB)

	Pertanian		Industri		(Manufaktur)		Jasa-jasa	
	1965	1985	1965	1985	1965	1985	1965	1985
Korea Selatan	39	14	26	41	19	28	35	45
Taiwan ^a	28	7	30	51	22	41	44	43
Hongkong	2	1	40	31	24	24	58	68
Cina	39	33	38	47	30	37	23	20
Indonesia	56	24	13	36	8	14	31	41
Malaysia ^b	28	21	25	35	9	19	47	44
Filipina	26	27	28	32	20	25	46	41
Singapura	3	1	24	37	15	24	73	62
Muangthai	35	17	23	30	14	20	42	53

^a1961 dan 1984

^b1965 dan 1984

Sumber: World Bank, *World Development Report 1987*; dan *Statistical Abstract of National Income in Taiwan Area, ROC, 1951-84*, untuk Taiwan.

kecuali di Cina, yang masih akan terbatas pada 30% karena sektor jasa-jasanya masih sangat terbelakang, dan di atas 60% di Singapura dan Hongkong yang memang merupakan ekonomi jasa-jasa.

Perkembangan yang terpenting akan terjadi di sektor industri manufaktur, yang akan menjadi motor pertumbuhan utama dan baru di negara-negara ASEAN. Saham sektor manufaktur akan mencapai kira-kira antara 20% (Indonesia) dan 25% atau lebih (Malaysia dan Muangthai). Sebaliknya sektor manufaktur di Taiwan dan Korea Selatan (mungkin juga di Cina) secara persentase (dalam pembentukan PDB) akan menurun dengan meningkatnya peranan sektor jasa-jasa. Pada intinya, kawasan Pasifik Barat -- termasuk ASEAN -- akan melihat perubahan yang dinamis dan tingkat pertumbuhan ekonominya selama dasawarsa 1990-an akan lebih uniform, sekitar 6-8% per tahun rata-rata untuk semua negara, berbeda dari pengalaman pada dasawarsa 1970-an di mana NICs Asia dan Cina tumbuh jauh lebih cepat daripada negara-negara ASEAN.

Prakarsa Baru Penyatuan Eropa Menyongsong 1992

Djisman S. SIMANDJUNTAK

Banyak kejadian yang mendorong bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia, untuk mengalihkan pusat perhatian dari bagian bumi sebelah Barat-nya ke bagian bumi sebelah Timur-nya yang bersama Asia Tenggara dan Asia Timur membentuk apa yang semakin populer dengan nama "Masyarakat Pasifik." Pamor Eropa tampak memudar. Di antara orang-orang Eropa sendiri banyak yang melukiskan masa depan yang tidak cerah bagi benuanya dibanding Amerika Serikat atau Jepang, seraya memperkuat kecenderungan di antara bangsa-bangsa di luar Eropa untuk menurunkan urutan Eropa dalam agenda kebijakan luar negeri umumnya dan kebijakan ekonomi luar negeri khususnya.

Alasan-alasan di belakang apa yang dapat disebut sebagai gejala peremehan Eropa perlu dikenali. Di antara alasan-alasan tersebut paling sedikit sebagian, walaupun tidak sebagian terbesar, masih belum terbukti sebagaimana akan ditunjukkan dalam bagian pertama tulisan ini. Dengan kata lain, masih terlalu pagi untuk meninggalkan Eropa, apalagi bagi suatu negara Asia Tenggara seperti Indonesia yang di samping mempunyai hubungan ekonomi yang penting dengan Eropa, barangkali juga dapat memanfaatkan Eropa untuk mencegah ketergantungan yang berlebihan pada Jepang. Pada pihaknya, Eropa pun sudah mengumumkan prakarsa-prakarsa baru untuk memperbaiki daya saing internasional, terutama daya saing ekonomi. Di bawah kepemimpinan Gorbachev, Eropa Timur sedang dilanda *glasnost* dan *perestroika* yang bagi Eropa Barat akan bekerja sebagai pemicu tambahan untuk melakukan liberalisasi dan restrukturisasi ekonominya. Masyarakat Eropa sendiri sudah sejak lama mencari terobosan-terobosan dalam integrasi Eropa. Walaupun tidak dapat disebut sebagai lompatan besar, Akte Tunggal Eropa (*European*

Single Act) sudah ditandatangani di Luxemburg oleh para menteri luar negeri pada tanggal 17 Februari 1986.

Penyesuaian kelembagaan, pembentukan pasar internal, kebijakan moneter, kebijakan sosial, penelitian, teknologi dan perlindungan lingkungan, Parlemen Eropa, dan kerjasama politik diliput dalam Akte Tunggal ini yang diberi nama seperti itu karena meliputi serentak bidang ekonomi dan politik, sementara kerjasama keamanan didorong melalui revitalisasi Uni Eropa Barat. Untuk memakai kamus kerjasama regional ASEAN, baik *market sharing* maupun *resource pooling* mendapat hentakan baru dari Akte Tunggal dan karena itu perlu dibahas menurut peluang-peluang dan kendala perwujudannya serta dampaknya atas negara ketiga dan kebijakan perdagangan eksternal Masyarakat Eropa, khususnya yang mengandalkan keberhasilan ekspor dalam pembangunan ekonominya.

PENYAKIT EROPA BARAT

Sudah sejak lama orang berbicara tentang peralihan "pusar" dunia dari Atlantik ke Pasifik, dan di antara pemuka-pemuka Eropa pun banyak yang mengatakan bahwa bobot Eropa sedang mengecil dalam persaingan dan kerjasama dunia. Eropa bahkan dapat: "... menurun menjadi satelit tanpa kemandirian dan kebebasan."¹ Henning Christophersen dalam nada serupa mengeluh bahwa Presiden Ronald Reagan dan Sekretaris Jenderal Mikhail Gorbachev: "... bertemu di jantung Eropa menyinggung nasib Eropa tanpa mengikutsertakan orang Eropa."² Dalam suatu ceramah di CSIS, Jakarta, yang diselenggarakan tanggal 4 April 1986, Helmut Schmidt, bekas Kanselir Federal Jerman Barat yang juga terkenal sebagai orang Eropa (European) yang gigih secara implisit mengeluh bahwa pemimpin-pemimpin Eropa terlalu sibuk mengurus tetek-bengek seperti gandum, susu, gula, minyak goreng, atau apa saja yang tertera dalam Kebijakan Pertanian Bersama untuk mempunyai pengaruh atas perumusan dan penyelesaian masalah-masalah global. Tiga puluh tahun sesudah Perjanjian Roma, lalu-lintas ekonomi antara anggota-anggota Masyarakat Eropa masih menghadapi berbagai halangan dan kesenjangan masih tetap lebar antara anggota yang termiskin dan yang terkaya, begitu juga menurut struktur ekonomi. Singkatnya, tidak saja Masyarakat

¹Jacques Chaban-Delmas, "Perspektive fuer die Politische Zukunft Europas," dalam *Europa Archiv*, No. 5/1985, hal. 122.

²Henning Christophersen, "Ansprueh und Wirklichkeit der Europaeischen Gemeinschaft," dalam *Europa Archiv*, No. 2/1986, hal. 43.

Eropa relatif tertinggal dibanding beberapa negara lain, bagian yang tidak kecil dari proyek "Integrasi Eropa" masih terbengkalai. Tidak mengherankan kalau pemuka politik di tempat lain seperti Mahathir Mohammed yang melalui kolonialisme mewarisi juga banyak hal-hal yang berbau Eropa, mencari teladan baru yang memang sudah muncul di dekat Asia Tenggara.

Dari uraian di atas belum dapat disimak penyakit yang diidap oleh Eropa Barat dan bahkan apakah sejenis penyakit Eropa benar-benar ada. Yang agak pasti baru sikap pesimisme Eropa yang tercermin antara lain dalam pernyataan-pernyataan tentang pengangguran. Yang paling kiri pun di antara tokoh politik sudah sangat hati-hati kalau ditanya tentang kemampuannya untuk menurunkan tingkat pengangguran, sementara yang paling liberal pun dalam hal keterbukaan perdagangan internasional sudah menganggap proteksi sebagai bagian yang perlu dari resep revitalisasi ekonomi Eropa.

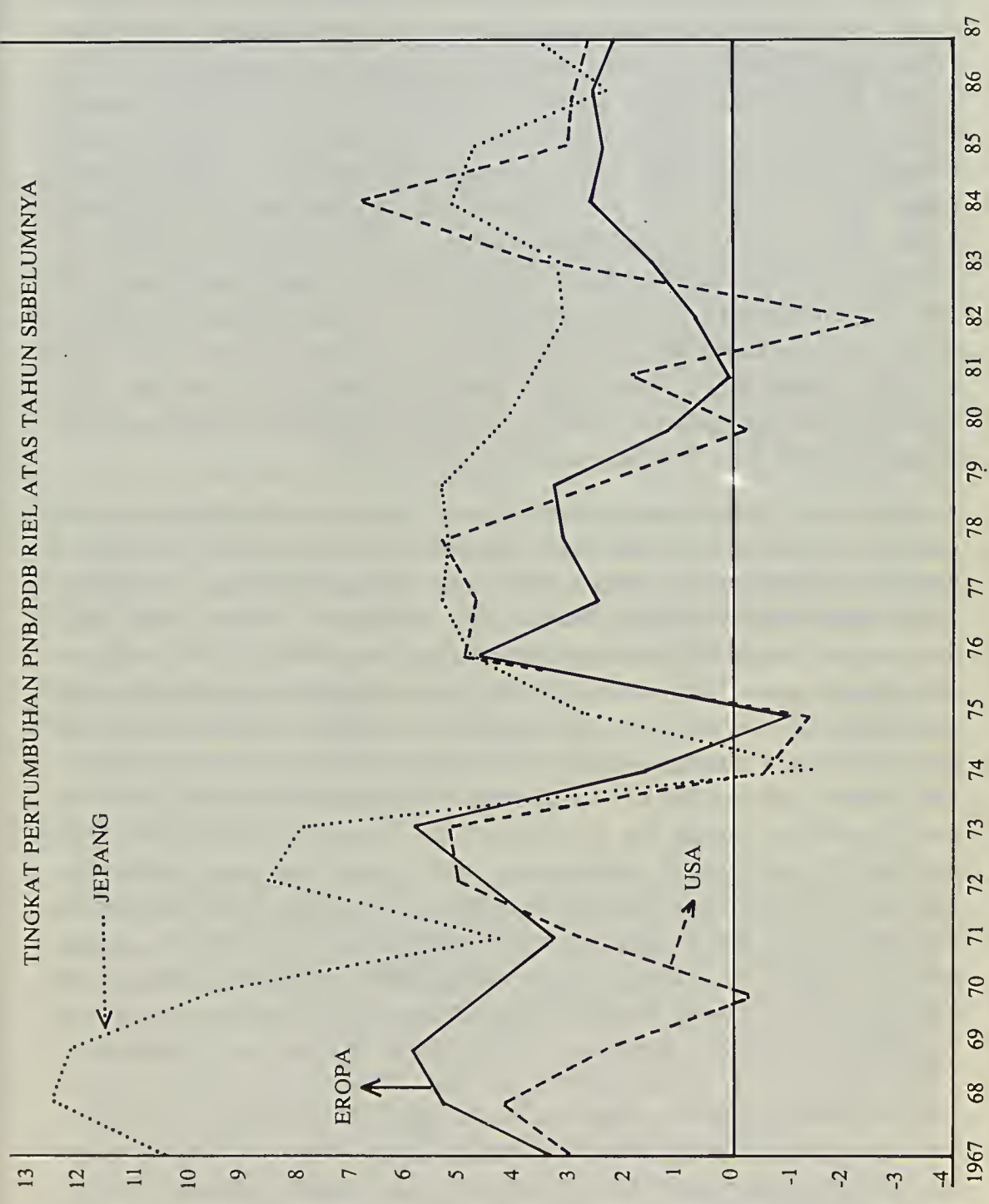
Bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk melokasi penyakit yang diidap ekonomi Eropa dewasa ini, apalagi untuk menyimpulkan bahwa penyakit tersebut adalah lebih buruk daripada yang diidap oleh ekonomi-ekonomi lain. Dalam pembahasannya atas diagnosa yang dibuat oleh Paul Krugman tentang "Pertumbuhan Lambat" di Eropa,³ Ralf Dahrendorf mengajukan pertanyaan tentang apakah keadaan Eropa yang ditandai oleh pengangguran yang lebih tinggi, tingkat upah yang relatif tinggi dan jaminan sosial yang lebih luas adalah lebih buruk daripada keadaan Amerika Serikat yang ditandai memang oleh pengangguran yang lebih rendah tetapi juga oleh tingkat upah yang menurun. Perlombaan ekonomi tidak sama dengan dasalomba di mana masing-masing disiplin mempunyai skor yang kardinal. Raihan total ekonomi A dengan tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi tetapi saldo neraca transaksi berjalan yang memburuk tidak dapat dikatakan lebih buruk daripada raihan total ekonomi B yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan PDB yang rendah tetapi transaksi berjalan yang membaik. Dengan kendala metodologi ini dapat dikatakan bahwa gambar Eropa sebagai benua yang sedang tenggelam adalah hasil persepsi. Karena itu yang akan dilakukan berikut adalah penguraian dasar-dasar persepsi itu. Pada umumnya, dasar-dasar itu adalah lemah dan rawan terhadap tafsir yang berbeda.

Salah satu tolok ukur yang sering, kalau tidak yang tersering dipakai dalam penggambaran Eropa sebagai benua yang sedang tenggelam adalah pertumbuhan ekonomi. Secara historis pertumbuhan ekonomi Masyarakat Eropa

³Lihat terutama sumbangan Paul Krugman dan Robert Z. Lawrence, dalam *Barriers to European Growth: A Transatlantic View* ed. Robert Z. Lawrence dan Charles L. Schultze (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1987).

Gambar 1

TINGKAT PERTUMBUHAN PNB/PDB RIEL ATAS TAHUN SEBELUMNYA



Sumber: Diolah dari OECD Economic Outlook, Desember 1987.

dalam dasawarsa 1980-an ini memang rendah, sebagaimana dapat dilihat dari Gambar 1. Tetapi pertumbuhan melemah tidak dapat disebut sebagai penyakit Eropa. Baik Amerika Serikat maupun Jepang juga mengidapnya. Seperti dikatakan Angus Maddison, zaman emas purna perang yang berakhir tahun 1973, adalah kekecualian dalam sejarah.⁴ Kurva-kurva pertumbuhan ekonomi dalam Gambar 1 cenderung bergerombol sekitar satu gelombang, walaupun dengan tinggi yang berbeda-beda. Memang dapat dikatakan bahwa selama 20 tahun sejak 1967, ekonomi Jepang lebih baik daripada ekonomi Masyarakat Eropa menurut raihan pertumbuhan. Tetapi hal yang sama tidak dapat dipertahankan jika pembandingan adalah Amerika Serikat. Hanya dalam masa 1983-1987 raihan Amerika Serikat selalu lebih baik daripada raihan Masyarakat Eropa. Ini membawa kita pada dimensi waktu dalam pembandingan raihan ekonomi. Kalau dalam waktu dekat Amerika Serikat harus menutup defisit fiskal dan perdagangannya, raihan pertumbuhan ekonomi Masyarakat Eropa mungkin sekali akan melebihi raihan Amerika Serikat.

Tentu saja bukan hanya pertumbuhan total yang diperhatikan orang ketika mengatakan bahwa ekonomi Masyarakat Eropa semakin tertinggal di belakang Jepang dan Amerika Serikat. Mutu pertumbuhan juga merupakan bagian dari dasar penilaian. Tetapi dilihat dari sudut ini pun, tidak dapat disimpulkan bahwa ada penyakit pertumbuhan yang khas Eropa atau Masyarakat Eropa secara lebih khusus. Yang dikenal sebagai de-industrialisasi atau perubahan susunan-produksi dan emploimen menjauhi industri pengolahan menuju jasa-jasa yang lebih lamban menurut perbaikan produktivitasnya, terjadi juga di Amerika Serikat dan Jepang. Dilihat dari emploimen, misalnya, de-industrialisasi Jepang dan Amerika Serikat hingga 1984 adalah lebih cepat daripada Jerman Barat.⁵ Sebagaimana masih akan disinggung belakangan, juga tidak ada bukti kuat untuk mengatakan bahwa Eropa sudah ditaklukkan Amerika Serikat dan Jepang dalam perdagangan hasil-hasil industri, walaupun pernyataan ini mungkin harus dimodifikasi seandainya perdagangan hasil-hasil industri tidak dipukul oleh instrumen proteksionisme baru seperti "Pembatasan Ekspor Sukarela" dan *Orderly Marketing Arrangements*. Tetapi pelarian ke proteksionisme ini pun bukan penyakit khas Eropa. Amerika Serikat juga mengidapnya, begitu juga Jepang. Kritik terhadap perlindungan industri pengolahan Masyarakat Eropa barangkali adalah paling kuat jika diarahkan pada sifat Masyarakat Eropa sebagai kawasan preferensial yang tidak saja bersatu dalam penurunan hambatan perdagangan sesama

⁴Lihat artikel surveinya, "Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment," dalam *Journal of Economic Literature*, vol. 25 (Juni 1987): hal. 649-698.

⁵Lihat Tabel A-13 dalam *ibid.*, hal. 689.

anggota tetapi juga dalam regionalisasi langkah proteksionis tertentu yang semula beruang lingkup lokal.

Yang paling sering disebut sebagai kelemahan pertumbuhan Eropa adalah ketertinggalan dalam perlombaan teknologi tinggi, yang militer maupun yang sipil. Tetapi pernyataan ini juga belum didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disanggah. Industri teknologi tinggi adalah klasifikasi yang sangat luas dan tanpa ujung. Hasil perbandingan yang lebih baik kiranya dapat diperoleh dengan klasifikasi yang sempit, tetapi prosedur ini tidak cocok kalau yang dikehendaki adalah pernyataan umum. Apa yang dapat disimpulkan tentang teknologi tinggi Eropa jika diketahui bahwa dalam tahun 1986 Airbus sudah berhasil merebut pangsa pasar sebesar 25% dibanding hanya 5% pada awal 1970-an dalam pasar pesawat terbang sipil?⁶ Jawaban atas pertanyaan ini semakin sulit kalau disadari bahwa mesin Airbus adalah buatan General Electric dari Amerika. Barangkali justru dalam teknologi tinggilah paling sulit mengukur keunggulan atau ketertinggalan suatu bangsa. Lebih daripada dalam industri teknologi rendah, kerjasama internasional adalah satu ciri kuat industri teknologi tinggi, Boeing maupun Airbus mempunyai "sub-kontraktor" di berbagai negara. Singapura, Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan memproduksi berbagai komponen yang diperlukan IBM seraya membuat yang disebut terakhir ini menjadi "pabrik global." Pesawat luar angkasa NASA pun dilengkapi dengan berbagai sub-sistem rancangan dan buatan negara lain termasuk Eropa. Contoh-contoh ini menunjukkan kebalikan dari pernyataan umum tentang ketertinggalan Eropa. Seperti dikatakan oleh Nathan Rosenberg, Amerika Serikat sudah dilomba oleh Eropa dan Jepang dalam teknologi.⁷

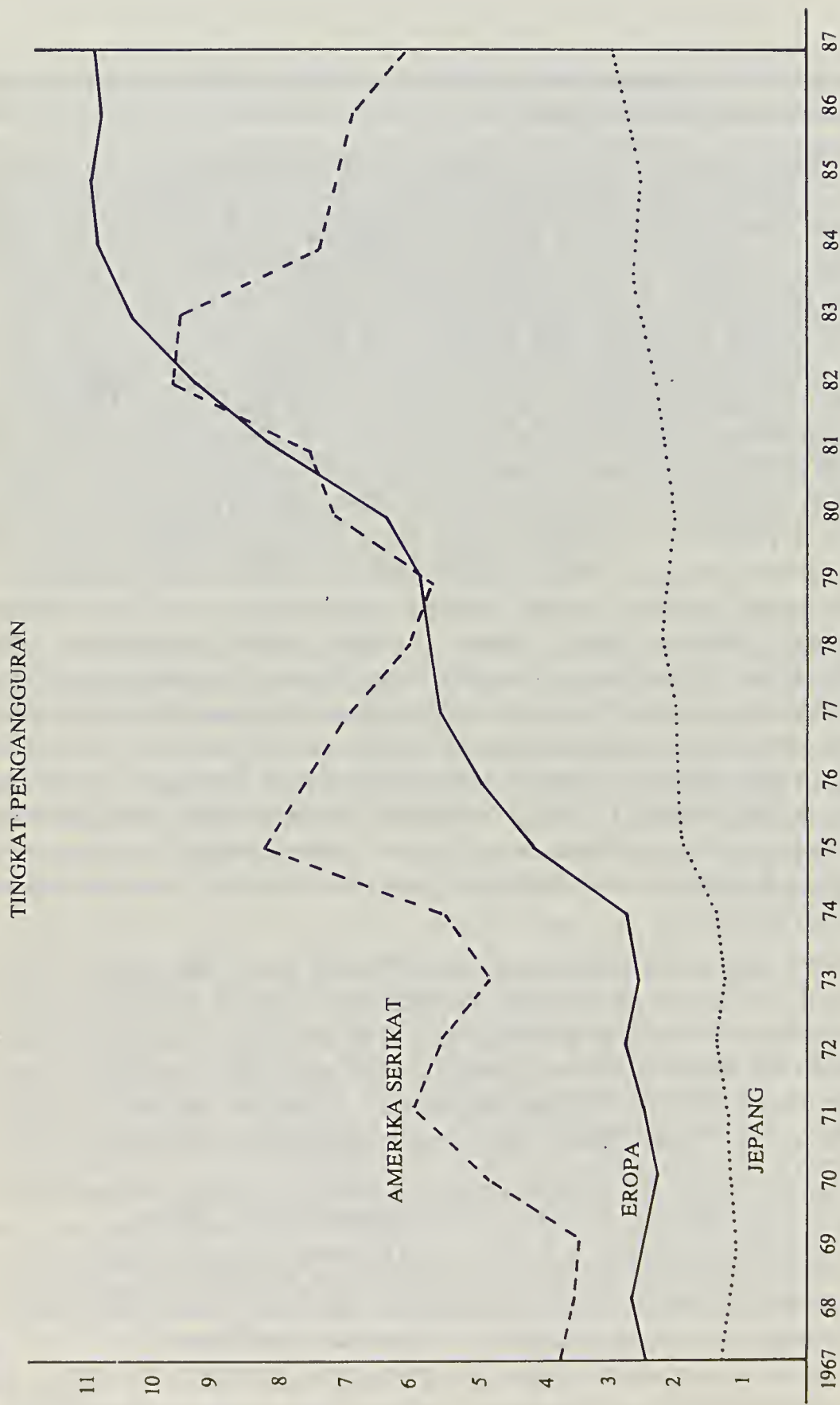
Yang tampaknya perlu dikhawatirkan Eropa adalah persaingan di masa depan karena menurut beberapa indikator seperti jumlah ilmuwan dan lama pendidikan rata-rata, yang terbesar pun di antara anggota-anggota Masyarakat Eropa sudah dilampaui Jepang. Dalam tahun 1981, misalnya, Jepang mempunyai 303 ribu ilmuwan dan insinyur, dibanding 283 ribu di Inggris, Perancis dan Jerman Barat.⁸ Tetapi posisi dalam persaingan teknologi tinggi

⁶Lihat tentang perlombaan oleh Airbus Badiul A. Majumdar, "Upstart or Flying Start? The Rise of Airbus Industries," *The World Economy* (Desember 1987): hal. 497-518.

⁷Lihat Nathan Rosenberg, "U.S. Technological Leadership and Foreign Competition: 'De te Fabula Narratur?'" dalam *The Race for the New Frontier: International Competition in Advanced Technology*, hasil suatu Panel yang diprakarsai oleh *Office of International Affairs National Research Council*, hal. 197-209 (New York: Simon & Schuster, 1984).

⁸Tentang ini dan indikator-indikator lain lihat Daniel I. Okimoto dan Gary R. Saxonhouse, "Technology and the Future of the Economy," dalam *The Political Economy of Japan*, cd. Kozo Yamamura dan Yasukichi Yasuba, jilid 1, hal. 385-419 (Stanford: Stanford University Press, 1987).

Gambar 2



Sumber: Diolah dari OECD Economic Outlook, Desember 1987.

tidak berbanding lurus dengan lama pendidikan dan jumlah insinyur. Walaupun ilmu semakin penting sebagai determinan teknologi, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya saing dalam teknologi tinggi seperti regulasi dalam testing yang memang sering disebut oleh perusahaan-perusahaan Eropa sebagai hambatan terhadap komersialisasi teknologi tertentu, tetapi pada dasarnya juga merupakan perkara besar di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat di mana industri farmasi sangat mengeluh tentang regulasi obat baru.

Atas dasar uraian di atas perlu digarisbawahi bahwa pertumbuhan lemah dan de-industrialisasi bukanlah penyakit unik Eropa. Juga belum dapat dikatakan bahwa Eropa sudah mengalami kekalahan yang tidak tersembuhkan dalam perlombaan teknologi tinggi walaupun dalam beberapa hal seperti teknologi informasi Eropa agak lambat dalam eksploitasi penemuan mereka sendiri.⁹ Maddison,¹⁰ misalnya, tidak menemukan bukti bagi *euro sclerosis*, yaitu istilah yang diperkenalkan oleh Herbert Giersch dari Jerman Barat untuk menguraikan ekonomi Eropa di mana insentif dipotong terus-menerus oleh "negara kesejahteraan" dan fleksibilitas semakin dipersempit oleh regulasi. Tetapi mengatakan bahwa pertumbuhan lemah bukan penyakit unik Eropa tidak berarti bahwa samasekali tidak ada penyakit Eropa.

Gambar 2 memuat pergerakan pengangguran di Masyarakat Eropa, Amerika Serikat dan Jepang sejak tahun 1967. Ada beberapa hal yang menarik dari gambar ini. Pertama adalah kenaikan pengangguran secara umum di ekonomi-ekonomi yang diliput. Itu berarti bahwa pengangguran yang meningkat juga bukanlah penyakit unik Eropa. Bahkan hanya sejak 1981 tingkat pengangguran Masyarakat Eropa jelas melebihi tingkat pengangguran Amerika Serikat. Jepang yang sangat disanjung karena hubungan kerja "kekalnya" juga menunjukkan tingkat pengangguran yang meningkat. Sampai dengan tahun 1987 memang angka pengangguran Jepang memang masih jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat dan Masyarakat Eropa. Tetapi ia dapat naik lagi bersamaan dengan koreksi ketidakseimbangan global yang cepat atau lambat pasti terjadi. Namun demikian, kurva-kurva dalam Gambar 2 menunjukkan perbedaan antara Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat.

Kalau tingkat pengangguran di Amerika Serikat masih mengenal pergerakan ke bawah seperti dalam tahun 1971-1973, tahun 1975-1979 dan 1982-1987,

⁹Tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Inggris misalnya dalam eksploitasi radar dan semi-konduktor lihat misalnya Jill Hills, *Information Technology and Industrial Policy* (London: Croom Helm, 1984).

¹⁰Maddison, "Growth and Slowdown in Capitalist Economies," hal. 649.

tingkat pengangguran Masyarakat Eropa hanya mengenal kenaikan dalam hampir 15 tahun sesudah Kejutan Minyak I. Perbedaan tersebut sangat jelas dalam 5 tahun terakhir. Sementara kebangkitan ekonomi Amerika Serikat disertai oleh penurunan pengangguran yang tajam, kebangkitan yang memang lebih lemah di Masyarakat Eropa hanya dapat menahan pengangguran pada suatu tingkat yang tinggi.

Para ahli berbicara tentang *Nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment* (NAIRU) Eropa yang naik terus, yaitu tingkat pengangguran yang hanya dapat ditekan sementara karena pengaruh inflatoris penekanan tersebut akan memaksa pemerintah kembali ke kebijakan ekonomi makro yang kontraktif. Tetapi kenaikan sekuler tingkat pengangguran ini tidak mudah dijelaskan. Sebagian menjejakinya pada *jobless pay* atau pembayaran yang diterima penganggur dari asuransi pengangguran, tetapi penjelasan ini menurut Gary Burtless dapat diserang dari banyak segi.¹¹ Juga yang dikenal sebagai "aspirasi upah berlebihan" (*excessive wage aspirations*) menurut Charles Schultz hanya menjelaskan bagian yang kecil dari kenaikan pengangguran di Eropa.¹² Karena itu, yang kini dikenal sebagai *hysteresis* diduga merupakan faktor yang penting di belakang tingkat pengangguran yang meninggi di Eropa. Secara umum itu berarti bahwa pengangguran tinggi menghidupkan mekanisme yang mengabadikan pengangguran tersebut. Penganggur, misalnya, tidak mempunyai suara kuat dalam serikat buruh yang memperjuangkan upah yang justru adalah cukup tinggi untuk menyenangkan anggotanya yang bekerja dan tidak sebaliknya cukup rendah untuk mendorong kesempatan kerja baru. Kalau ini terjadi, produsen pada pihaknya juga akan semakin terdorong melakukan substitusi modal untuk tenaga kerja.

Hysteresis tampaknya memang adalah penyakit unik Eropa. Tetapi apakah ia akan menjadi penyakit kronis, masih merupakan pertanyaan terbuka. Barangkali hanya pertanyaan waktu saja, kapan serikat buruh Eropa berhenti mengambinghitamkan pelanggaran hak-hak buruh di negara sedang berkembang sebagai penyebab pengangguran. Pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa upah riel tinggi dan pengangguran tinggi adalah campuran yang mustahil dalam jangka panjang. Tetapi masih ada faktor-faktor lain seperti perubahan struktural produksi dan kemajuan teknologi seperti robot industri

¹¹Lihat Gary Burtless, "Jobless Pay and High European Unemployment," dalam *Barriers to European Growth*, hal. 105-174.

¹²Lihat Schultze, "Real Wages, Real Wage Aspirations and Unemployment in Europe," dalam *ibid.*, hal. 230-302. Aspirasi berlebihan terjadi kalau upah riel yang naik misalnya karena perbaikan dasar pertukaran internasional tidak dapat diturunkan ketika dasar pertukaran tersebut memburuk.

yang bersama faktor-faktor yang disebut di atas menyebabkan pengangguran yang tidak saja tinggi tetapi juga kronis. Menghadapi pengangguran seperti itu bermunculan berbagai gagasan seperti "bagi pekerjaan" (*job sharing*), latihan ulang (*re-training*), subsidi perpindahan pekerja dan kerja pendek. Akses ke "jobless pay" juga dipersulit, dan jumlahnya dikurangi sehingga bekerja lebih menarik kembali daripada menganggur. Tetapi secara keseluruhan, pasar ketenagakerjaan Eropa masih sangat kaku, dibanding misalnya dengan pasar ketenagakerjaan kebanyakan negara-negara Asia. Selama tidak ada keajaiban dalam raihan pertumbuhan, kekakuan ini akan merupakan rintangan yang sangat sulit diatasi dalam pengurangan pengangguran di Eropa.

Hysteresis dapat dianggap sebagai penyakit Eropa yang akan tercermin dalam penurunan daya saing internasional. Bagi banyak ekonom, perkara penurunan daya saing internasional ini tidak kalah pentingnya dari perkara pengangguran. Kenyataan bahwa dalam menghadapi impor tekstil dan pakaian dari negara sedang berkembang atau impor mobil, pesawat TV, dan perekam kaset video dari Jepang, Masyarakat Eropa lari ke kebijakan yang proteksionis adalah indikator yang kuat bagi perburuan daya saing. Tetapi proteksionisme bukanlah penyakit unik Eropa. Walaupun tingkat proteksi barangkali memang berbanding terbalik dengan daya saing internasional, diperlukan indikator lain yang umumnya didasarkan atas statistik perdagangan. Dalam hubungan ini yang sering dikeluhkan adalah stagnasi atau penurunan ekspor di satu pihak dan kenaikan impor di lain pihak, terutama dalam produk-produk teknologi tinggi.

Data perdagangan total Masyarakat Eropa hingga tahun terbaru tidak tersedia, tetapi ekspor OECD ke dan impornya dari Masyarakat Eropa kiranya sudah cukup representatif. Tetapi pertumbuhan ekspor-impor yang di-kandung Tabel 1 memberi kesan bahwa masa sesudah kejutan minyak 1973 dapat dibagi ke dalam dua fase, yaitu 1974-1979 dan 1980-1986. Selama 1974-1979 ekspor OECD ke Masyarakat Eropa tumbuh lebih cepat daripada impornya terutama dalam produk-produk industri (SITC 5, 6, 7, dan 8). Tetapi dalam masa 1980-1986 yang terjadi adalah sebaliknya. Impor OECD dari Masyarakat Eropa tumbuh lebih cepat daripada ekspornya dalam semua kategori seperti dirinci dalam Tabel 1, mulai dari hasil-hasil pangan (SITC 0) sampai produk-produk industri (SITC 7 dan 8), termasuk mesin-mesin perkantoran yang didominasi Amerika Serikat dan kendaraan darat yang didominasi Jepang. Tetapi hal yang sama juga berlaku bagi hasil-hasil pangan di mana impor OECD dari Masyarakat Eropa naik dengan 3,9% per tahun, sementara ekspornya hanya naik dengan 2,6% per tahun.

Tabel 1

PERTUMBUHAN TAHUNAN EKSPOR OECD KE DAN IMPOR OECD
DARI MASYARAKAT EROPA 1974-1979 DAN 1980-1986

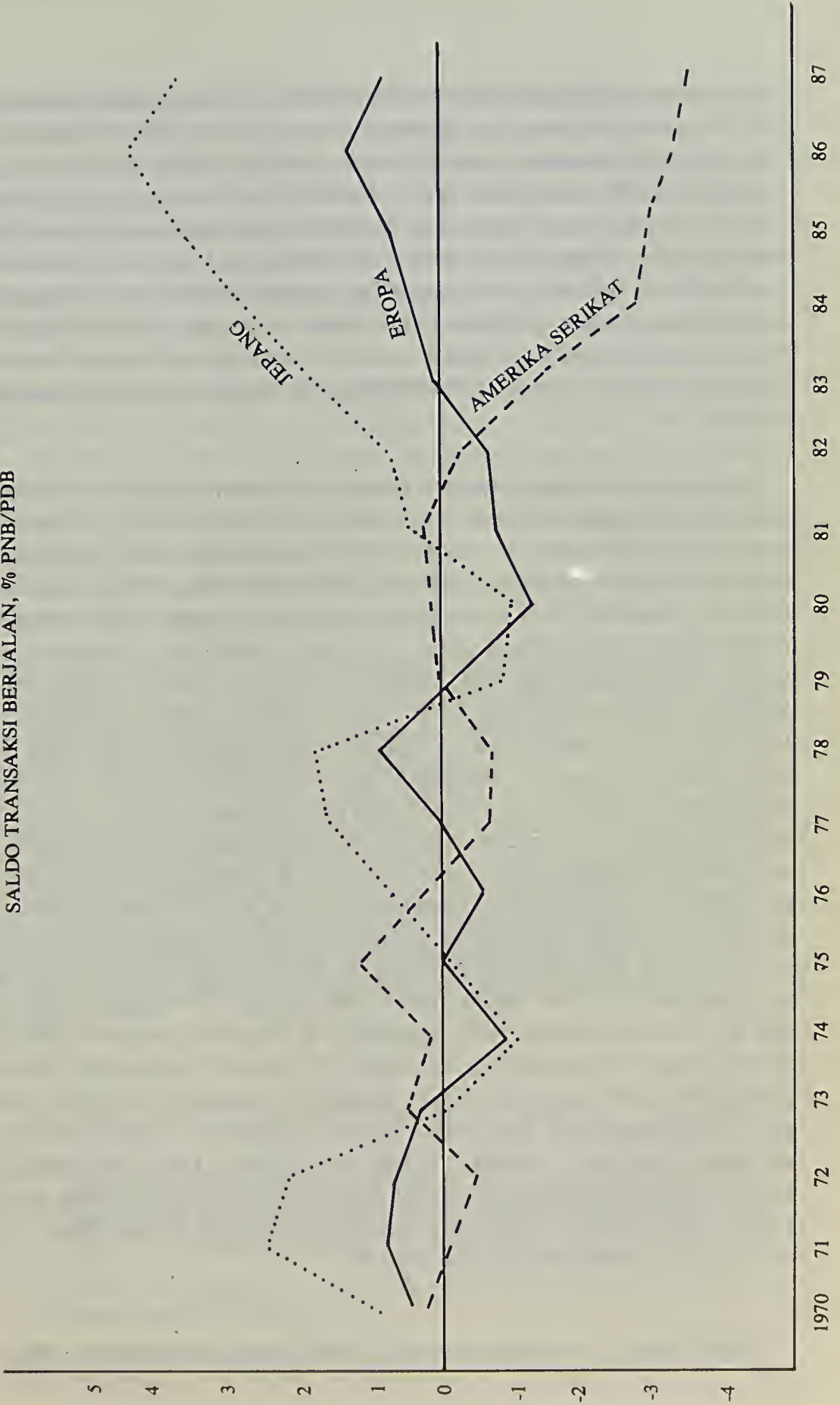
		Ekspor OECD ke Masyarakat Eropa		Impor OECD dari Masyarakat Eropa	
		1974-79	1980-86	1974-79	1980-86
Semua	Komoditi	16,1	2,6	15,6	3,6
SITC	0	14,3	2,0	14,3	3,8
SITC	1	17,8	4,5	18,1	3,9
SITC	2	10,4	-2,4	11,0	2,1
SITC	3	24,3	-3,8	21,3	-4,4
SITC	4	5,3	0,1	5,7	2,2
SITC	5	15,4	4,5	14,4	5,2
SITC	6	13,4	0,7	12,6	1,8
SITC	7	18,3	5,3	17,2	5,9
72	Mesin Khusus	13,8	2,6	13,5	4,6
75	Mesin Perkantoran	22,3	12,6	19,2	13,1
77	Mesin Listrik	19,1	6,3	16,8	6,0
78	Kendaraan Darat	27,8	5,4	22,8	6,5
79	Alat Pengangkutan Lain	10,4	0,6	19,8	3,7
SITC	8	18,6	4,0	17,9	5,8

Sumber: OECD, Foreign Trade by Commodities.

Apa yang terjadi dalam perdagangan Masyarakat Eropa dengan OECD selama 1980-1986 bukanlah suatu bukti penurunan daya saing internasional. Malahan sebaliknya, pengalaman selama masa ini justru memberi kesan bahwa Masyarakat Eropa berhasil memperbaiki daya saingnya. Hanya saja harus diingat bahwa statistik perdagangan tidak sepenuhnya mencerminkan daya saing. Di satu pihak impor dihalangi oleh berbagai hambatan seperti Pembatasan Ekspor Sukarela (oleh pengekspor) dan pengutamaan produksi dalam negeri, sementara ekspor didorong dengan misalnya subsidi ekspor. Tetapi kalau diumpamakan bahwa praktek-praktek proteksionis meningkat dengan kecepatan yang kurang lebih sama di negara-negara OECD, tahun 1980-1986 sudah menyaksikan perbaikan daya saing internasional Masyarakat Eropa dibanding tahun 1974-1979. Kalau transaksi jasa-jasa juga diperhatikan dan saldo neraca transaksi berjalan dihitung sebagai pecahan Produk Na-

Gambar 3

SALDO TRANSAKSI BERJALAN, % PNB/PDB



sional Bruto, tidak dapat dikatakan bahwa keadaan yang dihadapi Eropa adalah lebih buruk daripada yang dihadapi Amerika Serikat. Seperti ditunjukkan oleh Gambar 3, keadaan yang dihadapi Amerika Serikat sejak tahun 1983 adalah jelas lebih buruk. Jika defisit transaksi berjalan dapat dipakai sebagai indikator daya saing internasional, maka pesimisme yang menyelimuti Eropa dalam hubungan dengan daya saing internasionalnya kiranya adalah berlebihan dan dalam beberapa hal mengundang reaksi berlebihan dari pemerintah seperti dalam bentuk kebijakan industri atau penargetan industri. Yang disebut terakhir ini ternyata mewakili bagian yang sangat penting dari prakarsa-prakarsa integrasi yang diambil oleh Masyarakat Eropa dalam tahun-tahun terakhir.

Uraian-uraian di atas memberi pesan pokok bahwa Eropa umumnya dan Masyarakat Eropa khususnya tidak sesakit seperti digambarkan oleh orang-orang Eropa dengan menyebut *arterioscleroris* atau lebih spesifik lagi *eurosclerosis*, dan *hysteresis* sebagai penyakit Eropa. Pelebihi-lebihan ini mungkin dimaksud oleh orang Eropa yang tidak sabar untuk mendorong respon dini, tetapi hasilnya dapat juga reaksi berlebihan. Barangkali yang sangat menghantui Eropa dan, dalam hal ini juga Amerika Serikat, adalah kemajuan Jepang yang luar biasa cepat, walaupun seperti dikatakan oleh Ralph Landau, secara historis pertumbuhan Jepang memang lebih tinggi daripada Amerika Serikat.¹³ Perbandingan pertumbuhan rendah 1980-an ini dengan pertumbuhan tinggi 1950-an juga tidaklah tepat karena tahun 1950-an adalah *golden age* yang secara historis adalah kekecualian seperti ditunjukkan oleh Maddison dalam surveinya yang dikutip di depan. Memang ada indikator-indikator seperti tingkat pengangguran yang secara istimewa memprihatinkan Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa pengeluaran total pemerintah sebagai pecahan produk domestik bruto di Masyarakat Eropa naik terus-menerus dari 35% dalam tahun 1966 menjadi 51% dalam tahun 1984 dan 50,9% dalam tahun 1985, sementara di Amerika Serikat ia naik dari 28,5% dalam 1966 menjadi 36,7% dalam 1985 dan di Jepang dari 19% menjadi 32,7% dalam masa yang sama, adalah suatu pertanda yang kuat bahwa pemerintah-pemerintah Masyarakat Eropa mencampuri ekonomi lebih kuat daripada Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Tetapi ada indikator-indikator seperti tabungan dan saldo neraca transaksi berjalan yang menunjukkan bahwa dalam beberapa hal ekonomi-ekonomi Eropa adalah lebih sehat daripada ekonomi Amerika Serikat.

¹³Ralph Landau, "U.S. Economic Growth," dalam *Scientific American* (June 1988): hal. 26-34.

Pesimisme tentang masa depan Eropa Barat secara umum dan masa depan ekonominya secara khusus mungkin saja memburuk dalam tahun-tahun mendatang. Tetapi bagi negara seperti Indonesia yang sangat memerlukan pasar ekspor, Masyarakat Eropa mewakili pasar yang sangat besar. Dengan Portugal dan Spanyol yang baru masuk, Masyarakat Eropa menghimpun 322 juta penduduk dibanding 240 juta di Amerika Serikat dan 121 juta di Jepang. Produk Domestik Bruto gabungannya dalam tahun 1985 mencapai 2.442 milyar dollar yang memang hanya 62% dari PDB Amerika Serikat, tetapi masih 84% lebih besar daripada PDB Jepang. Menurut perdagangan luar negeri dua arah (ekspor dan impor), Masyarakat Eropa adalah yang terbesar di dunia. Ia mengimpor (dari luar Masyarakat Eropa) barang senilai 334 milyar dollar dalam tahun 1986 atau 281% dari impor Jepang. Memang dengan impor total sebesar 369 milyar dollar dalam 1986, Amerika Serikat dewasa ini adalah pengimpor terbesar di dunia. Tetapi posisi ini dapat berubah setiap waktu dalam jangka pendek menyusul koreksi defisit kembar Amerika Serikat. Adalah Masyarakat Eropa, dan bukan Jepang yang lebih mungkin menggeser Amerika Serikat sebagai pengimpor terbesar di dunia.

Sudah banyak usul-usul tentang penyembuhan dari penyakit apa pun yang sedang diidap Eropa. Inti usul-usul ini adalah fleksibilitas,¹⁴ yang menurut banyak pengamat memerlukan antara lain integrasi lanjutan Eropa. Tanpa yang disebut terakhir sebagai bagian perjalanan panjang Eropa menuju kesatuan ekonomi, politik dan militer, pengaruh kultural, ekonomi dan politik Eropa akan semakin sirna.¹⁵ Tetapi pada kesempatan ini wajar untuk mengajukan pertanyaan tentang langkah-langkah integrasi yang masih diperlukan Eropa mengingat penghapusan tarif dan hambatan kuantitatif serta langkah-langkah integrasi lain seperti Kebijakan Pertanian Bersama yang sudah ditempuh sejak Perjanjian Paris tentang Masyarakat Batubara dan Baja Eropa. Masih akan terasakah dampaknya kalau hambatan-hambatan yang masih tersisa dihapus?

AKTE TUNGGAL EROPA: LONCATAN KECIL MENUJU UNI EROPA

Sudah ribuan tahun lamanya Eropa mengusahakan persatuan, dalam banyak hal bahkan melalui kekerasan dengan korban jiwa dan harta yang tidak terhitung. Gagasan Republik Federal Eropa juga bukan sesuatu yang baru.

¹⁴Lihat misalnya Assar Lindbeck, "What is Wrong with the West European Economies?," dalam *The World Economy* (June 1985): hal. 153-170.

¹⁵Lihat Benhard May, "Ein Revitalisierungsprogramm fuer die EG," dalam *Europa Archiv* (No. 16/1983): hal. 165.

Winston Churchill sudah memidatokannya segera sesudah Perang Dunia II. Setiap kali Eropa atau salah satu anggotanya memulai tahap baru sejarahnya, cita-cita *persatuan Eropa* dikumandangkan kembali dan keperluan akan langkah-langkah baru dinyatakan sebagai acara penting dalam agenda berbagai perkumpulan, terutama partai-partai politik. Pembaruan kemauan dilakukan Masyarakat Eropa seperti ketika memperluas keanggotaan ke Utara dalam 1973 dan ke Selatan dalam 1980-an ini. Yang dicapai memang tidak selalu menakjubkan, tetapi raihan-raihan tersebut membuktikan bahwa integrasi Eropa masih terbuka untuk perluasan dan pendalaman.

Akte Tunggal Eropa (*European Single Act*) yang berisi beberapa perubahan atas Perjanjian Roma dan beberapa persetujuan baru mencanangkan Masyarakat Eropa dengan pasar tunggal pada akhir 1992. Tidak mudah menyebut pencetus Akte Tunggal ini. Tetapi walaupun ia dapat dianggap sebagai sumbangan dari banyak sekali orang, Altiera Spinelli, Hans Dietrich Genscher dan Emilia Colombo sering disebut sebagai yang penting di antara pemrakarsa, sampai Pertemuan Puncak Stuttgart pada pertengahan 1983 mengeluarkan Deklarasi Khidmat (*Solemn Declaration*).¹⁶ Dalam Deklarasi ini disetujui penandatanganan suatu Perjanjian Uni Eropa selambat-lambatnya lima tahun kemudian dan pembentukan suatu panitia ad-hoc (*Komite Dooge*) untuk membahas terutama perubahan-perubahan kelembagaan yang perlu bagi revitalisasi Eropa. Laporan Panitia ini diselesaikan pada akhir 1984 dengan rekomendasi-rekomendasi penting: perumusan konsepsi kesatuan politik yang "tulen," pembentukan wilayah ekonomi yang homogen, pemu-pukan nilai-nilai peradaban bersama, pembentukan identitas politik luar negeri dan penerimaan asas demokrasi sebagai landasan proses pembuatan keputusan dalam Masyarakat Eropa.¹⁷ Yang terakhir ini sangat penting, karena dengan asas mayoritas menggantikan asas mufakat keputusan yang diperlukan oleh Masyarakat Eropa dapat dibuat, tidak saja lebih cepat tetapi juga lebih substantif. Hampir bersamaan, Parlemen Eropa juga memperkenalkan Rancangan Perjanjian Uni Eropa yang tidak saja mengusulkan emansipasi Parlemen Eropa di antara perlengkapan kelembagaan Eropa melalui hak inisiatif dan kekuasaan pengawasan atas Komisi Eropa, tetapi juga konsep-konsep dasar seperti kewargaan Eropa, persamaan hak warga dan perusahaan Eropa, dan Eropa sebagai wilayah hukum tunggal.¹⁸

Dua tahun sesudah Pertemuan Puncak Stuttgart, kepala-kepala negara dalam Pertemuan Milan menyetujui penyelenggaraan Konperensi Pemerintah

¹⁶Teks Deklarasi ini dapat dilihat dalam *Europa Archiv* (No. 15/1983): hal. D420-D427.

¹⁷Lihat *Europa Archiv* (No. 4/1985): hal. D96-D103.

¹⁸Teks lihat *Europa Archiv* (No. 8/1984): D209-D230.

Bagi Persiapan Akte Eropa. Setengah tahun kemudian Akte Tunggal Eropa sudah ditandatangani dan antusiasme Eropa mendapat dorongan besar kembali. Tahun 1992 serta merta menjadi tahun "magis." Ia menarik perhatian banyak sekali orang di banyak sekali penjuru dunia karena pada akhir tahun ini pasar Jerman Barat, Perancis, Inggris, Italia, Benelux, Denmark, Irlandia, Yunani, Spanyol dan Portugal akan menjadi pasar tunggal di mana manusia, perusahaan, barang, jasa-jasa dan modal bebas melintasi perbatasan seraya mendapat perlakuan sama di mana saja pun dalam Masyarakat Eropa.

Bagian yang substantif dari Akte Tunggal Eropa terdiri tujuh sub-bagian.¹⁹ Yang pertama menyangkut institusi yang pada intinya berisi penguatan Komisi Eropa dan Parlemen Eropa dan penerapan asas mayoritas bagi kebanyakan keputusan kecuali yang menyangkut kepentingan vital anggota-anggota dalam mana keputusan dibuat atas dasar mufakat. Yang kedua menyangkut pasar tunggal (*internal market*) yang akan dibahas belakangan. Sub-bagian ketiga menyangkut kebijakan moneter di mana disebut sebagai tujuan akhir uang tunggal Eropa yang diedarkan oleh suatu Bank Sentral Eropa, tentu saja atas dasar kebijakan moneter tunggal. Tetapi tentang langkah-langkah yang diperlukan, Akte Tunggal tidak mengandung hal-hal baru. Negara-negara anggota mengulangi saja komitmen mereka pada konvergensi dalam kebijakan ekonomi dan moneter dengan memperhatikan pengalaman dalam Sistem Moneter Eropa dalam pemasyarakatan penggunaan ECU (*European Currency Unit*) yang memang sudah lebih dari sekedar alat hitung. Pemasyarakatan ini juga perlu bagi perwujudan pasar tunggal, karena distorsi-distorsi juga bisa timbul karena nilai tukar yang "salah."

Kebijakan sosial dapat merupakan sumber yang sangat deras bagi distorsi-distorsi hubungan ekonomi sesama anggota Masyarakat Eropa. Minyak zaitun Italia dapat menang atas minyak zaitun Yunani kalau Italia membantu petaninya melalui kebijakan regional di luar kebijakan bersama. Pengrajin kulit Italia yang sangat mahir dapat kalah dalam persaingan karena industri kulit di salah satu anggota lain diperlakukan sebagai industri sensitif yang menikmati bantuan asal kebijakan sektoral. Kalau *cargo sharing* dan *passenger sharing* yang berlaku dalam pasar pengangkutan Eropa dewasa ini dihapus dan diganti oleh asas *grey hound* (siapa datang duluan, bersantap duluan), perusahaan Italia dapat merebut pangsa pasar misalnya karena mengizinkan rakyatnya bekerja lebih lama dengan upah yang lebih rendah daripada rakyat Jerman misalnya. Distorsi-distorsi lain dapat timbul karena perbedaan dalam sistem jaminan sosial, sistem pendidikan kejuruan dan

¹⁹Teks lihat *Europa Archiv* (No. 6/1986): hal. D163-D182.

unsur-unsur lain kebijakan sosial. Karena itu, pasar tunggal Eropa memerlukan juga kebijakan sosial bersama seperti disinggung dalam sub-bagian keempat dari Akte Tunggal Eropa. Tetapi dalam bidang ini Masyarakat Eropa mempunyai pengalaman yang sangat terbatas saja. Memang ada kebijakan regional seperti bantuan Eropa untuk Eropa Selatan dan pemukiman di pegunungan. Tetapi dalam hal asuransi pengangguran misalnya terdapat perbedaan besar antara Inggris yang tidak menyangkutpautkan santunan dengan pendapatan terakhir sebelum menganggur dan Jerman Barat yang menyangkutpautkan keduanya sehingga membayar santunan yang lebih tinggi sebagai pecahan pendapatan sebelum menganggur. Ini dan perbedaan-perbedaan lain tidak mudah dijembatani.

Sub-bagian kelima dari substansi Akte Tunggal Eropa menyangkut penelitian, teknologi, dan perlindungan lingkungan. Kenyataannya adalah bahwa dalam bidang ini Eropa mengeluhkan ketertinggalan dari Jepang walaupun keluhan tersebut tampaknya didramatisasi. Memang ada kasus-kasus di mana difusi teknologi tampaknya lebih terhambat di Eropa daripada di tempat lain. Pertentangan sosial yang sangat tajam sering terjadi seperti antara Serikat Buruh dan Serikat Pengusaha sebelum komersialisasi teknologi tertentu. Tetapi masih merupakan pertanyaan apakah ketertinggalan relatif Eropa dalam beberapa industri primer adalah ketertinggalan teknologi. Namun demikian, "integrasi teknologi" atau "Eropa Teknologi" sebagaimana ia sering disebut, merupakan tiang yang sangat penting dari Eropa purna Akte Tunggal. Bagaimanapun kurangnya bukti-bukti empiris, Eropa menganggap fragmentasi pasar dan sumber-sumber sebagai sebab terpenting dari ketertinggalan teknologis mereka,²⁰ di samping kekurangan kebijakan penelitian dan pengembangan. Karena itu, Akte Tunggal Eropa menekankan dukungan Masyarakat Eropa bagi kegiatan penelitian dan pengembangan yang diemban oleh perusahaan, pusat penelitian dan perguruan tinggi dan bagi kerjasama sesama mereka. Untuk maksud terakhir ini disebut sebagai instrumen terpenting pembukaan pembelian pemerintah bagi setiap pelelang dari Masyarakat Eropa, penentuan standar bersama dan penghapusan hambatan-hambatan pajak, di samping program-program bersama dalam rangka EUREKA (*European Research Co-ordinating Agency*), yang menawarkan tidak terbilang proyek-proyek penelitian dan pengembangan, ESA (*European Space Agency*) dan Prakarsa Pertahanan Strategis Eropa, dengan atau tanpa partisipasi negara ketiga.

²⁰Argumen ini hanya dapat dipertahankan kalau pasar dunia tidak jauh lebih besar daripada pasar Eropa. Dan karena yang benar adalah bahwa pasar dunia jauh lebih besar, fragmentasi pasar Eropa dapat diimbangi dengan pasar bukan Eropa.

Di dalam Akte Tunggal juga disinggung Parlemen Eropa dan Kerjasama Politik Eropa. Yang terakhir ini secara khusus menyangkut politik luar negeri dengan politik luar negeri tunggal sebagai tujuan jangka panjang dan harmonisasi dan konsultasi sebagai langkah-langkah pendahulu. Tetapi kerjasama ini masih jauh lebih lemah daripada integrasi ekonomi. Masyarakat Eropa memang sudah sering mengeluarkan pernyataan politik, terutama kalau ada yang dapat dikutuk seperti apartheid dan terorisme internasional. Tetapi substansi politik luar negeri masih di tangan pemerintah-pemerintah nasional, sebagaimana substansi keamanan masih tetap di tangan pemerintah nasional walaupun Uni Eropa Barat (*Western European Union*) sedang direaktivasi atau walaupun bekas Kanselir Helmut Schmidt pernah mengusulkan pembentukan angkatan bersenjata Eropa.

PASAR TUNGGAL PURNA 1992

Sebagaimana sudah disinggung di depan, hambatan-hambatan perdagangan tradisional terutama tarif dan kuota, sudah tidak ada dalam perdagangan sesama anggota Masyarakat Eropa. Yang masih ada dalam perdagangan anggota-anggota baru dengan yang lama akan sudah hapus dalam 1992 walaupun ada yang meragukan apakah Spanyol dan Portugal dapat menepati jadwal penghapusan tarif atas impor dari Masyarakat Eropa dan penyesuaian dengan tarif eksternal bersama.²¹ Dalam banyak hal terutama pertanian, Masyarakat Eropa sudah mempunyai kebijakan bersama. Namun demikian Masyarakat Eropa masih jauh dari pasar tunggal. Karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa prioritas Akte Tunggal Eropa adalah penyempurnaan pasar tunggal. Dan dalam bagian inilah program implementasi sudah mulai jelas. Suatu ruang ekonomi tanpa perbatasan di dalamnya sepanjang menyangkut lalu lintas barang, manusia, jasa dan modal adalah tujuan yang hendak dicapai pada akhir 1992 melalui Akte Tunggal. Sering juga ia disebut sebagai ruang tanpa pemeriksaan perbatasan yang sampai sekarang memang sering disalahgunakan untuk menghambat impor dari sesama anggota Masyarakat Eropa.

Tujuan pembentukan pasar tunggal pada akhir 1992 adalah sesuatu yang ambisius. Yang diperlukan bagi pencapaian tujuan ini adalah jauh lebih luas dan rumit daripada sekedar penghapusan pemeriksaan perbatasan. Kalau yang dilakukan oleh Masyarakat Eropa dalam 10 tahun pertama sesudah pe-

²¹Lihat misalnya Heinz Stadlmann, "Die Suederweiterung der Europaeischen Gemeinschaft," dalam *Europa Archiv* (No. 5/1986): hal. 129-136.

nandatanganan Perjanjian Roma adalah penghapusan hambatan-hambatan *di perbatasan*, yang harus mereka lakukan selama hanya tujuh tahun sesudah penandatanganan Akte Tunggal di Luxemburg pada dasarnya adalah penghapusan hambatan-hambatan yang ada *dalam* ekonomi-ekonomi anggota.²² Dan ternyata hambatan-hambatan seperti itu masih sangat banyak dan dalam banyak hal mereka melayani tujuan-tujuan yang tidak dapat secara jelas disebut sebagai tujuan proteksionis.

Harmonisasi pajak-pajak merupakan tantangan berat pertama. Seliter alkohol murni memikul pajak sebesar 24,83 ECU di Inggris, 11,94 ECU di Perancis dan 0,48 ECU di Yunani sehingga akan sangat menguntungkan misalnya kalau orang Inggris membeli alkohol di Yunani. Distorsi serupa juga bisa timbul karena perbedaan tingkat Pajak Nilai Tambah (PNT) yang juga menyolok. Tingkat baku PNT berkisar dari 12% di Spanyol, 18,6% di Perancis, 22% di Denmark, sampai 25% di Irlandia.²³ Belum dibicarakan perbedaan struktur pajak yang sedikit banyak dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi yang terkadang terlalu sensitif untuk disinggung.

Tantangan kedua terletak dalam jasa-jasa keuangan yang memainkan peran penting, baik sebagai sumber pertumbuhan maupun sebagai sumber lapangan kerja, terutama kalau "de-industrialisasi" yang disinggung di depan berlanjut. Tujuan yang hendak dicapai dalam sektor ini adalah kebebasan lalu lintas modal yang berarti antara lain sistem devisa yang bebas sepenuhnya dan Eropa-isasi pasar modal seperti bursa saham, kebebasan lembaga keuangan untuk menjual jasa keuangan dari lokasi perusahaannya ke pembeli di setiap tempat dalam Masyarakat Eropa, dan hak setiap lembaga keuangan untuk membuka usaha di mana pun di Masyarakat Eropa.

Kelompok ketiga dari tantangan yang akan dihadapi Eropa dalam perwujudan pasar tunggal menyangkut aneka ragam standar nasional, baik standar teknis, standar keamanan (*safety*), maupun standar kesehatan. Sebaik-baik mesin buatan Italia, ia harus memenuhi DIN Jerman kalau dijual di sana. Masalah timbul karena perbedaan antara standar-standar nasional. Jerman misalnya terkenal sangat ketat dalam hal standar teknis dan keamanan. Orang berpendapatan rendah pun yang mau berkompromi dalam hal keamanan, tidak akan mendapat kendaraan sub-standar misalnya. Selama ini pemecahan yang ditempuh adalah penyesuaian produksi sehingga memenuhi standar di mana produk yang bersangkutan hendak dijual. Tetapi penyesuaian ini menimbulkan biaya yang tinggi. Karena itu, atas dasar Akte Tunggal sedang diusahakan standar Eropa yang berlainan dengan bea masuk, tentu tidak

²²Suatu survei yang baik dilakukan oleh *The Economist*, 9-15 Juli 1988.

²³*Ibid.*

berupa rata-rata standar nasional. Penentuan standar-standar ini akan memerlukan waktu panjang dan barangkali sering akan kadaluwarsa sebelum selesai karena kemajuan cepat dalam teknologi. Namun perlu diingat bahwa standar Eropa tidak menghilangkan standar nasional. Lembaga-lembaga standar nasional seperti TÜV Jerman bebas memperketat standar yang berlaku di wilayahnya.

Masalah-masalah rumit juga ada dalam pasar muatan darat Eropa yang harus diselesaikan agar pasar tunggal dapat dibentuk. Sampai sekarang dalam pasar ini masih ada pembatasan kuantitatif seperti ijin pengangkutan yang dinyatakan dalam ton/kilometer hasil perundingan bilateral. Padahal, dalam pasar tunggal, setiap pengangkut akan bebas menyangkut berapa saja muatan di mana saja dalam Masyarakat Eropa. Masalah serupa juga ada dalam pasar muatan udara dan penumpang udara sesuai persetujuan internasional.

Akhirnya, tidak ada pasar tunggal selama masing-masing pemerintah di Masyarakat Eropa menyisihkan perusahaan-perusahaan bukan nasional dalam pembelian pemerintah. Secara formal, sudah ada kewajiban di pihak pemerintah untuk menenderkan pembelian besarnya secara regional dalam arti memberi peluang bagi penawar dari negara-negara anggota lain. Tetapi sampai sekarang bagian pembelian pemerintah yang dimenangkan oleh bukan-nasional masih sangat kecil. Dengan kata lain, pemerintah-pemerintah nasional masih turut memecah-belah masyarakat bisnis Eropa yang sudah terlalu terpecah-pecah untuk dapat menghadapi raksasa Jepang dan Amerika Serikat. Selama pemerintah masih mengutamakan perusahaan nasional dalam pembeliannya yang dalam hal-hal tertentu merupakan pasar satu-satunya bagi barang tertentu, pemaduan sumber penelitian dan pengembangan terhalang.

OPTIMISME LUNAK

Rudolf Hrbek dan Thomas Laeufer menyatakan bahwa melalui Akte Tunggal Eropa, tidak dapat diharapkan keberhasilan besar dalam arti "loncatan besar." Yang akan terjadi menurut mereka adalah proses integrasi yang sangat lamban.²⁴ *The Economist* yang sudah dikutip di depan juga menyimpulkan antara lain bahwa pada akhir 1992 tidak ada *Big Bang* di Eropa. Pembacaan yang lebih seksama akan menunjukkan betapa banyak kompromi yang harus masuk ke dalam Akte Tunggal Eropa yang membuka peluang untuk mengundurkan lagi langkah-langkah integrasi tegar yang diperlukan

²⁴Lihat artikel mereka, "Die Einheitliche Europäische Akte. Das Luxemburger Reformpaket: Eine neue Etappe im Integrationsprozess," *Europa Archiv* (No. 6/1986): hal. 183.

Eropa. Kalaupun dalam bab yang menyangkut pasar tunggal ada bagian-bagian yang sangat berani karena menyentuh sendi-sendi penting dari negara nasional, orang yang memang bukan optimis dalam hal Eropa masih dapat mengatakan bahwa di waktu-waktu lalu pun sudah banyak rencana besar Eropa seperti Laporan Leo Tindemann mengenai uni politik dan Rancangan Werner mengenai ekonomi, yang menimbulkan antusiasme singkat, tetapi ibarat api jerami sebentar saja sudah tinggal abu.

Yang lebih optimis tentu dapat mengatakan bahwa keberhasilan-keberhasilan besar juga pernah ditunjukkan Eropa pada saat-saat yang sepiintas lalu, tampak tidak menguntungkan. Belum lama ini juga Eropa menunjukkan keberhasilan misalnya dalam program Airbus dan ESA yang memang tidak melibatkan semua anggota. Tokoh-tokoh pergerakan Eropa masih dapat mengacu pada rakyat yang dalam beberapa hal mungkin kecewa, tetapi secara keseluruhan masih mendukung proyek Eropa.²⁵

Sebagaimana sudah disinggung di depan, Eropa umumnya dan Masyarakat Eropa khususnya memang mengalami kesukaran dalam melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan bagi revitalisasi ekonomi seperti reformasi Kebijakan Pertanian Bersama. Sesuai itu, tidak ada alasan apriori untuk mengatakan bahwa Akte Tunggal akan menikmati kemauan politik yang jauh lebih kuat. Dengan kata lain, optimisme tidak mempunyai dasar yang kuat. Tetapi respon yang ditunjukkan oleh masyarakat bisnis seperti tercermin dalam pembelian perusahaan di negara anggota lain untuk dijadikan basis dalam pasar tunggal menyarankan bahwa 1992 mungkin akan menjadi permulaan baru bagi Masyarakat Eropa. Pemerintah-pemerintah Eropa Barat pun, terutama Masyarakat Eropa, tidak dapat meremehkan bahwa Gorbachev dan Deng Tsiao Ping sedang mengupayakan permulaan baru dan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menentang "gravitasi ekonomi" yang lambat-laun akan disusul oleh "gravitasi politik" Pasifik. Dengan kata lain, pemerintah-pemerintah Eropa sedang menghadapi tekanan yang kuat untuk melaksanakan secara konsisten sesedikitnya yang mereka setuju dalam Akte Tunggal Eropa.

Hubungan ekonomi eksternal dari Masyarakat Eropa pada dasarnya tidak disentuh secara langsung dalam Akte Tunggal Eropa. Ia akan tetap ditandai oleh aneka ragam perjanjian preferensial yang berbeda-beda menurut margin preferensinya. Tetapi pasar tunggal Eropa akan berarti persaingan yang menajam dan negara ketiga pun perlu merevisi strategi kehadirannya di Masyarakat Eropa.

²⁵Lihat kutipan dari *Euronarometer* oleh John Pinder, "Die Europaeische Gemeinschaft in den Neunziger Jahren," *Europa Archiv* (No. 18/1987): hal. 514-515.

Ringkasan Peristiwa ASEAN

DEKLARASI ASEAN DAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

I. KTT MANILA

- A. Persiapan KTT ASEAN III
- B. Pembicaraan Selama KTT
- C. Deklarasi Manila

F. Usaha Menanggulangi Bahaya Narkotika

G. Proyek Baru Kebudayaan

II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN

- A. Kerjasama Makanan, Pertanian dan Kehutanan
 - 1. Penanaman Modal Perikanan
 - 2. Kerjasama Produsen Karet
 - 3. Pembibitan Rotan
- B. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
 - 1. Rencana Peningkatan Pariwisata
 - 2. Usaha Menghapuskan Hambatan Nontarif

C. Kerjasama Energi ASEAN

D. Kerjasama Penerbangan

E. Sidang Komisi Ilmu dan Teknologi

III. PERGANTIAN SEKNAS ASEAN

IV. KERJASAMA PARLEMEN

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. ASEAN-AS
- B. ASEAN-Kanada
- C. ASEAN-MEE
- D. ASEAN-Jepang
- E. ASEAN-Australia

VI. HUBUNGAN ASEAN-PARLEMEN EROPA

VII. HUBUNGAN DAGANG ASEAN-RRC

I. KTT MANILA

A. PERSIAPAN KTT ASEAN III

Pertemuan Puncak (KTT) ASEAN III yang dihadiri oleh Sultan Brunei, Hossanal Bolkiah, Presiden RI, Soeharto, PM Malaysia, Mahathir Mohamad, PM Muangthai, Prem Tinsulanonda, Presiden Filipina, Corazon Aquino dan PM Singapura, Lee Kuan Yew, berlangsung di Manila tanggal 14-15 Desember 1987 untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya.

KTT ini dipersiapkan secara matang selama 18 bulan, dan untuk itu pada bulan Juli 1986 dibentuk HLSC (*High Level Steering Committee*) untuk mempersiapkan substansi KTT ASEAN III. HLSC bersidang 17 kali dan membentuk 15 subkomite untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam KTT.

Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 16 Desember 1987 bahwa: (1) Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan diajukan ke KTT Manila; (2) persiapan itu dilakukan secara sangat terbuka dan tidak hanya dipersiapkan oleh para birokrat, tetapi melibatkan pula kalangan swasta, perguruan tinggi, pengamat politik dan kalangan masyarakat lainnya; (3) langkah Indonesia ini diikuti pula oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Mereka juga menampung berbagai pikiran masyarakat (*Kompas*, 17-12-1987).

Pembicaraan mengenai rencana peningkatan kerjasama ekonomi di antara negara anggota ASEAN berjalan lancar, sedangkan mengenai politik dan keamanan regional, khususnya tentang kemandirian ASEAN, berlangsung cukup alot (*Suara Karya*, 19-11-1987). Hal ini antara lain tampak dalam Sidang HLSC di Bali yang berlangsung tanggal 18-20 November 1987. Tersiar berita mengenai perbedaan pandangan antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dan Malaysia menekankan perlunya kemandirian ASEAN yang berarti tidak menggantungkan diri pada kekuatan asing mana pun, sehingga pertimbangan kekuatan adidaya di kawasan Asia Tenggara tidak perlu dibicarakan (*Suara Karya*, 19-11-1987). Sehubungan dengan masalah ini, Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kepada para wartawan di Denpasar tanggal 20 November 1987 bahwa ASEAN harus mandiri dalam segala hal, baik politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. ASEAN mandiri berarti ASEAN tidak menggantungkan diri pada kekuatan negara lain, tetapi mengharuskan kerjasama di antara negara-negara maupun kerjasama regional di berbagai bidang (*Antara*, 21-11-1987). ASEAN tidak akan menyatakan pendapatnya tentang kehadiran pangkalan militer AS di Filipina. Ini sesuai dengan prinsip ASEAN. ASEAN bukan merupakan kerjasama militer. Tetapi setiap negara anggota ASEAN bebas menyatakan pendapatnya masing-masing (*Suara Karya*, 21-11-1987).

Sementara itu, situasi keamanan di Filipina, khususnya Manila, telah pula menimbulkan keragu-raguan di antara para pemimpin ASEAN untuk menghadiri KTT ASEAN III. Bahkan timbul pikiran pada beberapa pemimpin ASEAN untuk menunda atau memindahkan KTT itu ke Muangthai (*Kompas*, 2-12-1987). PM Lee Kuan Yew mengatakan pada pembukaan KTT itu bahwa: (1) jika pertimbangan keamanan tidak dilampaui oleh semangat solidaritas ASEAN, para pemimpin ASEAN tidak akan berada di Manila sekarang ini (*Suara Karya*, 15-12-1987); (2) para penasihat keamanannya pernah menganjurkan kepadanya untuk tidak menghadiri KTT ASEAN

III di Manila (*Kompas*, 16-12-1987). Keragu-raguan itu juga muncul dari sebagian rakyat keenam negara anggota ASEAN. Presiden Soeharto sendiri menerima banyak surat dari Orpol, Ormas dan anggota masyarakat lainnya, yang meminta untuk tidak menghadiri KTT ASEAN III karena alasan keamanan (*Kompas*, 16-12-1987).

Keragu-raguan itu hilang oleh keputusan Presiden Soeharto untuk menghadiri KTT ASEAN III di Manila. Presiden Soeharto adalah pemimpin negara anggota ASEAN yang pertama yang menyatakan akan hadir pada KTT ASEAN di Manila (*Suara Karya*, 15-12-1987). Penegasan ini disampaikan ketika ia mengadakan pembicaraan dengan PM Lee Kuan Yew di Pulau Batam tanggal 29 November 1987. Presiden Soeharto mengatakan kepada para wartawan di Pulau Batam tanggal 29 November 1987 itu bahwa kita semua merasa bertanggungjawab agar KTT berjalan baik, walaupun di sana-sini ada risiko. Risiko harus diatasi untuk menunjukkan bahwa di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara terjalin kesetiakawanan, baik ke dalam maupun ke luar Asia Tenggara (*Suara Karya*, 30-11-1987).

Pengakuan atas ketegasan Presiden Soeharto itu juga dinyatakan secara terbuka oleh PM Lee Kuan Yew ketika menyampaikan pidato pada pembukaan KTT ASEAN itu. PM Lee Kuan Yew mengatakan bahwa sikap tegas Presiden Soeharto untuk menghadiri KTT itu kemudian diikuti oleh para pemimpin ASEAN lainnya. Presiden Soeharto tidak pernah ragu-ragu untuk melaksanakan komitmen pada solidaritas ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

Untuk menunjukkan tanggungjawabnya itu, Indonesia mengirimkan pasukan keamanan dan satuan tugas Angkatan Laut. Presiden Soeharto mengatakan bahwa pengiriman pasukan keamanan dan satuan tugas Angkatan Laut RI itu bukan semata-mata untuk pengamanan dirinya, tetapi karena rasa tanggungjawab bagi suksesnya KTT ASEAN di Manila (*Merdeka*, 16-12-1987).

B. PEMBICARAAN SELAMA KTT

Pada acara pembukaan KTT itu Sultan Bolkiah dari Brunei mengemukakan bahwa generasi muda ASEAN perlu diberi penerangan mengenai masalah ASEAN agar memiliki pengetahuan tentang organisasi ini. Di samping itu, perlu diadakan pertukaran pelajar di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya Sultan Brunei mengatakan bahwa keamanan dan stabilitas harus merupakan tujuan utama, oleh karena itu masalah Kamboja harus segera diselesaikan (*Kompas*, 15-12-1987).

Pada acara yang sama, Presiden Soeharto mengatakan: (1) ASEAN harus menghindari program kerjasama yang ambisius yang dapat mengorbankan kepentingan salah satu atau beberapa anggotanya; (2) meskipun kerjasama ekonomi, khususnya bidang perdagangan melalui PTA (*Preferential Trading Arrangement* atau Persetujuan Preferensi Perdagangan) dan industri melalui AIJV (*ASEAN Industrial Joint Venture* atau Industri Patungan ASEAN), telah mengalami kemajuan, ASEAN agar tetap memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi serta perbedaan ekonomi di antara para anggotanya; (3) untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota ASEAN serta menghadapi situasi dan perkembangan dunia, ASEAN agar melengkapi dan menyempurnakan strategi yang telah digariskan; (4) sebagai wadah kerjasama regional, ASEAN harus memiliki orientasi global yang memperhatikan setiap kejadian dan peristiwa dunia, karena setiap peristiwa penting dunia langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak atas perkem-

bangsan ASEAN; (5) persaingan pengaruh antara negara-negara besar dapat menimbulkan ketegangan politik, oleh karena itu bangsa-bangsa Asia Tenggara harus mencari upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasannya; (6) kesepakatan ASEAN untuk mengembangkan dan mewujudkan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara sebagai salah satu komponen penting ZOPFAN merupakan perkembangan penting untuk kerjasama politik (*Kompas*, 15-12-1987); (7) realisasi ZOPFAN sangat penting bagi stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara dan akan lebih menjamin kesinambungan, kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional masing-masing negara di Asia Tenggara (*Merdeka*, 15-12-1987).

PM Mahathir Mohamad mengemukakan perlunya keterbukaan dan penghapusan hambatan-hambatan di antara negara ASEAN, sehingga perdagangan antar mereka dapat meningkat. Selanjutnya PM Malaysia itu mengatakan bahwa: (1) ASEAN yang kaya sumberdaya alam harus mampu menjadi pusat pertumbuhan di masa yang akan datang; (2) ASEAN harus mampu memecahkan masalah ekonomi regional untuk mengatasi situasi ekonomi dunia, dan kebersamaan ASEAN merupakan suatu kekuatan yang besar untuk menghadapi negara-negara industri maju. Mengenai keamanan kawasan Asia Tenggara, PM Mahathir Mohamad mengatakan bahwa: (1) tercapainya kesepakatan mengenai ZOPFAN merupakan tujuan utama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara; (2) jika negara-negara besar menginginkan tetap berlangsungnya perdamaian di kawasan Asia Tenggara, mereka harus meningkatkan bantuannya (*Kompas*, 15-12-1987); (3) Asia Tenggara untuk rakyat Asia Tenggara. Malaysia menolak kemungkinan ASEAN berkembang menjadi suatu persatuan keamanan kolektif, regional atau persekutuan militer (*Merdeka*, 15-12-1987).

PM Prem Tinsulanonda menekankan pentingnya penyelesaian masalah Kamboja, karena Kamboja berbatasan langsung dengan negaranya. Sikap Vietnam yang tidak bersedia bertemu dengan Pangeran Norodom Sihanouk merupakan sikap politik yang tidak realistis. Selanjutnya dia mengatakan bahwa: (1) kehadiran dan persaingan empat kekuatan besar, yakni AS, Uni Soviet, Jepang dan RRC di Asia Tenggara, merupakan hambatan untuk menumbuhkan ZOPFAN; (2) industrialisasi di ASEAN sekarang ini dapat dipergunakan sebagai sarana terbaik untuk melanjutkan kerjasama ekonomi ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

PM Lee Kuan Yew sangat memuji peranan Presiden Soeharto yang dikatakannya sebagai Pendekar Solidaritas ASEAN. Selanjutnya ia mengatakan bahwa: (1) keputusan Presiden Soeharto untuk menghadiri KTT III ASEAN itu merupakan faktor utama suksesnya KTT tersebut. Sikap yang demikian itu juga mencerminkan keinginannya agar para pemimpin ASEAN menunjukkan kesatuan dukungan ASEAN terhadap kepemimpinan Presiden Corazon Aquino yang sedang mengalami banyak cobaan (*Suara Karya*, 15-12-1987); (2) ASEAN perlu memikirkan kembali situasi dirinya, karena dunia telah mengalami perubahan-perubahan; (3) langkah-langkah untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat harus segera diambil; (4) negara-negara anggota ASEAN agar tetap menjaga persatuan nasional untuk melawan komunis dan tindakan lain yang berusaha memecah-belah rakyat atas dasar perbedaan suku, bahasa ataupun agama; (4) kemajuan di bidang PTA dan AIJV merupakan bukti peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

Presiden Corazon Aquino mengatakan bahwa: (1) stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara merupakan faktor yang sangat penting untuk melaksanakan kerjasama ekonomi; (2) letak geografi Filipina yang strategis, yakni jauh dari Semenanjung Indocina, menjadikannya bebas dari ancaman negara mana pun, kecuali dalam perang global antara adikuasa. Bahkan Viet-

nam yang mempunyai kekuatan angkatan bersenjata keempat di dunia bukan merupakan ancaman bagi Filipina; (3) negaranya telah berperanan untuk memberi sumbangan guna mengamankan udara dan lautan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Pengamanan itu penting karena wilayah itu merupakan jalur utama untuk menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi; (4) pembangunan ekonomi merupakan tujuan ASEAN, tetapi hasil akhir yang diinginkan adalah perdamaian abadi di ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

C. DEKLARASI MANILA

KTT Manila diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Manila 1987, empat perjanjian dan sebuah *Memorandum of Understanding* tentang peningkatan kerjasama ekonomi.

Deklarasi itu menegaskan kembali prinsip-prinsip ASEAN dan menetapkan arah kerjasama ASEAN yang lebih progresif dan terpadu. Deklarasi yang meliputi kerjasama politik, kerjasama ekonomi, hubungan dengan mitra wicara (*dialogue partners*), kerjasama fungsional dan mekanisme kerjasama ASEAN itu menyatakan antara lain bahwa: (1) pertentangan yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus dipecahkan dalam kerangka Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan di Asia Tenggara serta Piagam PBB; (2) setiap negara anggota ASEAN bertanggungjawab atas keamanannya sendiri, namun demikian kerjasama keamanan dengan negara di luar ASEAN dapat diteruskan untuk kepentingan masing-masing; (3) berbagai usaha untuk mewujudkan ZOPFAN di Asia Tenggara akan terus dilanjutkan, dan sebagai langkah pertama untuk mencapainya kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu harus menjadi kawasan yang bebas dari segala jenis senjata nuklir; (4) masalah Kamboja harus terus-menerus ditangani dan dicarikan penyelesaian yang paling baik. Sikap Vietnam yang menyambut baik usaha ASEAN diharapkan menghasilkan pemecahan yang terbaik; (5) ASEAN agar terus mengembangkan kerjasama industri dan pembangunan dengan negara-negara Pasifik; (6) ASEAN sepakat untuk meningkatkan jumlah barang yang masuk PTA (Perjanjian Preferensi Perdagangan), dan mengurangi barang-barang yang termasuk kekecualian (*exclusion list*); (7) pengurangan tarif bea masuk untuk barang-barang produksi ASEAN agar terus dilanjutkan. Usaha ini dilakukan untuk memperluas perdagangan antar negara ASEAN; (8) hambatan non-tarif terhadap impor (*Non Tariff Barrier* - NTB) harus dihentikan, dan negosiasi masalah NTB ini harus segera dilakukan setelah KTT III ini; (9) proses persetujuan proyek industri dalam AIJV agar lebih dipermudah, sehingga proyek AIJV dapat meningkat jumlahnya, karena pengusaha swasta tampaknya semakin tertarik pada proyek tersebut; (10) ASEAN sepakat untuk mendirikan perusahaan Reasuransi ASEAN paling lambat tahun 1988; (11) penggunaan mata uang ASEAN untuk mempermudah perdagangan antar negara anggota ASEAN akan diusahakan; (12) pajak berganda, efisiensi administrasi pajak dan bea cukai harus segera diatur; (13) ASEAN agar bekerjasama dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan pasaran komoditi mereka; (14) industri yang berdasarkan kekayaan alam ASEAN harus dikembangkan; (15) perjalanan antar ASEAN dan industri pariwisata ASEAN agar dikembangkan. Sehubungan dengan ini tahun 1992 yang merupakan ulang tahun ke-25 ASEAN diusahakan sebagai Tahun Wisata ASEAN (Kunjungan Tahun ASEAN); (16) kerjasama energi harus terus dilanjutkan, termasuk perencanaan energi, pertukaran informasi, riset dan pengembangan eksplorasi, dan sebagainya; (17) kerjasama perhubungan dan komunikasi agar terus dikembangkan, dan untuk itu ASEAN agar terus mempelajari *Brokers Telegraph System*, *Inter ASEAN Bulk Pool System*, pelayanan pelayaran point to point, dan sebagainya; (18) kerjasama pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN harus diarahkan sesuai dengan peningkatan standar hidup di bidang pertanian dan kehutanan ASEAN. Di samping itu perlu diusahakan penyamaan

struktur pertanian dan kehutanan di ASEAN; (19) dalam dialog ASEAN dengan Australia, Selandia Baru, Jepang, MEE, AS dan Kanada, masing-masing anggota ASEAN agar menekankan perlunya peningkatan pasar, perdagangan, promosi pariwisata, investasi, alih teknologi, pengembangan sumberdaya alam dan sebagainya; (20) struktur organisasi ASEAN agar terus ditingkatkan, dengan menekankan efisiensi; (21) kerjasama ASEAN akan diperluas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (*Kompas*, 16-12-1987).

Empat perjanjian dan sebuah *Memorandum of Understanding* itu meliputi: (1) protokol perubahan atas Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang ditandatangani oleh para Menlu ASEAN. Perubahan ini dilakukan untuk memungkinkan Papua Nugini (PNG) ikut menandatangani perjanjian kerjasama di Asia Tenggara dengan seijin negara Asia Tenggara yang menandatangani perjanjian itu dan Brunei; (2) peninjauan kembali atas AIJV yang ditandatangani oleh para Menlu ASEAN. Ini memungkinkan pihak swasta dan perusahaan-perusahaan patungan untuk melaksanakan kerjasama dalam AIJV tersebut; (3) persetujuan mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal, yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi; (4) protokol mengenai Penyempurnaan Perluasan Tarif Preferensi berdasarkan PTA, yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi, dan (5) *Memorandum of Understanding* mengenai Penghapusan atau Pengurangan Hambatan-hambatan terhadap Perdagangan antar negara anggota ASEAN, yang ditandatangani pula oleh para Menteri Ekonomi.

Seusai KTT itu, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan pernyataan pers bersama, yang sebagian besar berisi penekanan peningkatan kerjasama ekonomi. Para Kepala Pemerintahan ASEAN: (1) menegaskan kembali pentingnya kerjasama ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan stabilitas regional; (2) setuju untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara ASEAN; (3) menegaskan kembali komitmen mereka tentang kerjasama ASEAN untuk mempercepat pembangunan industri yang sehat; (4) setuju untuk meningkatkan kerjasama keuangan dan perbankan guna meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Di samping itu, para pemimpin ASEAN sepakat untuk meningkatkan frekuensi pertemuan mereka, menjadi 3-5 tahun sekali.

II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN

A. KERJASAMA MAKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

1. *Penanaman Modal Perikanan*

Sidang kelompok Koordinasi Perikanan dalam Kerjasama Makanan, Perikanan dan Kehutanan (COFAF) ke-9 berlangsung di Jakarta tanggal 9 Februari 1988 untuk membahas kerjasama perikanan.

Menteri Pertanian Achmad Affandi mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) Indonesia membuka pintu bagi penanam modal di bidang perikanan; (2) penanam modal dalam negeri dan modal asing perlu membina petani dan nelayan kecil, karena usaha ini dapat menguntungkan pihak swasta, penanam modal, petani dan nelayan kecil. Di Indonesia, sistem ini dikenal sebagai Proyek Inti Rakyat (PIR); (3) modal asing dan modal dalam negeri agar membantu kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran; (4) modal asing diijinkan menggunakan sistem *joint-venture* untuk meningkatkan lapangan kerja dan alih teknologi (*Pelita*, 10-2-1988).

2. Kerjasama Produsen Karet

Pertemuan empat negara ASEAN produsen karet berlangsung di Jakarta tanggal 26 Februari 1988.

Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Ir. Hasjrul Harahap mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa perusahaan karet Indonesia, Malaysia dan Muangthai perlu bekerjasama dan membentuk Pusat Perdagangan Karet di Singapura, karena informasi pasar ini penting bagi industri pertanian, khususnya bagi Indonesia.

Harry Tanugraha dari Bursa Komoditi Indonesia mengatakan pada pertemuan itu bahwa Pusat Perdagangan Karet itu perlu dibentuk karena pasaran karet alam di dunia sangat lemah padahal negara-negara ASEAN produsen karet merupakan pemasok (pensuplai) kebutuhan karet dunia (*Suara Pembaruan*, 1-3-1988).

3. Pembibitan Rotan

Pada tanggal 7 Maret 1988, Kakanwil Kehutanan Kalimantan Selatan, Ir. H. Toehadi, mengatakan bahwa: (1) Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Pusat Peremajaan Rotan ASEAN (PPRA) karena: (a) 1.000 hektar lahan di Banjar Baru cocok untuk pembibitan; (b) pabrik pengolahan berbagai produk rotan di daerah ini sangat meningkat (*Kompas*, 11-3-1988); (c) propinsi ini berhasil meningkatkan ekspor rotan sebagai penunjang ekspor non-migas; (2) proyek ini dibiayai oleh keenam negara anggota ASEAN yang masing-masing menyediakan US\$1 juta; (3) peremajaan rotan dimulai tahun 1988 di daerah Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai (*Antara*, 11-3-1988).

B. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Rencana Peningkatan Pariwisata

Ketua Sub-Komite Pariwisata ASEAN, Narzalina Z. Lim, mengatakan kepada *Philippines News Agency* (PNA) tanggal 19 Januari 1988 bahwa US\$5 juta dari US\$8 juta anggaran promosi "Kunjungilah ASEAN Tahun 1992" akan ditanggung oleh ASEAN. Kekurangannya akan ditutup dengan bantuan Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa (*The Jakarta Post*, 30-1-1988).

2. Usaha Menghapuskan Hambatan Non-tarif

Pertemuan Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (COTT) berlangsung di Singapura tanggal 26-29 Februari 1988. Rekomendasi pertemuan itu menyatakan bahwa ASEAN berupaya menghapuskan hambatan non-tarif, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Usaha ini diawali dengan pengidentifikasian hambatan non-tarif dan penyusunan langkah-langkah untuk lima tahun mendatang (*Antara*, 1-3-1988).

Tanggal 20 Maret 1988, Badan Pengembangan Perdagangan Singapura mengumumkan bahwa sejak 1 April 1988 jenis barang yang terdaftar dalam pengaturan Tarif Preferensi ASEAN

(APTA) naik menjadi 14.462. Batas Preferensi bagi 3.200 jenis barang dinaikkan dari 25% menjadi 50% untuk periode lima tahun mendatang, dan telah diajukan kepada Federasi KADIN ASEAN Singapura dan Asosiasi Pabrikan Singapura. Barang-barang itu antara lain adalah mesin pemroses data, suku cadang komputer, mesin pengolah makanan dan sari gandum (*Antara*, 21-3-1988).

C. KERJASAMA ENERGI ASEAN

Pertemuan Kerjasama Energi ASEAN Ke-7 berlangsung di Brunei tanggal 6-7 April 1988 untuk membahas kemajuan proyek kerjasama energi, rencana proyek baru dan program kerjasama energi di masa mendatang (*Antara*, 6-4-1988). Pertemuan itu menetapkan: (1) penyusunan prosedur suatu sistem keamanan suplai minyak ASEAN akan dibahas di Malaysia, Juni 1988; (2) ASEAN akan membentuk suatu kelompok ahli untuk memperluas kerjasama teknologi sumber energi baru (*Antara*, 9-4-1988).

Menteri pada Kantor Perdana Menteri Malaysia, Kasitah Gaddam, mengatakan kepada Senat tanggal 30 Maret 1988 bahwa: (1) keikutsertaan Malaysia dalam ASCOPE itu menguntungkan, karena program keamanan minyak ASEAN dapat menjamin suplai minyak mentah dan produk minyak yang memadai pada waktu krisis; (2) Malaysia dapat mengetahui suatu perjanjian bagi hasil yang bisa merangsang investasi asing; (3) pembahasan operasi kilang minyak dapat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi mutakhir; (4) para pejabat Petronas (Perusahaan Minyak Malaysia) memperoleh keuntungan dalam berbagai program latihan, seminar dan lokakarya tentang industri perminyakan ASCOPE (*Antara*, 31-3-1988).

D. KERJASAMA PENERBANGAN

Pertemuan Sub-komite Pelayanan dan Penerbangan Sipil ASEAN Ke-11 berlangsung di Manila awal April 1988. Menteri Transportasi dan Komunikasi Filipina, Rainero Reyes, mengatakan: (1) kegagalan ASEAN untuk mencapai konsesi dari beberapa negara Barat dalam perjanjian udara mencerminkan kelemahan ASEAN; (2) ASEAN harus bekerjasama untuk menanggulangi berbagai masalah penerbangan sipil (*Antara*, 12-4-1988).

E. SIDANG KOMISI ILMU DAN TEKNOLOGI

Pertemuan Komisi Ilmu dan Teknologi ASEAN Ke-18 berlangsung di Bangkok tanggal 6-10 April 1988 untuk membahas: (1) kemajuan dan proyek ASEAN di bidang makanan, energi, teknologi dan lingkungan, perkembangan sumberdaya manusia di bidang sains dan teknologi serta alih teknologi; (2) rencana pameran Sains dan Teknologi ASEAN di Manila tanggal 30 Januari-4 Februari 1989 (*Antara*, 12-4-1988).

F. USAHA MENANGGULANGI BAHAYA NARKOTIKA

Pertemuan para Pejabat Senior ASEAN Mengenai Narkotika Ke-11 berlangsung di Singapura tanggal 5-9 Februari 1988 untuk membahas pertukaran keterangan dan peninjauan program bersama. Pertemuan itu mensahkan "Rekomendasi Konperensi Internasional Penyalahgunaan dan

Penyelundupan Narkotika di Wina tahun 1987'' sebagai pedoman dasar untuk memberantas pelanggaran narkotika. Keputusan-keputusan lainnya: (1) pendekatan multidisipliner regional untuk memberantas penyalahgunaan narkotika akan ditingkatkan; (2) ASEAN tetap meneruskan perang melawan narkotika selama penyelundupan narkotika internasional masih berlangsung; (3) pertukaran informasi akan ditingkatkan; (4) mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika didaftarhitamkan (*Antara*, 7-4-1988); (5) ASEAN menetapkan lima proyek baru bersama selama lima tahun dengan biaya US\$5 juta, yakni: (a) pendirian pusat latihan penegak hukum narkotika di Muangthai; (b) pendirian pusat latihan dan rehabilitasi petugas di Malaysia; (c) pendirian studi observasi para pemimpin kepemudaan penanggulangan narkotika di Brunei; (d) pendirian pusat evaluasi perkembangan di Filipina; (e) pendirian pusat riset dan latihan di Singapura (*Antara*, 9-4-1988).

Di samping itu, berlangsung pula sebuah lokakarya Ahli Hukum dan Anti Narkotika ASEAN di Manila tanggal 9-29 April 1988 untuk membahas: (1) strategi penyelidikan dan penyitaan harta gelap pengedar narkotika; (2) rancangan peraturan yang seragam di antara negara ASEAN untuk menangani kawanan dan pengedar narkotika di kawasan ASEAN.

Wakil Menteri Kesehatan Filipina, Thomas P. Maramba, mengatakan bahwa: (1) pertemuan ini berhasil membentuk kelompok pengkaji masalah penyelidikan dan penyitaan harta gelap para pengedar obat terlarang; (2) pemberlakuan hukum tentang penyitaan kekayaan yang tidak sah oleh para pengedar narkotika akan dilakukan (*Antara*, 5-2-1988).

G. PROYEK BARU KEBUDAYAAN

Pertemuan Komite Kebudayaan dan Informasi ASEAN (*Committee Organization of Culture Information* atau COCI) Ke-17 berlangsung di Kualalumpur tanggal 28-31 Maret 1988. Deputy Menteri Penerangan Malaysia, Railey Haji Jefrey, menyampaikan sambutan Menteri Penerangan Mohamad Rahmat sebagai berikut: (1) ASEAN harus bekerja keras untuk mengawasi arus informasi Barat yang tidak seimbang; (2) peningkatan berbagai program pertukaran di antara negara ASEAN dapat mencegah penyebaran kebudayaan asing yang tidak diinginkan; (3) pengembangan kebudayaan dan pertukaran informasi melalui COCI dapat membentuk identitas ASEAN; (4) ciri dan peninggalan ASEAN dapat diketahui dari seni rakyat mereka; (5) Malaysia berusaha memperkokoh persaudaraan antara rakyat negara anggota ASEAN dengan meningkatkan atraksi wisata ASEAN melalui program televisi tanpa batasan (*Antara*, 28-4-1988).

Pertemuan memutuskan: (1) 29 proyek baru senilai US\$1.9 juta untuk anggaran 1988/1989, 9 proyek di antaranya dibiayai oleh negara ketiga dan organisasi internasional; (2) hasil KTT Manila 1987 merupakan dasar kegiatan di masa mendatang; (3) kemampuan profesional pendidikan serta penelitian masyarakat dan kebudayaan ASEAN akan dikembangkan; (4) arus informasi melalui jalur perpustakaan nasional dan perbaikan tarif komunikasi akan ditingkatkan; (5) penggunaan peralatan modern akan ditingkatkan agar kebudayaan ASEAN dikenal di seluruh dunia (*Antara*, 18-4-1988).

III. PERGANTIAN DIRJEN SEKNAS ASEAN

Pada tanggal 15 April 1988, Husni Thamrin Pane dilantik sebagai Dirjen Seknas ASEAN menggantikan Wisber Louis.

IV. KERJASAMA PARLEMEN

Sidang AIPO (*ASEAN Inter Parliamentary Organisation*) Ke-9 berlangsung di Singapura tanggal 25-30 Januari 1988 untuk membahas masalah politik, ekonomi dan organisasi sebagai tindak lanjut dari KTT ASEAN III di Manila 1987; (2) masalah pengungsi; (3) situasi ekonomi dunia; (4) usul pendirian sekretariat tetap AIPO; (5) pembentukan Parlemen ASEAN; dan (6) program legislatif umum yang berkaitan dengan perlindungan margasatwa (*Antara*, 25-1-1988).

Ketua AIPO Mohammed Zahir Ismail mengatakan bahwa: (1) pembentukan komite program undang-undang bersama mengenai narkoba dan rehabilitasi yang dirancang Malaysia 3 tahun lalu terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan hukum (*Antara*, 26-1-1988); (2) pembentukan Parlemen ASEAN seperti Parlemen Eropa bisa diwujudkan asal disesuaikan dengan kondisi dan tujuan dari organisasi ini; (3) program bersama pembuatan Undang-undang Narkoba dan pengobatan pencandu narkoba merupakan langkah awal untuk menyusun program bersama yang lain (*Antara*, 28-1-1988).

PM Mahathir Mohamad mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) para anggota parlemen sesama negara ASEAN perlu mencari jalan penyelesaian masalah Kamboja; (2) ketegangan proteksionisme di negara-negara berkembang dapat menimbulkan kesulitan di negara sedang berkembang sendiri; (3) pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan harus di-boikot seluruhnya (*Antara*, 27-1-1988); (4) pembentukan Parlemen ASEAN yang ideal masih memerlukan waktu yang panjang (*Kompas*, 27-1-1988).

Pada kesempatan yang sama, Ketua delegasi Indonesia, Kharis Suhud, menyampaikan pesan Presiden Soeharto sebagai berikut: (1) ASEAN akan bertambah kuat dan langgeng bila didukung oleh seluruh rakyat negara ASEAN; (2) AIPO diperlukan untuk memastikan agar ASEAN dapat mencapai cita-cita rakyat negara anggotanya.

Ketua delegasi Filipina, Antonio V. Cuenco, menyampaikan pesan Presiden Corazon Aquino yang mendesak negara-negara anggota ASEAN agar melipatgandakan usaha untuk menjamin masa depan yang lebih cerah bagi rakyat di kawasan Asia Tenggara.

Ketua delegasi Singapura, Dr. Yeoh Ghim Seng, menyampaikan pesan Presiden Wee Kim Wee sebagai berikut: (1) perubahan perimbangan kekuatan ekonomi di dunia, peningkatan perkembangan teknologi, merosotnya harga komoditi negara berkembang dan peningkatan proteksionisme semakin memperberat tantangan ASEAN; (2) sesama negara anggota ASEAN agar terus meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan; (3) semangat kepercayaan dan saling menghormati antar negara ASEAN merupakan pendorong kemajuan dan keberhasilan ASEAN.

Ketua delegasi Muangthai, Chuan Leekpai, menyampaikan pesan PM Prcm Tinsulanonda sebagai berikut: (1) ASEAN kini terikat pada prinsip-prinsip bersama untuk memelihara kemakmuran dan kestabilan di kawasanannya melalui kerjasama dan tidak campurtangan masalah dalam negeri; (2) ASEAN akan memenuhi ikrar saling tolong menolong dan mengeratkan persahabatan untuk memastikan agar kawasan ini benar-benar aman (*Antara*, 27-1-1988).

Sidang AIPO ini juga dihadiri oleh para wakil dari Australia, Selandia Baru, Kanada dan Parlemen Eropa sebagai pengamat (*Antara*, 26-1-1988).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. ASEAN-AS

Pertemuan delegasi KADIN ASEAN dan KADIN AS berlangsung di Washington pada pertengahan Januari 1988 untuk membahas usaha peningkatan perdagangan dan investasi, RUU tentang Komoditi Impor ASEAN yang akan diajukan kepada Kongres AS serta pencegahan proteksionisme AS.

Dalam makalahnya pada pertemuan KADIN itu, Ketua Dewan Direksi Caltex Pacific Indonesia, Haroen Al Rasjid, mengatakan bahwa: (1) kawasan ASEAN mempunyai sumberdaya energi yang cukup untuk mengembangkan berbagai industri raksasa; (2) penurunan nilai ekspor migas ASEAN di pasaran dunia diimbangi dengan diversifikasi ekspor LNG dan LPG; (3) LNG dari ketiga negara ASEAN dipasarkan ke Asia Utara, karena pasaran di Jepang agak jenuh (*Angkatan Bersenjata*, 20-1-1988).

Surat protes ASEAN yang ditandatangani oleh Komite Washington ASEAN dan ditujukan kepada Menlu AS, George Shultz, beredar pada pertemuan persiapan ASEAN di Washington tanggal 7 Februari 1988. Surat itu menuduh AS melanggar persetujuan bebas bea atas produk ekspor dari Singapura berdasarkan sistem preferensi umum (GSP), yang dikukuhkan Januari 1987 (*Kompas*, 11-2-1988).

Juru bicara kantor perdagangan AS, Hary Holmes, menanggapi protes itu dengan mengemukakan bahwa AS: (1) tidak akan mempertimbangkan kembali pencabutan GSP bagi Singapura, karena perekonomian negara ini lebih baik daripada negara-negara berkembang lainnya yang mendapatkan GSP; (2) belum merencanakan untuk mencabut GSP bagi Indonesia, Malaysia, Filipina dan Muangthai (*Kompas*, 11-2-1988).

Menteri Perdagangan Indonesia, Rahmat Saleh, mengatakan pada pertemuan Himpunan Pengusaha Rotan di Departemen Perdagangan tanggal 11 Februari 1988: (1) agar para pengusaha Indonesia memanfaatkan GSP (*Generalized System Preferential*), supaya komoditi ekspornya dapat bersaing, bebas bea masuk dan dapat melakukan perdagangan langsung dengan negara yang bersangkutan; (2) fasilitas GSP diperoleh melalui korespondensi dan informasi tentang jenis mutu dan harga barang komoditi yang bersaing (*Angkatan Bersenjata*, 12-2-1988).

Wakil Menlu AS Urusan Ekonomi, Allen Wallis, mengatakan di Washington bahwa AS menolak kemungkinan studi bersama untuk menciptakan perjanjian perdagangan bebas AS-ASEAN, tetapi AS bersedia meningkatkan investasi dan perdagangan dengan ASEAN (*Kompas*, 13-2-1988).

Pembantu Menlu AS untuk Urusan Asia Timur, Gaston Sigur, mengatakan di Foreign Press Centre tanggal 9 Februari 1988 bahwa: (1) AS tidak akan melepaskan negara ASEAN mana pun kecuali Singapura dari program GSP; (2) surplus perdagangan bukan merupakan faktor dalam pencabutan GSP, tetapi ditentukan oleh faktor pertumbuhan pendapatan per kapita, perluasan perdagangan dan produk ekspor ASEAN ke AS; (3) AS menolak kemungkinan terbentuknya persetujuan dagang bebas antara ASEAN dan AS (*Antara*, 24-2-1988).

B. ASEAN-KANADA

Pertemuan Panitia Kerjasama Kanada-ASEAN (JCC) Ke-5 berlangsung di Ottawa tanggal 7-8 April 1988, untuk membahas perkembangan kerjasama ASEAN-Kanada serta situasi ekonomi dan perdagangan dunia. Masing-masing delegasi dipimpin oleh Khun Chawat Arthayukili, Dirjen ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Muangthai dan Mrs. Jean McCloskey, Deputy Asisten Menteri Urusan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri Kanada.

Mrs. Jean McCloskey menegaskan bahwa hasil pembicaraan masalah ekonomi internasional dapat menjadi bahan pembahasan Pertemuan Puncak Ekonomi negara maju di Toronto, Juni 1988.

ASEAN mengatakan bahwa: (1) Kanada mempunyai potensi untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia; (2) ASEAN ingin menjalin kerjasama pembangunan yang berfokus pada proyek jangka menengah dan panjang di bidang perdagangan, pariwisata dan promosi penanaman modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, jalinan kelembagaan dan pembangunan sumberdaya manusia.

Kedua pihak sepakat bahwa: (1) JCC memperkokoh semangat kerjasama; (2) kerjasama antara ASEAN dan Kanada perlu ditingkatkan.

Di samping itu Kanada menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bilateral antara AS-Kanada penting untuk mengurangi proteksionisme dan menciptakan perdagangan bebas (*Antara*, 13-4-1988).

C. ASEAN-MEE

Komisaris Hubungan Luar Negeri MEE, Willy de Clercq, mengatakan di Denpasar tanggal 7 Januari 1988 bahwa modal pasar MEE di ASEAN turun dari 17% tahun 1973 menjadi 11% tahun 1986. Dalam periode yang sama modal pasar Jepang di ASEAN tetap 26%, sedang AS naik dari 16% menjadi 26% (*Antara*, 8-1-1988).

Duta Besar Indonesia di PBB, Ali Alatas, mengatakan kepada para pengusaha AS di Washington tanggal 10 Maret 1988 bahwa: (1) titik tolak ASEAN dan MEE berbeda. Eropa Barat hampir menuju kepada integrasi regional, sementara ASEAN sedang berusaha meletakkan dan memupuk kerjasama regional menjadi alat kebijaksanaan bersama; (2) negara Eropa Barat saling berhubungan secara intensif selama berabad-abad, sedangkan negara-negara Asia Tenggara belum mempunyai hubungan. Pandangan mereka terhadap negara tetangganya diwarnai oleh pengalaman penjajahan dan permusuhan masa lalu; (3) kerjasama regional negara-negara Eropa Barat adalah antara negara maju dan kaya, yang struktur industri dan ekonominya saling melengkapi, sedangkan kerjasama regional Asia Tenggara adalah antara negara-negara berkembang, yang sistem ekonominya berorientasi kepada pertanian dan ekspor; (4) ASEAN ketika dibentuk tidak menghadapi musuh bersama yang jelas seperti negara-negara MEE menghadapi Uni Soviet sebagai musuh bersama mereka (*Kompas*, 11-3-1988).

Pertemuan delegasi ASEAN dan para pengusaha Bremen berlangsung di Bremen tanggal 13-14 April 1988 untuk membahas peningkatan hubungan ekonomi ASEAN-Jerman Barat. Kepala

Bidang Ekonomi Konsulat Jenderal Indonesia di Bremen, Drs. Nazaruddin Koro, mengatakan di Hamburg tanggal 18 April 1988 bahwa: (1) langkah awal rencana peningkatan hubungan ekonomi yang dibahas dalam pertemuan ASEAN dan para pengusaha Bremen adalah menyetujui Bremen sebagai pusat perdagangan, pameran dan distribusi bagi komoditi ekspor ASEAN; (2) ASEAN mendapat prioritas dalam kebijaksanaan ekonomi luar negeri Jerman Barat, karena iklim penanaman modal di ASEAN itu dapat meningkatkan kegiatan ekspor-impor bagi kedua belah pihak (*Antara*, 19-4-1988).

D. ASEAN-JEPANG

1. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan

Ketua Kerjasama Dana Luar Negeri Jepang (OECD), Mitshuhede Yamaguchi, mengatakan setelah diterima Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 22 Januari 1988 bahwa dari US\$2 milyar bantuan Jepang, belum dapat dirinci berapa besar yang akan diterima oleh masing-masing negara anggota ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 22-1-1988).

Pada tanggal 5 Februari 1988, Dirjen Badan Pengembangan Perdagangan Singapura, Ridzwan Dzafir, mengatakan bahwa: (1) Jepang mendukung pencabutan GSP AS untuk Singapura karena Jepang tidak memahami faktor ekonomi negara-negara berkembang; (2) Singapura menyesalkan keengganan Jepang untuk membuka pasaran bagi produk-produk ASEAN (*Pelita*, 6-2-1988).

Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Thomas Alacantra, mengatakan kepada para wartawan di Manila tanggal 9 Februari 1988 bahwa Filipina berusaha mendapatkan US\$700 juta dari Dana Pembangunan ASEAN-Jepang untuk membiayai proyek-proyek swasta melalui Bank Sentral Filipina (*Antara*, 11-2-1988).

Pertemuan para pejabat senior ASEAN dan delegasi Jepang berlangsung di Kualalumpur tanggal 3-4 Maret 1988 untuk membahas: (1) pengalokasian paket bantuan Jepang (US\$2 milyar) untuk jenis proyek tertentu yang memenuhi persyaratan; (2) usaha pengembangan industri swasta melalui investasi usaha patungan di negara-negara ASEAN (*Antara*, 3-3-1988).

Wakil Menteri Keuangan Malaysia, Loke Yuen Yow, mengatakan di parlemen tanggal 10 Maret 1988 bahwa pemerintah dan pihak swasta Malaysia mengajukan proyek senilai US\$800 juta, yang akan dibiayai oleh Dana Pembangunan ASEAN-Jepang melalui tiga Bank khusus dan Badan Keuangan Industri Malaysia (*Antara*, 11-3-1988).

Ketua Badan Bursa Saham Muangthai, Dr. Maruay Phadoongsidhi, mengatakan kepada para wartawan di Bangkok tanggal 23 Maret 1988 bahwa: (1) seratus tiga puluh investor Jepang telah bergabung membentuk suatu perusahaan modal untuk investasi proyek patungan di negara-negara ASEAN; (2) perusahaan itu harus mendaftarkan diri pada bursa saham di setiap negara ASEAN; (3) sembilan usaha patungan Jepang-Muangthai yang bermodal 13.700 juta Baht terdaftar di bursa saham Muangthai (*Antara*, 24-3-1988).

Perdana Menteri Jepang, Noburo Takheshita, mengatakan dalam sidang umum Kongres Nasional Sosial dan Ekonomi Ke-18 di Tokyo pertengahan April 1988 bahwa angsuran hutang ASEAN kepada Jepang berdasarkan kurs yang berlaku sekarang (US\$1 = 126 Yen) merupakan

beban bagi ASEAN. Oleh karena itu Pemerintah Jepang berusaha mengurangi beban hutang tersebut (*Antara*, 19-4-1988).

Wakil Ketua Komisi APBN dari Fraksi-PP H. Hamzah Haz, mengatakan kepada *Kompas* tanggal 24 April 1988 bahwa: (1) kebijakan Jepang mengenai pengurangan beban hutang ASEAN pada saat perekonomian mengalami kelesuan sangat tepat; (2) Pemerintah Jepang agar melonggarkan jadwal pembayaran hutang dan bersedia menerima pembayaran hutang dalam bentuk dollar; (3) Jepang agar membuka pasaran yang seluas-luasnya bagi barang-barang Indonesia (*Kompas*, 22-4-1988).

2. Program Pertukaran Kebudayaan

Datuk Razali Ismail dan Noburu Nakahira, masing-masing Pejabat Sementara Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Duta Besar Jepang untuk Malaysia, menandatangani Program Pendidikan Jepang-ASEAN (JAEP) di Kuala Lumpur tanggal 8 Maret 1988 untuk meningkatkan kerjasama pendidikan dan penelitian. Seluruh biaya proyek, US\$1,4 juta, ditanggung oleh Jepang. Dubes Nakahira mengatakan bahwa ASEAN akan diperkenalkan kepada rakyat Jepang melalui kunjungan artis, pelajar dan wartawan ASEAN ke Jepang serta pengiriman tenaga ahli Jepang ke negara-negara ASEAN (*Antara*, 9-3-1988).

E. ASEAN-AUSTRALIA

Pertemuan para pejabat senior ASEAN untuk mempersiapkan Dialog ASEAN-Australia berlangsung di Bangkok tanggal 13-14 Maret 1988 untuk membahas perdagangan tekstil, tarif dan eukai Australia serta kemajuan program bantuan Australia (*Antara*, 15-3-1988).

VI. HUBUNGAN ASEAN - PARLEMEN EROPA

Dialog AIPO-Parlemen Eropa Ke-6 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 27-28 Januari 1988 untuk membahas: (1) hasil KTT ASEAN 1987 di Manila; (2) kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa Barat dan negara-negara anggota AIPO; (3) penanaman modal; (4) suasana politik regional dan internasional; (5) pertukaran kunjungan delegasi Parlemen anggota AIPO dan Parlemen Eropa; (6) kerjasama kebudayaan (*Kompas*, 12-4-1988).

AIPO mengemukakan berbagai kritik, khususnya mengenai pungutan yang dikenakan masyarakat Eropa atas lemak dan minyak jenuh. Pembebasan pasar, proteksionisme dan pemasaran produk tropis dan hak cipta dikritik pula oleh AIPO.

Delegasi Parlemen Eropa yang dipimpin oleh Guenter Rinshe, Ketua Parlemen Jerman Barat, mengatakan: (1) perdagangan antara MEE dan ASEAN masih jauh dari yang diharapkan; (2) negara-negara Eropa masih mempunyai kesulitan untuk memasarkan hasil pertaniannya sebagai akibat perbedaan kebijakan ekonomi yang sukar dikompromikan; (3) Parlemen Eropa berusaha menegakkan diberlakukannya proteksionisme dan mengusulkan perbaikan-perbaikan untuk memperkuat hubungan dagang dengan ASEAN; (4) ASEAN jangan membebaskan kesalahan pada satu pihak saja. Keterbatasan dan kemampuan masing-masing perlu dirumuskan secara bersama

melalui dialog untuk mengatasi rintangan-rintangan (*Kompas*, 12-1-1988); (5) besarnya delegasi Parlemen Eropa yang hadir membuktikan minat besarnya untuk berdialog; (6) ASEAN dan MEE harus bekerjasama untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan dunia; (7) dialog dapat memberi sumbangan yang berharga untuk mengatasi rintangan komunikasi (*Merdeka*, 29-1-1988).

Kedua pihak sepakat untuk memperkuat dan memperluas kerjasama dan mengharapkan agar jadwal pertemuan yang disepakati sembilan tahun lalu dilaksanakan secara teratur (*Antara*, 29-1-1988).

VII. HUBUNGAN DAGANG ASEAN-RRC

Kantor Berita Cina, *Hsinhua*, tanggal 17 April 1988 memberitakan bahwa dalam triwulan pertama 1988, nilai perdagangan ASEAN-RRC mencapai US\$1,13 milyar. Impor RRC dari ASEAN mencapai US\$564 juta, sedang eksportnya mencapai US\$566 juta (*Antara*, 18-4-1988).

Para Penulis

ANALISA NO. 4, 1988

DJIWANDONO, J. Soedradjad. Berijazah Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1963; M.Sc. dalam ekonomi dari Universitas Wisconsin, Madison, USA tahun 1966 dan Ph.D. dalam ekonomi dari Universitas Boston, USA (1980); kini adalah Menteri Muda Perdagangan Kabinet Pembangunan V, Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; sebelumnya adalah Asisten Menko Ekuin pada Kabinet Pembangunan IV, Kepala Biro Moneter dan Keuangan Negara BAPPENAS dan Staf Ahli Sekretaris Dewan Moneter, Staf Peneliti (1963-1978) dan Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, LEKNAS-LIPI serta Asisten Menteri Perdagangan pada Kabinet Pembangunan I. Bidang perhatian: Moneter, Ekonomi Internasional, Keuangan Negara, Ekonomi Pembangunan dan Teori Ekonomi.

SIMANDJUNTAK, Djisman S. Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan, Bandung (1973); pada tahun 1979 mendapat diploma ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Cologne, Jerman Barat. Dari fakultas dan universitas yang sama pada tahun 1983 memperoleh Ph.D dalam Ilmu Ekonomi. Mengawali tugasnya di CSIS sejak tahun 1974 sebagai Staf Peneliti pada Departemen Ekonomi. Sejak tahun 1984 menjabat Kepala Departemen Ekonomi, CSIS, kini Koordinator Program Studi Sistem dan Struktur Ekonomi, CSIS.

SOESASTRO, M. Hadi. Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rheinisch Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D. dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Wakil Direktur untuk Program Studi Internasional dan Keamanan, CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981-), Dosen FISIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; sebelumnya adalah Direktur Studi, CSIS.